

PERSEPSI TRANSMIGRAN JAWA TENTANG KEPEMIMPINAN IDEAL KEPALA DESA DI KECAMATAN BARADATU, LAMPUNG UTARA

Oleh **T. Dibyo Harsono**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: *dibyoharsono@yahoo.com*

Abstrak

Desa Banjar Mulia adalah salah satu desa di Kecamatan Baradatu, Lampung Utara. Sebagian besar (79,72%) penduduknya berasal dari Jawa. Penelitian ini mengkaji kepemimpinan kepala desa di daerah tersebut menurut persepsi transmigran Jawa.

Dari hasil penelitian diketahui dua hal. Pertama, bahwa transmigran Jawa mempunyai persepsi yang baik tentang kepemimpinan kepala desa, jika ia memiliki sifat dan kualitas kepemimpinan yang cukup baik. Persepsi itu didasarkan pada pemahaman para transmigran mengenai nilai-nilai kepemimpinan yang ideal, seperti kepemimpinan raja yang bijaksana zaman dulu. Kedua, persepsi itu juga erat kaitannya dengan lamanya transmigran bermukim di daerah transmigrasi, dan hubungan positif mereka dan signifikan dengan kepala desa, yaitu Kepala Desa Banjar Mulia Kecamatan Baradatu, Lampung Utara.

kata kunci: kepemimpinan, kepala desa.

Abstract

The place of research is in Desa Banjar Mulia, Kecamatan Baradatu, North Lampung. Banjar Mulia is a transmigrant village where (79,72%) of the inhabitant are Javaness.

The result of research shows that the Javanese transmigrant have a good perception about the village chief who has character and capability like on attitude of a wise king, and there is a positive, tight and significant relationship between a time of living in out Java variable with the perception of Javanese transmigrant about leadership of an ideal village chief. The first, how is perception of Javanese transmigrant about leadership of an ideal village chief, and the second, is there a positive, tight and significant relationship between a time of living in out Java with perception Javanese transmigrant about leadership of an ideal village chief. The Javanese people have an ideal leadership values. It was inherited from attitude of a wise king that lived in past. In a smaller scope the leadership values look for character and attitude of a village chief. There are two questions that must be answered in this research.

Keywords : *leadership, village chief.*

A. Pendahuluan

Pandangan tradisional masyarakat Jawa yang berkaitan dengan kepemimpinan yang baik tidak bisa lepas dari unsur mistis atau yang bersifat mistis. Kekuasaan politik bagi orang Jawa merupakan pemusatan kekuatan kosmis paling padat yang meresapi segala-galanya. Masih menurut Frans Magnis Suseno, besarnya tenaga atau kekuatan kosmis yang berhasil dihimpun oleh seorang penguasa akan menjadikannya pribadi yang tenang. Ia akan menjadi orang yang bersifat *alus* yang berarti lembut, luwes, sopan, beradab, dan peka, serta akan menjadikannya pribadi yang berwibawa. Dalam pandangan masyarakat tradisional Jawa, banyak sifat-sifat kebajikan yang harus dimiliki dan dijauhi oleh seorang pemimpin.

Menyoroti persepsi masyarakat Jawa tentang kepemimpinan yang ideal tidak dapat dilakukan tanpa melihat aspek kehidupan orang Jawa secara keseluruhan. Berbicara tentang kepemimpinan berarti membicarakan masalah kekuasaan, yakni kekuasaan politik. Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang mengutip pendapat ROG. Anderson mengatakan bahwa: "Kekuasaan menurut paham Jawa adalah segala kekuatan yang menyatakan diri dalam alam dan juga merupakan ungkapan energi Tuhan tanpa bentuk yang selalu kreatif meresapi seluruh kosmis" (Alfian, 1991: 202). Dalam pandangan yang seperti itu, konsep kekuasaan Jawa mengandung tiga gejala, yakni:

1. Kekuasaan kongkrit.
2. Kekuasaan itu homogen, bersifat satu dan sama, karena jumlah kekuasaan di alam semesta selalu tetap.
3. Kekuasaan tidak mempersoalkan dari mana ia berasal dan menyerap berbagai gumpalan kekuasaan, baik kawan maupun lawan.

Penerapan konsep kekuasaan ini didukung oleh kualitas penguasa dalam suatu ajaran yang disebut ajaran raja yang bijaksana, yakni sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja sebagai seorang penguasa.

Seiring dengan konsep perkembangan dan kemajuan masyarakat, perwujudan diri seorang penguasa bergeser dari sosok seorang raja menjadi penguasa-penguasa kecil yang masih tetap mempunyai kekuasaan politik. Salah satu sosok penguasa politik yang ada sekarang adalah seorang kepala desa. Bergesernya subjek pelaku politik yang dimaksud dalam ajaran raja yang bijaksana dari seorang raja menjadi kepala desa, diasumsikan tidak akan mengubah sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Seorang kepala desa juga harus mempunyai sifat seperti dalam ajaran raja yang bijaksana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah: "Bagaimanakah hubungan antara lama bermukim di luar Jawa dengan persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan ideal seorang kepala desa, dan adakah hubungan yang positif, erat dan signifikan antara lama bermukim di luar Jawa dengan persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan ideal kepala desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan ideal kepala desa.
2. Untuk mengetahui hubungan antara lama bermukim dengan persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan ideal kepala desa.

Persepsi adalah proses atau hasil yang melahirkan kesadaran atas sesuatu hal melalui perantara pikiran sehat. Selanjutnya dikatakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling berkaitan. Pertama, menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan

inderawi lainnya. Kedua, penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tadi. Arti ditetapkan melalui interaksi kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dengan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Hasil-hasil yang diperoleh dari kesan-kesan yang ditangkap oleh indera ditafsirkan melalui proses berpikir. Untuk menetapkan arti dari kesan-kesan yang ditangkap, maka proses berpikir dipengaruhi oleh dua faktor, yakni pertama, pengalaman masa lalu; dan kedua, nilai-nilai yang diyakini seseorang. Pengalaman masa lalu akan memberikan banyak pengertian pada pemahaman tentang suatu objek, baik pengalaman pendidikan, pengalaman sosialisasi maupun pengalaman dalam hidup bermasyarakat. Pengalaman sosialisasi dapat terjadi di berbagai tempat dan lingkungan. Sosialisasi nilai-nilai budaya akan lebih terasa di lingkungan asal budaya tersebut sendiri. Artinya akan terdapat perbedaan persepsi antara orang yang tinggal di luar lingkungan budaya dengan mereka yang tinggal di dalam lingkungan budaya tentang suatu objek. Dapat diasumsikan bahwa semakin lama seseorang tinggal di lingkungan budayanya akan semakin kuat pemahamannya tentang nilai-nilai budayanya; dan sebaliknya mereka yang lama tinggal di luar lingkungan budayanya akan memiliki pemahaman yang tipis tentang nilai-nilai budayanya.

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan transmigran adalah orang yang berpindah ke daerah (pulau) lain. Adapun Jawa yang dimaksud adalah seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1984: 4), yakni orang yang mendiami bagian tengah dan timur dari seluruh Pulau Jawa. Dan menurut Franz Magnis Suseno (1985: 11) adalah mereka yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa.

Dengan demikian, transmigran Jawa adalah orang yang berasal dari bagian tengah dan timur Pulau Jawa dan bahasa ibunya adalah bahasa Jawa, yang berpindah ke luar bagian tengah dan timur Pulau Jawa.

Para ahli di bidang administrasi dan manajemen telah banyak merumuskan ciri dan sifat dari sebuah kepemimpinan yang baik. Namun mereka sepakat bahwa kepemimpinan itu bersifat situasional. Artinya, sebuah kepemimpinan yang baik belum tentu ideal untuk berbagai situasi. Lebih kongkrit lagi kepemimpinan ideal bagi suku bangsa Jawa akan berbeda dengan suku bangsa lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kepemimpinan bagi orang Jawa bersifat mistis dan mengandung kekuatan-kekuatan supranatural. Dalam pandangan Jawa, kehidupan dunia tidak terlepas dari kehidupan alam gaib yang serba mistis. Dalam pandangan yang serba mistik ini, segala sesuatu yang terjadi di alam realita mempunyai hubungan yang erat dengan kejadian-kejadian di alam gaib. Dengan demikian, kekuasaan sebagai suatu fakta sosial juga dipandang sebagai suatu fakta yang mengandung nilai-nilai mistik. Kekuasaan adalah ungkapan energi Illahi tanpa bentuk, yang selalu kreatif meresapi seluruh kosmos.

Dengan berpegang pada pandangan di atas, maka wajar apabila sifat-sifat pemimpin yang ideal yang dimaksud oleh masyarakat Jawa mengacu pada sifat-sifat kebaikan yang diturunkan oleh Tuhan Yang Mahaesa, sebagai suatu ajaran raja yang bijaksana. Di antara ajaran-ajaran tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Alfian, 1991: 197 – 199) sebagai berikut :

Pada zaman Tumapel/Singasari, dibangun satu monumen simbolis berupa patung Joko Dolog, perwujudan Prabu

Kertanegara sebagai Syiwa-Budha yang mensintesiskan sikap *bhairawa-anoraga*, perkasa di luar, lembut di dalam. Yang menarik adalah polosnya Joko Dolog yang menunjukkan kejiwaan *aruphadatu*. Akan tetapi sikap duduknya atau silanya (*mudranya*) ternyata masih menunjuk ke bumi (*bumi sparsa mudra*), yang berarti setia pada janji, berwatak tabah dan toleran, selalu berbuat baik. Joko Dolog berarti pribadi yang jantan yang bertekad kokoh, tak tergoyahkan (*maligining rasa*), dan tidak takut (*pangrasa/panging rasa/kedher*).

Pada masa itulah, Sang Praduyaparamita yang dipersonifikasikan oleh Ken Dedes, nenek moyang Kertanegara, menerima ajaran Mpu Purwo seorang pendeta Budha, berupa *Hasta Karma Pratama*, sebagai contoh subjektivikasi suatu ajaran yakni pandangan yang benar, pikiran yang benar, bicara yang benar, tingkah laku yang benar, kehidupan yang benar, ingatan yang benar, Samadhi. Adapun untuk mendukung kualitas seorang raja, Ken Dedes mengajarkan kepada anak-anaknya ajaran *Dasa Paramita*, yakni *dhana* atau kemurahan hati, *sila* atau laku utama, *ksanti* atau ketenangan dan kesabaran, *virya* atau keberanian, *prajna* atau kewaspadaan, *pranidhana* atau ketetapan hati, *bala* atau kekuasaan, *juana* atau pengetahuan.

Ajaran ini pada zaman Panembahan Senopati, terserap ke dalam konsep *Tantrayana*, sebagai koordinat *Mahayana* dan *Hinayana*. Lakunya dalam dua tingkatan, pertama, negasi total; dan kedua, integrasi total (*Kawula-Gusti*) yang disimbolkan oleh perpaduan gunung dan samudra. Gunung adalah lambang *paraning dumadi*, samudra adalah lambang kerakyatan, merakyat (menampung segala kepentingan dan keinginan rakyat). Oleh karena itu, atas dasar hakikat kekuasaan dan kekuasaan yang didapatkan, raja harus melaksa-

nakan ajaran *Hasta Karma Pratama*, *Dasa Paramita*, dan cinta kasih (dasar Ketuhanan Yang Mahaesa). Selain itu dari serat *Asthabrata* dapat dipetik delapan laku utama yang bersumber dari epos Ramayana dan ditulis dalam serat Rama Jarwa yang memuat sifat kebajikan delapan Dewa, yakni *Bathara Indra*, *Yana*, *Surya*, *Chandra*, *Bayu*, *Wisnu*, *Brama*, dan *Baruna*. Selanjutnya Soejono Soekanto (1987: 267) mengatakan “kepemimpinan yang akan berhasil, adalah kepemimpinan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Indra-brata*, yang memberi kesenangan dalam jasmani.
2. *Yama-brata*, yang menunjukkan pada keahlian dan kepastian hukum.
3. *Surya-brata*, yang menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja secara persuasif.
4. *Caci-brata*, yang memberi kesenangan rohani.
5. *Bayu-brata*, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran dari pengikut-pengikutnya.
6. *Dhana-brata*, menunjukkan suatu sikap yang patut dihormati.
7. *Paca-brata*, yang menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan ketrampilan.
8. *Agni-brata*, yaitu sifat yang memberikan semangat kepada anak buah.
9. Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwana IX mengutip ungkapan Ki Dhalang, yang berbunyi: “*Gung binathara, bau dhenda nyakrawati, berbudi bawa leksana, ambeg adil paramarta*”, artinya raja yang mempunyai nilai lebih/raja yang seperti dewa, mempunyai kekuasaan yang sangat besar/sangat kuat, selalu menepati

janji/bijaksana, adil terhadap sesama/rakyatnya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan teknis analisis kualitatif-kuantitatif. Analisis kualitatif dipergunakan untuk mengetahui persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan yang ideal seorang Kepala Desa, dan analisis kuantitatif dipergunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara lama bermukim di luar Jawa dengan persepsi transmigran Jawa.

B. Hasil dan Bahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat transmigran Jawa masih terikat pada pandangan tradisional, bahwa seorang Kepala Desa sebagai pemimpin harus memiliki sifat dan perilaku seperti raja-raja Jawa di masa lalu. Sifat dan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Ajaran Dasa Paramita

- a. Ajaran Dasa Paramita yang pertama adalah kemurahan hati. Masyarakat transmigran sangat mendukung bila Kepala Desa mempunyai sifat murah hati. Kemurahan hati ini diperlihatkan dengan memberikan pertolongan pada masyarakat yang membutuhkan. Secara persentase diketahui bahwa mayoritas transmigran Jawa sangat setuju dengan sifat ini. Dengan demikian Kepala Desa yang mempunyai kemurahan hati adalah dambaan para transmigran Jawa.
- b. Ajaran kedua adalah laku utama. Laku utama seorang Kepala Desa adalah kewibawaan dan pengaruhnya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang dihormati rakyatnya.
- c. Ajaran ketiga adalah ketenangan. Ketenangan menunjukkan kemandirian pribadi dan jiwa seorang Kepala Desa.
- d. Ajaran keempat adalah kesabaran. Kesabaran dan ketenangan adalah sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa.
- e. Ajaran kelima adalah keberanian. Pada zaman raja-raja Jawa masih berkuasa, keberanian bagi seorang raja merupakan salah satu syarat mutlak. Kepala Desa yang berani adalah yang mau dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kepala Desa yang dengan sifat keberaniannya mau dan rela berkorban untuk kepentingan seluruh rakyatnya.
- f. Ajaran keenam adalah kewaspadaan. Kewaspadaan adalah sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa.
- g. Ajaran ketujuh adalah usaha dan sarana. Pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tidak hanya membutuhkan dana yang besar, namun juga seorang Kepala Desa yang energik. Oleh karena itu sangat tepat bila transmigran Jawa mengharapkan seorang Kepala Desa yang suka bekerja keras dan memiliki harta yang banyak untuk mendukung tugasnya.
- h. Ajaran kedelapan adalah ketetapan hati. Sifat ini ditunjukkan melalui sikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam bertindak.
- i. Ajaran kesembilan adalah kekuasaan. Menurut pandangan Jawa, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan besar.
- j. Ajaran kesepuluh adalah pengetahuan. Orang yang berpengetahuan adalah orang yang berpendidikan, bisa pendidikan formal maupun non formal.

2. Ajaran Asthabrata

- a. *Indra* atau kesenangan. Secara umum masyarakat transmigran Jawa mengharapkan agar Kepala Desa, yang telah mereka pilih dapat memberikan kesenangan kepada mereka. Antara lain memberikan kemudahan dalam mengurus berbagai urusan, penyediaan lapangan kerja yang layak dan berbagai fasilitas kehidupan lainnya.
- b. *Yama* atau keadilan. Kepala Desa diharapkan bisa berlaku adil kepada semua warga masyarakat. Pertama, keadilan itu bersifat komutatif, artinya setiap orang akan memperoleh bagian yang sama tanpa memandang jasa atau apapun yang telah ia berikan. Kedua, keadilan bersifat distributif, artinya setiap orang akan memperoleh bagian sesuai dengan jasa yang telah diberikan.
- c. *Surya* atau ajakan. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Kepala Desa adalah sifat yang penuh dengan ajakan. Untuk menggerakkan masyarakat, Kepala Desa dapat melakukannya dengan dua cara, yakni secara ajakan (*persuasif*) dan dengan cara memerintah (*legal formal*).
- d. *Caci* atau kesenangan rohani. Tidak berbeda dengan masyarakat dari suku bangsa lain, suku bangsa Jawa/transmigran Jawa berharap agar Kepala Desa bisa memberikan kesenangan kepada mereka. Kesenangan dalam bentuk rasa aman.
- e. *Bayu* atau simpati. Seorang Kepala Desa harus memiliki sifat *bayu*, yang diwujudkan dengan keperdulian terhadap kesulitan masyarakat. Hal itu akan bisa menggerakkan Kepala Desa untuk mengambil kebijakan dan tindakan untuk mengatasi kesulitan tersebut.
- f. *Dhana* atau sifat yang terpuji. Baik buruk penilaian terhadap seorang pemimpin sangat bergantung pada sifat-sifat yang dimilikinya. Dalam konteks kepemimpinan seorang Kepala Desa, maka masyarakat transmigran Jawa menuntut agar Kepala Desa juga memiliki sifat *dhana* ini, yakni berjiwa besar, mau mengalah, dan mau mengakui kesalahan.
- g. *Paca* atau keunggulan dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. Seorang Kepala Desa yang ideal adalah seorang yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Kelebihan dalam ilmu pengetahuan, kepandaian dan ketrampilan.
- h. *Agni* atau memberi semangat. Masyarakat sebagai subjek pembangunan memerlukan dorongan semangat dari aparat yang memimpin mereka. Dorongan semangat ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari.

3. Sifat Kerakyatan

Secara struktural formal Kepala Desa menempati kedudukan yang paling tinggi di desa. Namun dalam kedudukan yang demikian, Kepala Desa hendaknya mempunyai jiwa sosial. Jiwa sosial ini ditunjukkan dengan sikap membaaur dengan seluruh golongan masyarakat. Sifat merakyat ini akan menuntun Kepala Desa untuk mengunjungi semua golongan yang ada dalam masyarakat desa. Melalui kunjungan-kunjungan inilah keperdulian Kepala Desa sebagai seorang pemimpin diasah. Dalam setiap kunjungan ada beberapa harapan yang disampaikan oleh masyarakat transmigran Jawa sebagai wujud sifat kerakyatan dari Kepala Desa, yakni:

- a. Apa yang dibutuhkan masyarakat dapat segera terpenuhi.
- b. Kepala Desa mendengar keluhan-keluhan masyarakat.
- c. Kepala Desa bersama dengan masyarakat mencari jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

4. Pemimpin yang Tampil Sebagai Gung Binathara, Bau Dhenda Nyakrawati, Berbudi Bawa Leksana, Ambeg Adil Paramarta

Dalam pandangan Jawa, pemimpin yang baik adalah orang yang mempunyai banyak kelebihan. Salah satu kelebihan itu adalah dalam bidang ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat dibagi atas dua hal, yakni pertama ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari, nyata empiris. Kedua, ilmu yang bersifat batin, gaib dan non empiris. Ilmu batin dipelajari secara gaib, dan mengikutsertakan kekuatan lain yang bersumber dari alam.

Meskipun ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, dengan berbagai penemuan baru, namun pandangan transmigran Jawa tentang kepemimpinan yang ideal masih belum banyak bergeser. Maksudnya, meskipun keunggulan dalam ilmu pengetahuan yang empiris sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa, namun ilmu yang metaempiris juga dibutuhkan sebagai bukti kekuatan supranatural yang berhasil dihimpun oleh seorang Kepala Desa di dalam dirinya.

Besarnya pengaruh Kepala Desa dalam masyarakat adalah bukti besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Desa. Kekuasaan yang besar ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap lamanya masa jabatan yang bisa dipegang oleh seorang Kepala Desa. Hal ini didukung oleh kenyataan, yakni mayoritas warga berpendapat bahwa dengan pengaruh yang dimilikinya,

seseorang bisa menjabat sebagai Kepala Desa dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, sebagai pemimpin, Kepala Desa harus bertindak bijaksana dan selalu menepati janji, bersikap adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebagai pemimpin yang baik keputusan-keputusan Kepala Desa tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri atau segolongan kecil anggota masyarakat saja. Namun Kepala Desa harus rela berkorban untuk memperjuangkan nasib rakyat banyak. Kepala Desa dipilih untuk *memayu hayuningrat*, untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kemakmuran diri sendiri.

Ada dua kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa, yakni kekuatan batin yang tinggi dan kemampuan dalam manajemen pemerintahan desa. Dalam pandangan Jawa terdapat korelasi yang positif antara kekuatan batin pemimpin dengan besarnya pengaruhnya dalam masyarakat. Namun dalam konteks kepemimpinan Kepala Desa, tidak semua masyarakat transmigran Jawa mempunyai pandangan seperti di atas. Sebagian dapat menerima Kepala Desa yang mempunyai kekuatan batin yang tinggi (49,37%), sedangkan sebagiannya lagi menolak pendapat di atas. Dari kenyataan ini dapat dikemukakan bahwa bagi transmigran Jawa, kekuatan batin tidak lagi menjadi faktor penentu untuk memilih seorang Kepala Desa. Namun demikian, mereka juga tidak menolak apabila orang yang dipilih menjadi Kepala Desa memiliki kekuatan supranatural tersebut. Bahkan terdapat responden (24,05%) yang lebih menghormati Kepala Desa yang memiliki kekuatan batin. Transmigran Jawa juga berpendapat bahwa apabila seorang Kepala Desa memiliki kekuatan batin, maka kekuatannya itu menjadi nilai lebih dalam menjalankan kepemimpinannya.

Berkurangnya perhatian transmigran Jawa pada masalah-masalah yang

bersifat metaempiris, menyebabkan bertambahnya perhatian pada masalah-masalah yang lebih nyata. Masalah-masalah yang lebih nyata tersebut adalah kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa. Masyarakat transmigran Jawa menganggap bahwa kemampuan dalam menjalankan pemerintahan desa, lebih penting daripada kekuatan batin yang tinggi, yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa. Kemampuan tadi antara lain kemampuan dalam merencanakan berbagai program pekerjaan/kegiatan dan tugas pemerintahan desa, mengorganisir pekerjaan dan orang-orang yang terlibat di pekerjaan tersebut, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap semua pekerjaan serta tugas yang telah dilimpahkan.

Transmigran Jawa akan bersikap positif apabila seorang Kepala Desa menunjukkan kualitas pribadi yang baik. Sebaliknya, mereka juga akan bersikap negatif apabila seorang Kepala Desa tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan. Sebagai reaksi atas rendahnya kualitas Kepala Desa, maka masyarakat transmigran Jawa akan memperlihatkan sikap penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Desa tersebut, dalam bentuk ketidaksopanan dan ketidaktaatan kepada Kepala Desa. Sikap yang tidak sopan dapat ditunjukkan secara sembunyi-sembunyi (pura-pura sopan), dan juga bisa secara terang-terangan. Sikap pura-pura ini tidak hanya diperlihatkan dalam bentuk sopan santun yang semu, namun juga dalam bentuk ketaatan yang semuanya pura-pura. Sikap ini diambil karena sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, transmigran Jawa tidak ingin berkonfrontasi secara terbuka dengan Kepala Desa, yang tidak mereka senangi. Agar tidak terjadi konflik dan ketidakharmonisan masyarakat dapat dipertahankan, maka sikap pura-pura taat

terhadap perintah seorang Kepala Desa, adalah jalan yang dianggap paling baik.

5. Hubungan Antara Lama Bermukim di Luar Jawa dengan Persepsi Transmigran Jawa Tentang Kepemimpinan Ideal Kepala Desa

Ada atau tidaknya hubungan antara lama bermukim atau lama tinggal di luar Jawa, dengan persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan yang ideal seorang Kepala Desa, dapat diketahui dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 1

Tabel kerja hubungan antara lama bermukim di luar Jawa dengan persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan ideal seorang Kepala Desa

Lama bermukim	Nilai tengah x	Skor y	x ²	y ²	xy
3 - 9	6	715	36	511.225	4.290
10 - 16	13	2.836	169	8.042.896	36.868
17 - 23	20	3.997	400	15.976.009	79.940
24 - 30	27	8.155	729	66.504.025	220.185
31 - 37	34	1.790	1.156	3.204.100	60.860
38 - 44	41	243	1.681	59.049	9.963
Jumlah	141	17.836	4.171	94.297.304	412.106

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, terdapat hubungan yang positif, erat dan signifikan antara lama seorang transmigran berada di luar Jawa, dengan persepsinya tentang kepemimpinan yang ideal seorang Kepala Desa. Adanya hubungan yang positif antara kedua variable di atas memberi makna bahwa semakin lama seorang transmigran berada di luar Jawa, akan semakin baik persepsinya tentang kepemimpinan ideal seorang Kepala Desa, sebagaimana halnya kepemimpinan di masa lalu. Artinya, transmigran yang sudah lama bermukim di luar Jawa mempunyai penerimaan yang baik terhadap kepemimpinan Kepala Desa, yang membawakan sifat *asthabrata* dan sifat-sifat kebajikan lainnya. Sebaliknya, transmigran yang baru bermukim di luar Jawa justru

akan mempunyai penerimaan yang kurang baik terhadap sifat-sifat ini. Hal ini adalah suatu hal yang kontradiktif. Oleh karena seharusnya transmigran yang baru bermukim di luar Jawa, akan mempunyai persepsi yang baik dan mendukung kepemimpinan sebagaimana yang ditunjukkan oleh raja-raja tanah Jawa di masa lalu. Hal ini sangat dimungkinkan karena nilai-nilai kepemimpinan yang ideal lebih tersosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Jawa yang *njawani*. Di sini dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran pandangan, baik pada masyarakat transmigran yang sudah lama bermukim, maupun pada masyarakat yang belum lama menetap/bermukim di luar Jawa.

Apabila ditinjau lebih jauh lagi, adanya penerimaan yang lebih baik dari masyarakat transmigran yang sudah lama bermukim di luar Jawa terhadap nilai-nilai kepemimpinan Jawa ini terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal. Ada tanggungjawab moral yang harus dipikul oleh transmigran yang sudah lama bermukim di luar Jawa, untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai sosial budaya masa lalu di antara tradisi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dimana mereka bertempat tinggal. Semakin lama mereka tinggal dan bergaul dengan suku bangsa lain, semakin muncul sifat egosentris mereka. Dapat dikatakan bahwa kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya sendiri, menjadi faktor utama, kenapa mereka menerima baik sifat-sifat kepemimpinan Jawa di masa lalu. Di lain pihak, transmigran yang baru menetap di luar Jawa, masih harus melakukan penyesuaian, masih dalam rangka membandingkan nilai-nilai kepemimpinan yang mereka yakini, dengan nilai-nilai kepemimpinan yang terdapat di tempat atau daerah dimana mereka bermukim atau bertempat tinggal.

Kesimpulan di atas diambil dengan melihat kenyataan bahwa hubungan

antara variabel lama bermukim dengan persepsi tentang kepemimpinan yang ideal seorang Kepala Desa, menunjukkan nilai korelasi yang cukup besar yakni 0,639. Angka ini bukan hanya menunjukkan adanya hubungan yang erat, namun juga signifikan antara kedua variabel tersebut. Adanya hubungan yang signifikan ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara lama bermukim dengan persepsi transmigran Jawa, bukanlah suatu kebetulan namun dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya dengan taraf kepercayaan 95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2

Persepsi transmigran Jawa tentang kepemimpinan ideal Kepala Desa berdasarkan lama bermukim di luar Jawa.

Lama bermukim di luar Jawa	Frekuensi	Persepsi transmigran Jawa (%) Baik Sangat baik
3 - 9	3	33,33 66,67
10 - 16	13	84,62 15,38
17 - 23	18	77,78 22,22
24 - 30	36	58,35 41,65
31 - 37	8	50 50
38 - 44	1	- 100

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transmigran Jawa mempunyai persepsi yang baik, apabila Kepala Desa mempunyai sifat-sifat kepemimpinan seperti yang ditunjukkan oleh raja-raja Jawa di masa lalu. Seorang Kepala Desa harus memiliki sifat-sifat seperti dalam ajaran raja yang bijaksana, yakni *Dasa Paramita*, sifat *Asthabrata*, sifat merakyat dan sosok pemimpin yang *Gung binathara*, *bau dhenda nyakrawati*, *berbudi bawa leksana*, *ambeg adil paramarta*. Terdapat hubungan yang positif, erat dan signifikan antara variabel lama bermukim di luar Jawa, dengan persepsi transmigran Jawa tentang

kepemimpinan ideal Kepala Desa. Ini berarti, bahwa semakin lama seorang transmigran bermukim di luar Jawa, semakin baik penerimaannya terhadap nilai-nilai kepemimpinan Jawa. Namun ada satu hal yang perlu diberikan catatan, bahwa meskipun masyarakat transmigran Jawa mempunyai persepsi yang baik tentang kepemimpinan ideal seorang Kepala Desa, sifat-sifat kebajikan itu hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar masyarakat transmigran Jawa tetap mempertahankan nilai-nilai kepemimpinan yang telah mereka miliki, sebagai kontrol sosial terhadap kepemimpinan seorang Kepala Desa di mana mereka tinggal. Namun harus diingat bahwa penerapan nilai-nilai tersebut, harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tempat mereka tinggal. Nilai-nilai kepemimpinan ideal tersebut harus diwariskan pada generasi muda Jawa, baik yang sudah bertransmigrasi maupun yang masih tetap tinggal di Jawa. Hal ini perlu dilakukan agar nilai-nilai tersebut tidak tersingkir oleh nilai-nilai kepemimpinan yang diadopsi dari negara-negara lain, khususnya dari negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin. 1991.
Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka UtamaGrafiti.
- Apter, David E. 1985.
Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES.
- Hadi, Sutrisno. 1986.
Statistik. Jilid 2. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Indonesia. Depdikbud. 1983.
Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Koentjaraningrat. 1984.
Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soejono. 1987.
Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1991.
"Dimensi-dimensi Vertikal dan Horizontal Dalam Integrasi Politik." *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor VIII: 40-43. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyanti, Ninik. 1986.
Masalah Penduduk Kini dan Mendatang. Jakarta: Pradnya Paramita.

ARSITEKTUR RUMAH TRADISIONAL KAMPUNG NAGA

Oleh Nandang Rusnandar

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: bpsntbandung@ymail.com

Abstrak

Rumah tradisional Kampung Naga, mencirikan rumah yang berarsitektur tradisional, baik dilihat dari bentuk atap, pembagian ruangan dalam rumah, jenis bahan-bahan pembuatan dan tata cara untuk membangun rumah tersebut. Berbicara mengenai arsitektur tradisional yang secara spesifik tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat, maka dalam perkembangannya, arsitektur sebagai sebuah karya manusia pun tak lepas dari pengaruh budaya luar, sehingga banyak karya arsitektur yang keluar dari unsur kedaerahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, arsitektur tradisional Jawa Barat, khususnya arsitektur rumah di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya perlu dilestarikan keberadaannya, hal tersebut dikarenakan dasarnya sentuh budaya yang dinamis yang akan mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan dari masa ke masa.

Ada perbedaan istilah antara imah atau bumi dengan patambon, yaitu berdasarkan kepada dihuni atau tidaknya bagi rumah tersebut, maka istilah imah itu pun dapat berubah, walaupun bentuk dan pembagian bagian-bagian imah tersebut sama.

Kata Kunci: Arsitektur tradisional, rumah adat.

Abstract

Traditional house of Kampong Naga identifies house with traditional architecture. It can be recognized from the roof form, the house column division, the type of the building materials, and the house building producer. The traditional architecture itself is specifically related to the local cultural values. During period, architecture –as a masterpiece- is also experiencing outside cultural influence causing many elements of architecture become no longer relevant with its localism element. As above mentioned, the traditional architecture of West Java, especially house architecture in Kampong Naga, Tasikmalaya Regency, requires preservation due to its existence for its dynamic cultural contact that will influence the building forms from time to time.

There is a difference between the term of imah or bumi and patambon (those terms refer to same concept of 'house'), in that the house is to be dwelt or not. In other cases, the term of imah is changeable even also, although the form and the division of 'the house' is the same.

Keywords : traditional architecture, traditional house.

A. Pendahuluan

Arsitektur Sunda merupakan pencerminan manusia yang bersahabat dengan alamnya, yang dituangkan dalam bentuk bangunan. Henry F. Maclaine

Pont (1919) dalam *Javaansche Architectuur*¹ memaparkan bahwa untuk

¹ Maclaine Pont, Henry F. *Javaansche Architectuur*, Dalam: Djawa – Tijdschrift van het

menemukan arsitektur baru harus berdasarkan *Vernacular Traditional architecture* yang berbasis *Native Rule*. Sedangkan Heinz Frick (1997)² menegaskan bahwa bentuk-bentuk arsitektur mengambil makna dari “rahasia, tanda, dan simbol berikut ritual masyarakat pendukungnya”. Arsitektur tradisional merupakan suatu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu suku bangsa, oleh karena itu arsitektur tradisional merupakan salah satu identitas dari suatu pendukung kebudayaan. Dalam arsitektur tradisional terkandung secara terpadu wujud ideal, wujud sosial, dan wujud material suatu kebudayaan (Muanas, 1992 : 1). Lebih jauh dikatakan bahwa arsitektur tradisional adalah suatu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dinamika suatu bangsa. Oleh karena itu, arsitektur tradisional merupakan salah satu identitas sekaligus pendorong kemajuan kebudayaan. Karakter dan klasifikasi suatu bentuk bangunan mencirikan suatu cipta, karsa, dan karya sesuai dengan umur peradabannya. Rumah-rumah berarsitektur tradisional ini dapat mencerminkan analogis perjalanan sejarah dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti perjalanan budaya, komunitas etnis, dan nafas jaman -- di mana desain rumah itu adalah cermin pada jamannya. Dalam kenyataan seperti itu rumah tradisional dapat dijadikan alat penelusuran berbagai aspek disiplin ilmu pengetahuan, di antaranya, sejarah (tahun, periode), bentuk rumah (gaya, desain), bahan-bahan yang dipergunakan,

bentuk kampung detail rumah: bentuk atap, bentuk pintu, jendela, bentuk golodog, bentuk dinding, bentuk tatapakan, bentuk pekarangan, detail rangka rumah, dll (Rusnandar, 2003: 2)

Dari segi arsitektural, rumah-rumah tradisional itu menunjukkan usaha adaptasi dengan lingkungannya, sehingga letak, arah, dan bentuk sangat serasi, dengan mempertahankan tata aturan dan adat-istiadat warisan budaya nenek moyang, khususnya di dalam bentuk-bentuk rumah. Bentuk-bentuk rumah dengan *suhunan julang ngapak* masih dipertahankan oleh sekelompok masyarakat Sunda yang masih cukup kuat memegang tradisi nenek moyangnya. Kemiripan rumah-rumah tradisional itu pun di samping bentuk-bentuknya, dapat pula dilihat dari pola perkampungan, yang hampir mirip dengan kampung-kampung adat yang tersebar di wilayah budaya Sunda.

B. Hasil dan Bahasan

Arsitektur Rumah Tradisional Kampung Naga

Rumah tradisional Kampung Naga, mencirikan bahwa rumah yang ada di kampung itu adalah rumah yang berarsitektur tradisional, baik dilihat dari bentuk atap, pembagian ruangan dalam rumah, jenis bahan-bahan pembuatan dan tata cara untuk membangun rumah tersebut. Kampung Naga berpenduduk sekitar 383 jiwa yang menghuni rumah sebanyak 98 buah³, Mereka beragama Islam, di samping menjalankan tradisi atau adat-istiadat yang secara turun temurun dari nenek moyangnya. Karena areal Kampung Naga terbatas, sehingga tidak memungkinkan lagi mereka membangun rumah baru. Untuk itu, bagi

Java –Instituut. Weltevreden 4/1924. hlm. 112-127.

² Heinz Frick, dalam bukunya “Pola Struktur dan Teknik Bangunan di Indonesia, 1997. hlm. 71

³ Data Monografi Desa 1991/1992 Desa Salawu Kabupaten Tasikmalaya

mereka yang berasal dari keturunan Kampung Naga tapi membangun rumah di luar Kampung Naga disebut warga *Sa-Naga*.

Selain bentuk, arah dan letak rumah disesuaikan dengan keadaan lingkungan, maka pola perkampungan disesuaikan dengan keadaan tanah yang ada, yang dibatasi dengan pagar yang disebut Kandang Jaga. Tanah di Kampung Naga tidak sama tingginya (tidak datar atau rata) sehingga akan terlihat rumah-rumah itu bersusun bertingkat-tingkat dari bagian tanah yang paling tinggi sampai bagian tanah yang paling rendah. Deretan rumah dibatasi oleh *sengked* yaitu batu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menahan longsor dan menambah keindahan pola perkampungan.

Sekeliling kampung dipagari dengan pagar bambu yang disebut Kandang Jaga sehingga batas kampung jelas terlihat. Seluruh rumah dan bangunan di dalam Kampung Naga atapnya *julang ngapak*, pintu untuk memasuki kampung terletak di sebelah timur menghadap Sungai Ciwulan. Sungai ini menjadi pusat kegiatan MCK penduduk, bagi orang yang enggan ke sungai di tengah kampung ada beberapa *pancuran*. Di tengah Kampung ada sebuah mesjid, sejajar dengan mesjid ada bangunan yang disebut *Bale Patemon* dan dibagian tanah yang lebih tinggi ada bangunan yang disebut *Bumi Ageung*, selain itu ada pula yang disebut *leuit* atau lumbung padi yang terletak di selatan rumah-rumah penduduk.

Secara umum rumah Kampung Naga memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya:

- a) Jenis Rumah merupakan rumah panggung dengan ketinggian kolong antara 45 sampai dengan 60 cm dari tanah, dengan letak yang teratur. Rumah tersebut berbentuk segi empat

panjang; lantai terbuat dari *palupuh*; dinding terbuat dari bilik bambu dengan berbagai bentuk anyaman. Rumah tambahan disebut *sosompang*. Bagian bawah tiang penahan rumah yang merupakan fondasi '*tatapakan*' yang dibuat dari batu andesit dengan permukaan yang lempar 'rata'.

- b) Bentuk Atap yang umum disebut *Suhunan Julang Ngapak* yaitu suhunan panjang yang kedua sisinya kiri dan kanan ditambah sehingga menyerupai rentang sayap *Manuk Julang* 'Burung Julang'. Di ujung atap terdapat *capit hurang* atau *cagak gunting* 'bilah bambu yang ada di ujung wuwungan berupa huruf V atau O'.
- c) Memiliki ciri anyaman bilik yang unik, bentuk dinding rumah tradisional berdinding bilik dengan anyaman *sasag* dan *kepeng* dan anyaman *Kandang Jaga*.
- d) Sistem penempatan ruang (interior) yang unik dengan fungsi yang sesuai dengan latar belakang budaya dan tradisinya. Bagian depan rumah disebut *tepas*, pada bagian tepas terdapat *golodog* yaitu berfungsi untuk naik ke dalam rumah dan tempat mencuci kaki sebelum masuk. *Tengah Imah*, tempat berkumpulnya anggota keluarga; *Enggon* atau kamar untuk tidur; bagian belakang rumah ada dapur dan *Goah*, dapur tempat untuk memasak dan bercengkrama anggota keluarga; *Goah* ruang untuk menyimpan beras.
- e) Letak dan arah rumah, khususnya letak pintu rumah harus berada di sebelah selatan atau utara artinya rumah harus menghadap ke arah utara atau ke arah selatan saling menghadap antarrumah.
- f) Pemilihan bahan bangunan tidak sembarangan, memiliki tatacara

pembuatan yang sesuai dengan adat dan tradisi mereka (dimulai dengan ritual dan diakhiri dengan ritual)

Keunikan Kampung Naga, di samping sebagai kampung adat karena memiliki ciri-ciri fisik tertentu, seperti bentuk rumah yang sama, memiliki adat istiadat yang dipelihara dengan baik dan diturunkan dari generasi ke generasi, memiliki sistem pertabuan yang kuat dalam memelihara kelangsungan hidupnya, dan sebagainya. Dari segi arsitektural, rumah-rumah di Kampung Naga menunjukkan proses adaptasi manusia yang disesuaikan dengan alam lingkungannya, sehingga tata letak dan bentuk rumah sangat artistik disesuaikan dengan kontur tanah yang ada. Akal dan budi manusia dapat bertahan hidup di mana saja, di tempat yang diinginkan dan menyebar ke seluruh permukaan bumi ini. Dengan menggunakan lambang-lambang yang diberi makna, manusia dapat menyampaikan pemikiran maupun pengetahuan dengan sesamanya dan dapat pula menangkap umpan balik dari lingkungannya dalam proses penyesuaian diri secara aktif.⁴

Kampung Naga adalah nama sebuah komplek pemukiman masyarakat adat di daerah Tasikmalaya. Kampung Naga seolah tak tersentuh oleh peradaban modern. Hal itu terlihat dari perjalanan sejarahnya dari tahun 1921 yang merupakan awal kampung, namun saat ini sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dalam administrasi Pemerintahan, Kampung Naga termasuk dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya berada di Kecamatan Salawu, Desa Neglasari. Jarak kampung ini dengan Kecamatan

Salawu sekitar 5 kilometer dan dengan Desa Neglasari 800 meter. Lokasinya berada di tepi jalan raya yang menghubungkan daerah Garut dengan Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya posisinya sekitar 30 kilometer ke arah timur dan kota Garut sekitar 26 kilometer ke arah barat. Jarak wilayah ini dengan ibu kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) sekitar 106 kilometer. Transportasi pulang pergi dari Bandung ke Kampung Naga dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum bus mini jurusan Bandung - Garut - Singaparna. Bila menggunakan bus, waktu tempuh dari Bandung ke Kampung Naga memakan waktu sekitar 3 jam.

Memasuki kawasan Kampung Naga, kita harus melewati satu-satunya jalan yang berupa anak tangga; setiap orang yang menghitung jumlah anak tangga ini tidak selalu sama, Suganda (2006) menyatakan bahwa Kampung Naga merupakan kampung di bawah 335 anak tangga, kondisi anak tangga berkelok-kelok dan curam. Setelah anak tangga terakhir, kita menapaki jalan tanah yang lebarnya cukup untuk tiga orang berjalan bersisian. Jalan ini merupakan tanggul Sungai Ciwulan yang membatasi antara kawasan Kampung Naga dengan kawasan Bukit Biul sebagai bukit atau *leuweung tutupan*. Kampung Naga merupakan sebuah cekungan yang berada di lembah yang berketinggian rata-rata 500 m di atas permukaan laut, bila dilihat dari atas bukit, maka Kampung Naga ini menyerupai mangkuk besar yang terpotong.

Perjalanan yang ditempuh dari jalan raya hingga perkampungan ini menempuh waktu sekitar 30 menit. Begitu memasuki kampung akan terasa nyaman, karena suhu udara berkisar antara 21,5⁰ sampai dengan 23⁰ derajat celcius. Kelembaban udaranya berkisar sekitar 75 persen sampai 85 persen dan

⁴ Laporan Final Perencanaan Pengembangan Kawasan Andalan Hutan Raya Djuanda di Kabupaten Bandung. 1999-2000 : hlm. 11.

curah hujan pertahun rata-rata 289 milimeter. Oleh karena itu, suhu di Kampung Naga dapat dikatakan sangat sejuk, baik pada siang maupun malam hari, dan sangat dingin pada waktu menjelang pagi.

Secara topografi, letak Kampung Naga berada di kaki sebuah lembah, di mana permukaan tanah di sebelah barat lebih tinggi daripada permukaan tanah di sebelah timur. Kondisi seperti ini bagi masyarakat Kampung Naga merupakan tanah yang baik sesuai dengan apa yang dipercayai dalam sistem kepercayaannya, tanah seperti ini disebut sebagai “*taneuh bahe ngetan*” artinya baik untuk permukiman dan pertanian. Kondisi ini secara rasional pun dapat dipercaya bahwa dengan kemiringan ke arah timur ‘*bahe ngetan*’ menunjukkan bahwa sinar matahari akan lebih banyak diterima dan penghuni kampung ini akan lebih sehat karena pengaruh sinar ultra violet di waktu pagi hari.

Dengan melihat pola perkampungan yang ada di dalam Kampung Naga, maka ada tiga kawasan atau area yang dijadikan sistem pola pemukiman bagi masyarakat Kampung Naga, ketiga kawasan itu merupakan sistem ekologis yang seimbang antara lahan terpakai dengan lahan kosong yang dijadikan lahan resapan. Pola ini merupakan pola perkampungan khas masyarakat Sunda pada umumnya. Keseimbangan pola kawasan ini dipedomani dalam kehidupan dalam keseharian masyarakat pendukungnya, misalnya, rumah sebagai tempat tinggal, sumber air yang tersedia dipergunakan dengan baik dan bijak dalam mengelola lingkungannya, begitu pula dengan hutan yang ada di sekelilingnya. Ketiga kawasan yang saling mendukung dalam keseimbangan dan tidak terlepas dari pola ekologis tradisional itu adalah (a) *Kawasan Suci*, yaitu lahan yang tidak boleh dikunjungi oleh

sembarang orang. Kawasan ini merupakan kawasan yang selalu disucikan kondisinya dari pengaruh luar. Kawasan suci merupakan *leuweung larangan* (hutan terlarang) bagi orang luar. Selain *leuweung larangan* ini terdapat di Kampung Naga terdapat pula *leuweung tutupan*, yaitu hutan yang sangat dikeramatkan dan sudah ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman yang mungkin sudah ratusan tahun umurnya. Beda antara *leuweung tutupan* (*leuweung Biuk*) dengan *leuweung larangan* adalah fungsi dan nilai kekeramatannya yang berbeda. *Leuweung larangan*, boleh dimasuki oleh penduduk setempat dan masih diperbolehkan mengambil beberapa bagian dari tanaman yang ada di sekitar ini. Di dekat *leuweung larangan* ini terdapat pekuburan penduduk masyarakat Naga, sedangkan *leuweung tutupan* (*leuweung Biuk*) ini merupakan *leuweung* yang dikeramatkan dan tidak boleh sama sekali untuk memasukinya. (b) *Kawasan Bersih*, merupakan area yang dijadikan pemukiman penduduk, *leuit*, masjid, dan *bale patemon*. Area bersih ini dipertegas dengan batas yang sangat jelas, batas ini membedakan batas-batas antara kawasan suci, kawasan bersih dan kawasan kotor. Pembatas kawasan bersih yang mengelilingi seluruh kampung itu disebut Kandang Jaga. Kandang Jaga ini dalam pengertian tersurat dan tersirat, juga memberikan aksent tersendiri bagi kawasan suci yang terletak di dalam kawasan bersih yaitu pembatas antara rumah penduduk dengan Bumi Ageung yang dianggap suci dan sakral untuk dimasukinya. Segala sesuatu yang berada dalam kandang jaga dianggap bersih dan suci, sebaliknya segala sesuatu yang berada di luar kandang jaga dianggap kotor. Dengan demikian, seluruh daerah yang dianggap suci dan bersih harus dijaga oleh seluruh masyarakatnya. (c)

Kawasan Kotor, yaitu kawasan yang berada di pinggir Sungai Ciwulan, kawasan ini dibatasi oleh kandang jaga antara kawasan bersih (rumah penduduk) dengan kawasan kotor (kolam kandang hewan, *pancilingan* (jamban) dan *saung lisung*. Disebut sebagai kawasan kotor adalah kawasan yang dipergunakan oleh semua penduduk untuk mandi, cuci, kakus, serta keperluan hidup sehari-hari. Penduduk tidak diperkenankan untuk melakukan buang sampah, buang hajat di dalam kompleks perumahan. Kawasan “kering” atau perumahan harus dijaga dari segala sesuatu yang menyebabkan kotor, sehingga kawasan bersih dan suci tetap bersih dan suci, sedangkan kawasan kotor seperti daerah yang berkaitan dengan air ‘kolam’ dan sungai atau kawasan “basah” tetap berada di luar kandang jaga.

Pada saat penelitian ini dilakukan, jumlah penduduk Kampung Naga sebanyak 311 jiwa, yang terdiri atas: penduduk laki-laki sebanyak 175 jiwa, dan perempuan 136 jiwa. Adapun jumlah Kepala Keluarga sebanyak 108 kk. Dilihat dari komposisi usia penduduk Kampung Naga banyak yang telah berusia lanjut. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak generasi muda Penduduk Kampung Naga, terutama generasi tahun 70-an, yang pergi merantau keluar kampung untuk mencari nafkah karena lahan untuk bercocok tanam di kampung keadaannya terbatas. Mereka yang bekerja di luar tidak hanya kaum laki-laki, tetapi ada pula kaum perempuan. Setelah sekian lama bekerja di luar, mereka kembali ke kampung halamannya, Kampung Naga, untuk melangsungkan pernikahan dengan pilihan hatinya yang sekampung atau dari daerah lain. Setelah menikah, ada yang tinggal dengan orang tua untuk sementara, ada pula yang mempunyai rumah sendiri di luar Kampung Naga.

Imah Tempat Tinggal

“*Nyumput buni di nu caang*” Bersembunyi di tempat yang terang. Ungkapan yang dilontarkan penduduk Kampung Naga ini menunjukkan makna bahwa kampung ini berada di tempat yang tertutup dari kondisi alam, akan tetapi terbuka secara budaya. Rumah di Kampung Naga dikenal dengan istilah *imah* atau *bumi*. Imah, mempunyai bentuk empat persegi panjang. Ada perbedaan istilah antara *imah* atau *bumi* dengan *patambon*, yaitu berdasarkan kepada dihuni atau tidaknya bagi rumah tersebut, maka istilah *imah* itu pun dapat berubah, walaupun bentuk dan pembagian bagian-bagian *imah* tersebut sama. *Patambon* adalah sebuah rumah yang tadinya *imah*, namun ketika si empunya rumah pindah ke tempat lain dan *imah* tersebut kemudian menjadi kosong tak berpenghuni. Ketika rumah itu kosong ditinggalkan penghuni, maka istilah penyebutan terhadap rumah tersebut menjadi *patambon*. *Patambon*, ketika diisi kembali oleh penghuni, istilahnya pun kembali menjadi *imah* atau *bumi*. Penghuninyalah yang dapat menentukan apakah rumah itu menjadi *patambon* atau *imah*. *Bumi Ageung* adalah *patambon*, walaupun kosong tapi ada *patunggon* (penunggunya) maka kemudian disebut *bumi*, walaupun bukan pemiliknya.

Dilihat dari jenis rumah, masyarakat Kampung Naga membagi *imah* menjadi dua macam, yaitu *bumi panto hiji* atau *bumi teu acan direhab* dan *bumi nu tos direhab* atau *bumi panto dua*. *Bumi Panto Hiji* adalah bentuk rumah yang paling tua, di dalamnya terdiri atas ruang-ruang sebagai berikut; dapur, *goah*, dan kamar tidur. Ruang *goah* dapat dikatakan sebagai ruang utama dalam sebuah rumah. *Goah* sama artinya dengan *pabeasaan* yaitu tempat

menyimpan beras sebagai bahan makanan. Penempatan ruang – ruang tersebut antara dapur, *parako* atau tungku dan *goah* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ditempatkan di depan, dibanding dengan kamar tidur yang berada di belakang *goah* atau dapur. *Bumi panto* dua atau *bumi nu tos direhab*, merupakan rumah yang telah direnovasi secara total, di mana pembangunannya mengikuti perkembangan jaman, seperti penambahan pintu jadi dua, memiliki jendela, lantai tengah rumah tidak lagi mempergunakan *palupuh*, lantai *palupuh* hanya dipergunakan di dapur saja, penambahan ruangan kamar tidur, bilik di bagian depan rumah diganti dengan bilahan papan, dan sebagainya.

Dinding *imah* terbuat dari *bilik* dengan ciri anyaman *kebang* dan *sasag*. Bilik ini ada yang ‘dikapur’ atau dilabur dengan kapur berwarna putih, bahkan ada pula yang dibiarkan dengan warna aslinya. Tinggi *kolong* umumnya seragam berkisar antara 50 sampai dengan 60 cm. *Kolong* ini dapat berfungsi sebagai pengatur udara dan dapat dipergunakan kandang ternak ayam atau itik. Di samping itu dipergunakan pula sebagai tempat penyimpanan barang-barang pertanian ataupun kayu sebagai bahan bangunan dan kayu bakar.

Rangka *imah* pada umumnya terbuat dari kayu yang didapatkan dari kebun di luar hutan larangan. Teknologi yang dipergunakan dalam membuat struktur kayu ini sangat sederhana, yaitu hubungan antara batang kayu yang satu dengan yang lainnya mempergunakan paku dan *paseuk* yang terbuat dari bambu atau kayu itu sendiri. Kini untuk memperkuat hubungan kayu tersebut telah dipergunakan plat besi. Menurut cerita seorang *dulah* ‘ahli pembuat bangunan’, dahulu untuk memperkuat

hubungan kayu ini mempergunakan tali rotan atau tali dari bambu.

Tiang-tiang *imah* ditempatkan di atas batu yang *lempar* atau *demprak* ‘rata’ yang disebut *tatapakan* (Bahasa Sunda: *batu pulukan nu demprak atawa nu lempar*). *Tatapakan* ini ada yang dibuat khusus yaitu dari batu yang dibuat persegi empat yang disebut *batu papras* atau *batu jangkung*, untuk mendapatkannya dengan cara memesan atau membeli dari luar kampung dengan ukuran yang sama, yaitu tinggi 40 cm dan lebar bawah 25 x 25 cm dan lebar atas 20 x 20 cm. Ada pula *tatapakan* yang hanya dari batu biasa besarnya kira-kira berdiameter 30 cm, batu ini diambil dari bongkahan batu yang terhampar di Sungai Ciwulan.

Bentuk dan tata ruang *imah urang* Kampung Naga dapat dibedakan dalam beberapa jenis, pertama *imah* yang disebut *patambon* yaitu *imah kosong* seperti bentuk *Bumi Ageung*, -- bentuk *imah* seperti ini menurut *kuncen* sudah tidak dibangun lagi, hal tersebut karena perubahan yang terjadi karena keinginan untuk menambah ruangan-ruangan yang ada di dalamnya -- dan bentuk rumah yang disebut *Katarajuan* ‘pemilik rumahnya tinggal di daerah Taraju’. Juga ada dua gaya bentuk rumah yang berbeda yaitu bentuk *imah soko* dan *imah gagalur*, kedua perbedaan ini terlihat sangat mendasar, yaitu *imah soko* adalah *imah* yang tiang rumahnya langsung mengenai *tatapakan batu lempar*, sedangkan *imah gagalur* adalah rumah yang tiangnya tidak langsung mengenai *tatapakan*, melainkan hanya gagalur yang mengenai *tatapakan* yang terbuat dari batu papras.

Satu-satunya rumah tua yang kebetulan masih terdokumentasikan oleh penulis adalah rumah Ibu Omah, dua minggu kemudian rumah tersebut dibongkar dan direhab menjadi rumah

baru dengan bentuk yang sama seperti imah patambon. Denah rumah Ibu Omah ini memiliki ciri-ciri rumah tua, yaitu berpintu satu, tanpa jendela kaca, kolong rumah lebih pendek yaitu sekitar 40 cm dari permukaan tanah dan mempergunakan *tatapakan batu lempar*, ruang-ruang di dalam rumah terdiri atas, satu kamar tidur yang disebut *geusan* atau *pangkeng*, goah, dapur dan tengah imah. Dinding depan dan pintu masuk terbuat dari bilik dengan anyaman sasag, angin-angin di bagian atas *ampig* dan di dapur yaitu di atas *parako* ada lubang angin pada *lalangit*. Disebutkan oleh Bapak Maun sebagai *dulah kepala*, bahwa rumah Ibu Omah ini adalah rumah *bumi panto hiji*. Setelah direhab akan menjadi rumah berpintu dua, yaitu pintu masuk ke tepas dan pintu masuk ke dapur.

Perkembangan arsitektur *imah* di Kampung Naga dimulai pada tahun 80-an yang dipelopori oleh *Kuncen* Arbasan, setelah rumah lama dibongkar mereka membangun kembali rumah 'ngarehab' di atas *lelemah* lama. Kini imah yang ada di Kampung Naga mulai mempergunakan jendela kaca dan bilik dari papan, begitu pula dengan lantai yang tadinya dominan *palupuh*, dewasa ini hanya bagian dapur saja yang mempergunakan lantai *palupuh*, sedangkan ruang-ruang di dalam rumah sudah mempergunakan lantai dari bilahan papan yang diserut rapih. Perubahan ini tidak melanggar *pamali* dan ketentuan adat, seperti tidak merubah tempat dapur dengan elemennya seperti *goah*, *parako*, *palupuh*. Begitu pula dengan penempatan dapur di depan, kamar tidur di belakang, dinding *sasag*, atap *julang ngapak*, *tihang lima katimang*, lubang angin-angin, dan golodog dari bambu, bahkan rumah tanpa dilabur kapur menjadi putih. **Atap**, *Julang Ngapak* merupakan bentuk atap yang menjadi ciri khas atap seluruh rumah di Kampung Naga. Bentuk seperti

ini dapat dicirikan dengan ciri-ciri sebagai berikut, bentuk suhunan atau atap di salah satu sisinya lebih panjang, sebelah kiri atau sebelah kanan diperpanjang sehingga merupakan rentangan sayap burung atau manuk *Julang*. Kata *ngapak* berasal dari Bahasa Sunda yang artinya merentangkan, jadi *Julang Ngapak* artinya Burung Julang yang merentangkan sayapnya. *Suhunan Julang Ngapak* ini merupakan perkembangan dari bentuk *suhunan* panjang, dengan sentuhan modifikasi dalam proses adaptasi dengan alam sekitar yaitu adanya penambahan atap yaitu lebih panjang di salah satu sisinya. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga agar udara lebih hangat di sekitar rumah atau di dalam rumah. Mengapa demikian? Karena Kampung Naga berada di sebuah lembah yang berhawa lembab dan dingin, maka *karuhun* atau nenek moyang telah beradaptasi dengan alam sekitar untuk menjaga diri dan keluarganya dari hawa dingin.

Bahan atap yang dipergunakan oleh *Urang* Kampung Naga terdiri dari dua macam, yaitu terbuat dari ijuk dan *eurih* (alang-alang) atau *daun tepus* (latin: Zingiberaceae). Untuk penerangan di dalam rumah dan agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah, atap rumah dilubangi dan diganti dengan kaca yang transparan berukuran kira-kira 35 x 35 cm.

Rumah di setiap perkampungan adat di Jawa Barat, memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pada setiap bagian depan dan belakang *wuwung* (ujung atap) *bubungan* selalu ditambahkan *pamantes* di atas atapnya, yaitu adanya penambahan usuk yang terbuat dari bilah bambu atau kayu sepanjang 50 cm. Bilah bambu ini dibentuk menyerupai huruf "V" yang disebut *gapit*, *cagak gunting* atau *capit hurang* (Kusnaka, 1981: 17) Ada pula *pamantes* itu ini ada pula yang

berbentuk bulat, huruf “V” divariasikan dengan balutan ijuk agar tidak masuk air hujan, hingga menyatu dari ujung ke ujung yang membentuk huruf “O” yang disebut *geulang* (gelang). Bentuk *gapit*, *cagak gunting*, *capit hurang*, ataupun *geugeulang*. semuanya memiliki makna simbolis. Huruf “V” (*Cagak gunting* dan *capit hurang*) memiliki makna memasuki *dunia atas* yang suci, sementara manusia berada di *dunia tengah*. Huruf “^” atau V terbalik merupakan *dunia tengah* yaitu rumah secara keseluruhan yang dihuni oleh manusia, sedangkan *dunia bawah* berada di dalam tanah yang dihuni oleh makhluk lainnya. Kebiasaan memakai *gapit*, *cagak gunting*, atau *capit hurang* ini sesuai dengan kepercayaan megalitichum yang disesuaikan dengan peredaran matahari dari arah timur ke barat dan sesuai pula dengan arah memanjangnya arah rumah timur barat (Kusnaka, 1981:17) Suganda menyatakan bahwa, pemaknaan huruf “O” atau *geulang* merupakan simbol ikatan kesatuan dalam kepercayaan mereka terhadap alam semesta dengan segenap isinya, di mana matahari bergerak dari timur ke barat. Oleh karena itu, rumah masyarakat Kampung Naga tidak boleh menghadap ke arah timur karena dianggap melanggar kodrat alam (2006: 46).

Secara kosmologis, konsep *imah/ bumi/Bumi Ageung* memiliki arti yang sama, yaitu rumah, dalam pemaknaannya yang menunjuk kepada arti ‘dunia’ atau alam semesta. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda (Dalam kosmologis Sunda) umumnya dan Kampung Naga khususnya, dikenal konsep pembagian dunia menjadi tiga bagian, yaitu *dunya handap* (dunia bawah), *dunya tengah* (dunia tengah) dan *dunya luhur* (dunia atas). Kenyataan ini dapat dilihat dari tata ruang dalam rumah, yaitu ruang depan, ruang tengah dan ruang belakang. Ruang

tengah merupakan tempat kegiatan semua keluarga karena ruang ini disebut pula daerah netral. Dunia tengah merupakan pusat alam semesta dan manusia menempatkan dirinya di pusat alam semesta. Huruf ^ atau V terbalik, secara fisik adalah rumah (bumi / imah), namun dalam kosmologisnya adalah simbolisasi dunia tengah yang ditempati manusia, penghubungnya antara dunia tengah dan dunia atas adalah dunia hampa yang disebut *para* (ruang di atas plafon dan *hateup*).

Lantai, konstruksi lantai di Kampung Naga terdiri atas rangkaian balok induk dari kayu Albasia. Ada beberapa macam nama balok yang menjadi konstruksi lantai di antaranya adalah *gagalur*, yaitu balok yang menyangga rangka dinding. *Pananggeuy* adalah balok penyangga konstruksi lantai. *Darurung* yaitu balok kecil yang terbuat dari bambu berukuran 8cm (rumah kecil biasanya tidak memiliki darurung), tetapi langsung dipasang *sarang* bambu berukuran 4cm dengan jarak 30 x 40 cm. Di atas *sarang* ada balok melintang yang disebut *bahas* terbuat dari bilah bambu berukuran 3 cm dipasang dengan jarak kira-kira 15-20 cm. *Garumpay* adalah bambu berukuran 2 cm dipasang di atas *bahas* dengan cara berjajar berjarak lima sentimeter, lalu di atasnya baru dipasang *palupuh* sebagai lantai dan berada paling atas. *Palupuh* terbuat dari *awi surat* (bambu surat) cara pembuatan *palupuh* itu yakni, *awi* yang berdiameter 20 cm, satu sisinya dibelah memanjang untuk memudahkan *awi* untuk dibuka, kemudian bagian dalamnya yaitu bagian-bagian *buku* (penutup ruas) dipapas dan bagian dalam batang bambu dibelah-belah, batang bambu yang tadinya bulat setelah dibelah-belah menjadi lembaran bambu selebar 40 cm. lembaran bambu inilah yang dinamakan *palupuh*, yang panjangnya disesuaikan dengan ukuran yang diperlukan.

Dinding, yang dipasang untuk rumah di Kampung Naga ada dua jenis, pertama dinding yang terbuat dari bilahan papan dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut bilik. Bilik memiliki beberapa jenis sesuai dengan bentuk anyamannya, yaitu anyaman kasar dan anyaman halus. Anyaman kasar disebut bilik *sasag kasar* atau bilik *abrag*, sedangkan anyaman halus disebut *sasag halus*, *sasag resik*, *sasag alit*, atau *sasag suakan*. Anyaman *sasag* kasar dipergunakan pada seluruh dinding di *Bumi Ageung*. Anyaman halus dipergunakan pada rumah-rumah lama, dinding dapur, dan pintu masuk ke dapur atau sekarang dipergunakan sebagai sekat yang terdapat di tengah imah.

Pintu dan jendela, daun pintu yang ada di Kampung Naga memiliki dua jenis, pertama daun pintu yang terbuat dari kayu sepenuhnya dan daun pintu yang dikombinasikan dengan anyaman *sasag*. Pintu dapur pada *bumi panto hiji*, dan *Bumi Ageung*, memiliki daun pintu yang dianyam dengan anyaman halus, anyaman ini mereka namakan dengan *sasag alit*, *anyaman resik*, atau *anyaman suakan*.

Daun pintu yang lain adalah daun pintu yang sepenuhnya terbuat dari kayu, biasanya daun pintu dipasang pada pintu masuk ke bagian tepas dan pintu di bagian tengah rumah. Pintu kamar, biasanya mereka hanya memasang *reregan* (tirai atau hordeng) sebagai penutupnya. *Reregan* ini biasanya mereka pakukan pasang pada kayu kusen di bagian luar.

Daun jendela yang dipergunakan kini semakin semarak dengan berbagai variasi yang berbeda-beda. Disebutkan bahwa rumah yang berjendela itu adalah rumah *patambon*, daun jendelanya terbuat dari papan kayu berukuran 40 x 60 cm, sedangkan untuk pengamannya adalah *sarigsig* 'kisi-kisi' yang terbuat

dari kayu yang dibulatkan, *sarigsig* ini ditancapkan pada *sangkirin*. Pada rumah baru, di bagian tepas kini mempergunakan jendela berkaca. Jendela di daerah kamar mempergunakan dua lapis, yaitu panil kayu di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Jendela di bagian tengah rumah mempergunakan kaca dan *sarigsig* kayu. Dewasa ini sudah banyak rumah yang mempergunakan jendela *nako* yang disatukan dengan kaca yang dipaten, karena angin dapat masuk lewat *nako*.

Parako, elemen dapur yang sangat menonjol pada sebuah dapur di Kampung Naga adalah apa yang disebut *parako*. *Parako* adalah tempat untuk meletakkan tungku, yaitu merupakan sebuah kotak yang terbuat dari papan dan lantainya terbuat dari tanah liat, ukuran *parako* ini bervariasi antara 1 m x 1 m. Adukan tanah liat ini terdiri dari campuran tanah liat dan sabut kelapa, kemudian dibuat lantai yang cukup tebal untuk memperkuat *hawu* (tungku) agar tahan api. Begitu pula dengan tungku, terbuat dari adukan tanah liat dan sabut kelapa, dibuat menjadi kotak dengan dua lubang di atasnya untuk menyimpan panci dan lubang di depannya untuk memasukkan kayu bakar. Selain elemen *parako*, di atas tungku ada sebuah rangka kayu yang disebut dengan *para seuneu*, yaitu sebuah tempat untuk menyimpan kayu bakar dan beberapa alat dapur lainnya, seperti niru, ayakan, *boboko*, dan lain-lain.

Golodog, dalam Kamoes Basa Soenda disebut *babancik* artinya *tempat paranti turun unggah ka imah* (tempat turun atau naik ke dalam rumah) (Satjadibarata, 1948 : 130). Di Kampung Naga, *golodog* sebagai tempat yang memiliki banyak fungsi, karena *golodog* bukan saja berfungsi sebagai tangga untuk memasuki rumah, melainkan juga dapat berfungsi sebagai tempat bercengkrama dengan tetangga yang berada di depan

rumahnya. Selain itu, *golodog* merupakan tempat untuk bekerja; meraut bambu untuk membuat kerajinan anyaman, menganyam anyaman bambu, bahkan *golodog* berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu. Saat ini, *golodog* yang sudah direhab, merupakan tempat yang lebih multi fungsi lagi, selain untuk bekerja, menerima tamu, tempat bermain anak-anak, *golodog* juga merupakan ciri estetika ‘artifisial’ bagi rumah seseorang.

Dalam kosmologisnya *golodog* ini termasuk daerah maskulin, artinya bahwa *golodog* ini merupakan daerah yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, walaupun kaum wanita mempergunakannya sebagai tempat untuk duduk-duduk atau menganyam. Karena *golodog* sebagai wilayah laki-laki, biasanya di pinggir *golodog* pada *papan cemped* selalu tersimpan perabotan laki-laki untuk pertanian dan membuat anyaman, seperti pisau raut, kored, cangkul, dan menyimpan petromaks, arit (sabit), dan lain sebagainya. Di bawahnya (kolong *golodog*) bisanya dibuat pintu masuk hewan ternak ayam terbuat dari anyaman bambu, karena kolong rumah yang telah dipagari bambu menjadi kandang.

Organisasi Rumah

Pengertian rumah atau *bumi* menuntut kesadaran yang penuh tanggungjawab dari orang sebagai penghuninya. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan yang digariskan oleh *karuhun*-nya dalam tata cara mendirikan rumah, begitu pula penempatan ruang-ruang yang ada di dalamnya harus sesuai dengan *tatali karuhun* yang seharusnya. Pembangunan dimulai pada hari yang telah ditentukan dan dipandang sebagai hari baik bagi si pemilik rumah, dalam membangun rumah bagi si anak atau si adik, tidak boleh berada di sebelah timur, karena akan *ngalangkangan* (membayangi) rumah orang tua atau kakaknya,

bila hal itu dilanggar maka akan mengakibatkan bencana. Dalam prakteknya belum pernah ada pembangunan rumah seperti itu.

Masyarakat Kampung Naga yang sangat mempercayai adanya *Nyi Pohaci Sang Hyang Sri Dangdayang Tisnawati* (Dewi Sri) sebagai pengayom tanaman padi, maka hal tersebut tidak lepas dengan penempatan dapur dan goah yang erat kaitannya dengan kosmologis wilayah wanita dalam sebuah ruang di dalam rumah. Penghormatan terhadap Dewi Sri dapat terlihat dalam penempatan goah yang dianggap sebagai ruang utama dalam sebuah rumah. *Goah* diletakkan di dapur sebelah barat atau timur sesuai dengan *weton* atau hari kelahiran dari si empunya rumah, yaitu *weton* si istri. Di dalam *goah* inilah disajikan berbagai sesaji untuk menghormati Dewi Sri yang setiap hari Selasa dan Jumat diganti. *Goah* inilah merupakan wilayah perempuan yang tidak boleh dimasuki kaum pria. Ruang *goah* sangat dominan bagi masyarakat Kampung Naga, malah fungsinya dapat mengalahkan fungsi kamar tidur sekalipun.

Pada umumnya *imah* memiliki ruangan sebagai berikut: **Tepas** merupakan ruangan yang terletak di depan dan berfungsi untuk menerima tamu. Di samping itu, ruangan ini secara kosmologis memiliki fungsi untuk menyaring dari hal-hal atau pengaruh yang bersifat kotor masuk ke dalam *imah*. Di samping itu, *tepas* merupakan ruangan kekuasaan laki-laki. Bila rumah yang tidak memiliki *tepas*, biasanya ruangan filter itu ditempatkan pada *golodog*. Seperti diuraikan di atas, *golodog* mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menerima tamu yang bertandang ke rumah, bila tamu sudah dianggap dekat dan familiar, maka tamu

lama-kelamaan akan dibawa masuk ke dalam rumah.

Tengah Imah, yaitu ruangan yang terdapat di belakang dapur. Ruangan ini berfungsi sebagai ruangan keluarga. Biasanya keluarga berkumpul pada saat-saat tertentu bila mereka membicarakan sesuatu atau bercengkrama dengan sanak keluarga. Di tempat ini pula mereka menerima tamu dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam selamatan. Menurut pandangan masyarakat Kampung Naga, tengah *imah* merupakan tempat netral dari pengaruh buruk, karena telah tersaring oleh ruangan tepas. Tengah *Imah* merupakan penyeimbang secara magis antara dunia atas dan dunia bawah dari kekuatan gaib. Dengan kenyataan itu, maka Tengah *Imah* merupakan ruangan netral yang dapat dipergunakan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Pangkeng atau **Geusan**, adalah kamar tidur yang letaknya di tengah imah. Bagi mereka yang rumahnya luas, biasanya memiliki lebih dari satu kamar tidur, namun kebanyakan imah yang ada di Kampung Naga hanya memiliki satu kamar tidur, kamar tidur anak disebut *sepen*. Secara kosmologis, pangkeng, geusan atau kamar tidur, merupakan wilayah wanita, karena biasanya wanita Kampung Naga biasa melahirkan di dalam kamarnya sendiri dibantu oleh *Ma Beurang* atau *Ma Paraji* (dukun beranak). Proses kelahiran yang dilakukan di kamar inilah kemudian menjadi *geusan* (tempat awal) kelahiran seseorang. Dalam *Paribahasa Sunda* (ungkapan tradisional Sunda) ada yang dikatakan *bali geusan ngajadi* (plasenta awal terjadinya) yang menunjukkan bahwa manusia dilahirkan di tempat itu. Ungkapan *bali geusan ngajadi* adalah ungkapan untuk mengingatkan seseorang kepada awal proses manusia, atau secara fisik adalah tempat di mana ia dilahirkan.

Dapur, hampir semua informan di Kampung Naga, menyatakan bahwa dapur merupakan tempat yang istimewa. Elemen dapur yang harus dipenuhi sesuai dengan *tatali karuhun* adalah *tungku*, *palupuh*, *parako* dan *goah*. Elemen ini selalu dipenuhi pada setiap rumah di Kampung Naga karena merupakan adat yang tidak boleh dihilangkan. Sehingga, penempatan dapur selalu di bagian depan *imah*. Hal tersebut mengalahkan penempatan kamar tidur si pemilik rumah. Dapur, dan *goah* adalah pusat kehidupan manusia Kampung Naga yang harus dijaga sesuai dengan sistem kepercayaannya.

Goah, adalah unsur yang penting dalam kehidupan kesehariannya. Wilayah kedua tempat ini, yaitu dapur dan *goah* adalah wilayah wanita yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Khususnya ruang *goah*, hanya kaum wanitalah yang bisa memasukinya. Di ruangan ini *Kersa Nyai* (Nyi Pohaci) atau *Nyi Pohaci Sang Hyang Sri Dangdayang Tisnawati* (Dewi Sri) ditempatkan.

Kenapa dapur dan *goah* menjadi elemen ruang yang terpenting? Menurut masyarakat Kampung Naga, bahwa dapur dan *goah* adalah tempat penyimpanan dan tempat memproduksi makanan yang merupakan kebutuhan dasar atau pokok kehidupan manusia. Dalam ruangan *goah* terdapat *pabeasan* yang terbuat dari gentong tanah liat, fungsinya untuk menyimpan beras. Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa *leuit* di Kampung Naga sudah tidak bersisa, kini masyarakat Kampung Naga menyimpan padi keringnya di *leuit* dalam *goah*. "*Leuit*" yang ada di dalam *goah* ini merupakan ruangan yang disekat oleh bilik fungsinya untuk menyimpan padi kering yang biasanya disimpan di *leuit* yang terpisah dari rumah.

C. Penutup

Pembangunan sebuah *imah* tak lepas dari ritus yang secara adat selalu dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan yang mereka anut. Kenapa hal itu dilaksanakan, karena mereka takut akan melanggar *pamali*. Demikian pula *imah* dan pola perkampungan yang ada di Kampung Naga erat hubungannya dengan lama sekitar, sehingga *imah* dapat dianalogikan sebagai ‘mikro kosmos’ atau bumi ‘makro kosmos’ yang berarti alam semesta. Rumah di Kampung Naga dikenal dengan istilah *imah* atau bumi, bila sebuah rumah yang kosong ditinggal penghuninya maka berubah istilah menjadi *patambon*. Secara umum *imah* yang ada di Kampung Naga dengan *imah* yang ada di Jawa Barat pada umumnya sama berupa *imah panggung*. Ada dua gaya bentuk rumah yang berbeda yaitu bentuk *imah soko* dan *imah gagalur*, kedua perbedaan ini terlihat sangat mendasar, yaitu *imah soko* adalah *imah* yang tiang rumahnya langsung mengenai *tatapakan batu lempar*, sedangkan *imah gagalur* adalah rumah dengan tiang yang tidak langsung mengenai *tatapakan*, melainkan hanya *gagalur* yang mengenai *tatapakan* yang terbuat dari batu papras.

Dewasa ini perkembangan jaman yang terus bergulir, telah pula ikut mengubah gaya pembangunan rumah yaitu, *bumi panto hiji* atau *bumi teu acan direhab* dan *bumi nu tos direhab* atau *bumi panto dua*. Bumi Panto Hiji adalah bentuk rumah yang paling tua, bumi Panto Dua atau Bumi nu tos direhab, merupakan rumah yang telah direnovasi secara total, di mana pembangunannya mengikuti perkembangan jaman, seperti penambahan pintu jadi dua, memiliki jendela, lantai tengah rumah tidak lagi menggunakan *palupuh*, lantai palupuh

hanya dipergunakan di dapur saja, penambahan ruangan kamar tidur, bilik di bagian depan rumah diganti dengan bilahan papan, dan sebagainya.

Imah bagi masyarakat Kampung Naga dalam kesehariannya dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan yaitu dengan adanya *goah* dan *leuit* di dalam rumah. Di samping itu, fungsi yang lain sebagai tempat untuk menerima tamu, selain *golodog*, kini ada ruang tepas yang menjadi ruang tambahan. Selain itu, *imah* berfungsi sebagai tempat istirahat, tidur dan meneruskan keturunan dengan adanya ruang *pangkeng* atau *geusan*. Dalam lingkup yang lebih jauh, *imah* dapat berfungsi sebagai tempat upacara atau salamatan daur hidup mulai dari kehamilan, kelahiran, perkawinan sampai kematian.

Melihat paparan di atas maka diperlukan pendokumentasian seluruh arsitektur tradisional yang ada di Jawa Barat agar bentuk dan gaya arsitektur tradisional dapat menjadi ciri mandiri dan asset bagi daerah. Dalam perkembangannya, arsitektur sebagai sebuah karya tak lepas dari pengaruh dan sentuh budaya luar, sehingga banyak karya arsitektur tak bernilai kedaerahan dan keindonesiaan. Karya arsitektur kini lebih menonjolkan nilai artifisial dibanding dengan nilai fungsionalnya.

Untuk menjaga agar karya arsitektur tradisional tidak tergilas oleh perubahan jaman, maka perlu pemerintah daerah maupun pusat melindungi dengan undang-undang maupun peraturan daerah yang mengikat. Di samping itu, pemerintah daerah dan pusat bersinergi dengan masyarakat adat untuk ikut mempertahankan tradisi yang berlaku dalam mempertahankan kebudayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atja dan Saleh Danasasamita. 1981.
Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian. Bandung: Proyek Pengembangan Permusiuman Jawa Barat.
- Frick, Heinz. 1997.
Pola Struktur dan Teknik Bangunan di Indonesia,. Yogya-karta: Kanisius.
- Kusnaka, Adimihardja et al. 1981.
Tipe Rumah Tradisional Khas Sunda Jawa Barat. Bandung: Kanwil Direktorat Jenderal Pariwisata Jawa Barat.
- Monografi Desa Salawu Kabupaten Tasikmalaya*. 2005.
- Muanas, Dasum et al. 1981/1982.
Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat. Depdikbud. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Rusnandar, Nandang, 2000.
Arsitektur Rumah Adat Tradisional Kampung Mahmud. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- , 2003.
Saung Ranggon Sebuah Karya Arsitek Tradisional. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Satjadibarata. 1948.
Kamoes Basa Soenda. Djakarta. Bale Poestaka.
- Suganda, Her. 2006.
Kampung Naga Mempertahankan Tradisi. Bandung. Kiblat.
- Suhamihardja, A. Suhandi dan Yugo Sariyun. 1991/1992.
Kesenian, Arsitektur Rumah dan Upacara Adat Kampung Naga Jawa Barat. Bandung: Depbud.
- Tim Teknis Pelaksana. 1999-2000.
Laporan Final Perencanaan Pengembangan Kawasan Andalan Hutan Raya Djuanda di Kabupaten Bandung.

WAYANG GOLEK

DARI SENI PERTUNJUKAN KE SENI KRIYA

(Studi tentang Perkembangan Fungsi Wayang Golek di Kota Bogor)

Oleh Rosyadi

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: ochadroki@yahoo.com

Abstrak

Wayang golek adalah suatu jenis seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi bagian dari jati diri orang Sunda. Perkembangan dunia hiburan yang kini lebih didominasi oleh jenis-jenis kesenian modern, telah mengakibatkan semakin langkanya pertunjukan kesenian wayang golek dipergelarkan.

Dalam pada itu, perkembangan dunia pariwisata telah menciptakan karya baru bagi wayang golek, yaitu sebagai barang souvenir. Maka fungsi wayang golek pun berkembang dari seni pertunjukan menjadi seni kriya.

Kata Kunci: Wayang Golek, hiburan, seni kriya.

Abstract

Wayang golek is one of traditional entertaining art and it has become identity of Sundanese people. The growth of modern entertainmen, which more dominated by a modern art, it caused events of traditional art such as wayang golek is more difficult to find.

Mean while, growing of tourism industry has made a new change for wayang golek. In this case wayang golek has become a souvenir. So, there is a change of wayang golek function from entertaining art to be handycraft.

Keywords: puppet, entertainment, art, handycraft.

A. Pendahuluan



Salah satu kelebihan makhluk manusia dari jenis-jenis makhluk lainnya di muka bumi ini ialah di samping manusia dikaruniai akal fikiran, manusia juga dikaruniai rasa keindahan. Dalam kehidupan manusia, keindahan

sangat erat kaitannya dengan urusan batin dan rasa. Kemampuan manusia dalam mengolah rasa, batin, dan akal pikiran, kemudian melahirkan kesenian, yang merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kebudayaan manusia.

Kesenian sebagai subsistem kebudayaan, merupakan ungkapan krea-tifitas dari kebudayaan itu sendiri. Ia men-

ciptakan, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, menularkan, mengembangkan untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru lagi (Koentjaraningrat, 1981/1982). Berkesenian adalah salah satu kebutuhan hidup manusia dalam bentuk pemenuhan kebutuhan akan rasa keindahan.

Dalam konteks kemasyarakatan, jenis-jenis kesenian tertentu memiliki kelompok-kelompok pendukung tertentu. Demikian pula kesenian bisa mempunyai fungsi yang berbeda di dalam kelompok-kelompok manusia yang berbeda. Perubahan fungsi dan perubahan bentuk pada hasil-hasil karya seni, dengan demikian dapat pula disebabkan oleh dinamika masyarakat. Di sisi lain, tata masyarakat dan perubahannya turut pula menentukan arah perkembangan kesenian.

Sekalipun kesenian dicirikan dari keindahannya, tetapi kesenian tidak hanya dapat dikaji dari sudut penataan artistiknya saja yang akan menumbuhkan rasa kekaguman yang mendalam bagi para penikmatnya. Dalam pandangan lain yang justru akan memberikan penjelasan lebih luas, kesenian juga dapat dilihat dari sudut pandang latar belakang kebudayaannya yang akan mampu mengungkap makna simbolik dari kesenian tersebut.

Seniman, di samping anak dari bangsanya, juga tidak terelakkan sebagai anak dari zamannya. Kini, zaman tengah dilanda proses modernisasi dan globalisasi yang seringkali diidentikkan dengan pemikiran-pemikiran dan peradaban barat. Dengan demikian setiap pemikiran barat yang dilontarkan melalui karya seni, turut merembet melalui seniman yang pada akhirnya disebarluaskan ke dalam lingkungan masyarakat luas.

Keberadaan kesenian-kesenian tradisional mulai tergeser dengan keberadaan kesenian-kesenian baru yang mewakili pemikiran-pemikiran barat.

Demikian pula fungsi dari kesenian tradisional mulai melemah. Padahal, bagi masyarakat pendukungnya, kesenian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, melainkan juga memiliki fungsi sosial, kultural, serta fungsi spiritual. Keadaan ini pula yang kini tengah dihadapi oleh kebudayaan-kebudayaan lokal, khususnya kesenian-kesenian tradisional.

Salah satu jenis kesenian tradisional yang fungsi dan keberadaannya kini sudah mulai tergeser adalah kesenian wayang golek. Wayang golek adalah salah satu jenis kesenian Sunda yang termasuk ke dalam jenis seni pertunjukan. Pada masanya dulu, kesenian wayang golek sempat “berjaya”, dalam arti menjadi satu-satunya sarana hiburan masyarakat, yang mampu memenuhi peran dan fungsi-fungsinya di dalam masyarakat. Selain sebagai sarana hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat, wayang golek pun berfungsi sebagai sarana penyebaran Islam, serta media informasi yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi kesenian wayang golek pun mengalami perubahan. Keberadaannya kini tidaklah sehebat dan setegar dulu lagi. Ia kini mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya. Dengan kata lain, keberadaan kesenian wayang golek saat ini dalam keadaan kritis, jangankan untuk berkembang, untuk bertahan pun sangatlah sulit. Inilah permasalahan yang tengah dihadapi oleh kesenian wayang golek.

Kendatipun keberadaan kesenian wayang golek sebagai seni pertunjukan kini telah mulai tersisihkan oleh jenis-jenis kesenian modern, akan tetapi wayang goleknya itu sendiri masih dapat diberdayakan. Kreatifitas para pengrajin wayang golek di Kota Bogor tidak pernah surut dengan semakin langkanya

pertunjukan wayang golek. Perkembangan aktifitas kepariwisataan telah mampu menciptakan peluang baru bagi pemasaran produk kerajinan wayang golek. Wayang golek yang semula diproduksi untuk bahan pertunjukan kesenian wayang golek, kini diproduksi juga sebagai barang cenderamata.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi wayang golek yang semula sebagai alat kesenian, kini bergeser fungsinya sebagai barang cenderamata. Fenomena inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang “Perubahan Fungsi Wayang Golek” di Kota Bogor.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan sekaligus mengangkat dan memberdayakan produk wayang golek yang dibuat oleh pengrajin wayang golek di Kota Bogor.

B. Hasil dan Bahasan

Kota Bogor Selayang Pandang

1. Keadaan Alam Kota Bogor



Kota Bogor adalah salah satu daerah administrasi pemerintahan tingkat II di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Posisi Kota Bogor terletak di tengah-tengah Kabupaten

Bogor. Jaraknya dari Ibukota Provinsi Jawa Barat sekitar 80 km ke arah Barat, dan sekitar 40 km ke arah Selatan dari DKI Jakarta. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang sangat dekat dengan Ibukota Negara, menjadikan Kota Bogor sebagai daerah penyangga ibukota.

Kawasan Bogor dikenal dengan keindahan dan kesejukan alamnya yang indah dan asri. Elevasi Kota Bogor yang terletak pada ketinggian 190 sampai 330 meter dari permukaan laut, menjadikan kawasan Kota Bogor sebagai daerah yang beriklim sejuk. Suhu udara di Kota Bogor berkisar antara 21,8⁰ – 30,4⁰ C dengan suhu rata-rata setiap bulan 26⁰ C.

Kota Bogor yang memiliki areal seluas 11.650 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga, dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Dalam tata administrasi pemerintahan, Kota Bogor terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 68 kelurahan, 210 dusun, 623 RW, dan 2.712 RT. Jumlah penduduk Kota Bogor menurut data tahun 2004 adalah sebanyak 745.666 jiwa.

2. Gambaran Kepariwisata Kota Bogor

Kota Bogor merupakan daerah yang sangat potensial dan strategis bagi perkembangan sektor ekonomi dan jasa, serta pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Dalam hal sektor kepariwisataan, Kota Bogor memiliki potensi yang cukup kaya dan sangat beragam. Kota Bogor memiliki obyek-obyek wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, maupun wisata kuliner yang sangat menarik dan dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Obyek-obyek wisata yang ada di Kota Bogor, dapat dikelompokkan ke dalam:

a. Wisata Budaya/Sejarah;

Di Kota Bogor terdapat banyak obyek wisata budaya dan sejarah, antara lain:

- *Istana Kepresidenan Bogor*, didirikan tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Gustaf Willem van Inhof. Istana ini memiliki areal seluas 24 Ha, di dalamnya terdapat 219 buah patung keramik/perunggu. Pada mulanya istana ini didirikan sebagai tempat istirahat yang diberi nama Buitenzorg. Pada tahun 1950 statusnya berubah menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
- *Museum Perjuangan*; didirikan tahun 1957 sebagai tempat penyimpanan macam-macam senapan yang digunakan para pejuang kemerdekaan, dan senjata-senjata hasil rampasan dari tentara Jepang dan Inggris. Museum ini dilengkapi dengan diorama perjuangan di daerah Bogor dan sekitarnya.
- *Museum Peta*; didirikan tahun 1996 oleh Yayasan Perjuangan Tanah Air. Di dalamnya memuat 14 diorama, sebagai salah satu bentuk gambaran perjalanan proses pergerakan kebangsaan.
- *Batutulis*; prasasti ini dibuat oleh raja Pajajaran Raja Surawisesa (1521-1535). Tempat di mana prasasti ini berada merupakan tempat untuk melakukan upacara penobatan raja-raja Pajajaran. Prasasti ini bertuliskan huruf Kawi, berbahasa Jawa Kuno.

Masih banyak lagi obyek-obyek wisata budaya dan sejarah yang terdapat di wilayah Kota Bogor yang dapat menarik para wisatawan, baik asing maupun domestik. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.

b. Wisata Ilmu Pengetahuan

Di wilayah Kota Bogor banyak terdapat tempat-tempat yang di dalamnya menyimpan berbagai peninggalan yang dapat dijadikan sebagai sumber pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tempat-tempat itu antara lain:

- *Kebun Raya Bogor*, didirikan pada tahun 1817 atas prakarsa seorang ahli botani, yang bernama Prof. Dr. Reinwadt. Kebun Raya ini memiliki areal seluas 87 Ha. Koleksi yang terdapat di Kebun Raya Bogor terdiri atas 20.000 tanaman yang tergolong ke dalam 6.000 species. Tidak jauh dari pintu gerbang Kebun Raya, terdapat tugu peringatan yang didirikan oleh Raffles bagi istrinya, Olivia Maria yang meninggal pada tahun 1814
- *Museum Etnobotani*, didirikan pada tahun 1982 oleh Prof. Dr. B.J. Habibie. Di dalamnya memperagakan pemanfaatan tumbuhan Indonesia dan koleksi fosil kayu, tumbuh-tumbuhan yang dipergunakan untuk obat tradisional. Terdapat pula koleksi daun-daun yang telah diawetkan.
- *Museum Zoologi*, didirikan pada tahun 1894 dengan nama Museum Zoologicum Bogoriensis, yang merupakan bagian dari Lands Plantentuin. Semula bagian ini berfungsi sebagai laboratorium zoologi, tempat menelaah hama pertanian dan perkebunan. Koleksi yang terdapat di dalam museum ini meliputi ribuan spesies binatang mamalia, serangga, reptilia, burung, ikan, dan moluska.
- *Museum Tanah*, didirikan pada tanggal 29 September 1988, semula adalah Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat yang didirikan pada tahun 1905. Museum ini merupakan tempat penyimpanan model/contoh tanah

sebagai koleksi berbagai macam tanah di Indonesia.

c. Wisata Alam

Wilayah Bogor dikenal dengan kawasannya yang memiliki pemandangan alam sangat indah. Siapa yang tidak kenal dengan *Kawasan Puncak* yang berbukit-bukit dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah dan asri. Kendatipun kawasan puncak ini terdapat di wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Bogor, akan tetapi masih dalam lingkup kawasan wisata Bogor yang memberikan kontribusi sangat berarti bagi pengembangan wisata di wilayah Kota Bogor.

Situ Gede; adalah salah satu dari obyek wisata alam yang terdapat di wilayah Kota Bogor. *Situ Gede* merupakan satu kawasan yang bernuansa alam pedesaan, dengan danau yang membentang lebar berlatar hutan yang rindang. Sungguh sebuah pemandangan sangat menarik.

Obyek wisata alam lainnya ialah kawasan *Rancamaya*. Kawasan ini telah dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya tarik keindahan alam, juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana olah raga. Kendatipun pada awal masa pembangunannya sempat mengundang protes keras dari para budayawan (Sunda), akan tetapi kini kawasan ini telah menjelma menjadi sebuah kawasan wisata yang banyak menarik minat para wisatawan.

d. Wisata Kuliner

Dalam hal makanan, Bogor merupakan surga bagi penikmatnya. Berbagai jenis makanan dari yang tradisional sampai makanan yang trendy, semuanya tersedia di Kota Bogor. Berbagai tempat jajan makanan, mulai dari restoran, cafe, sampai warung-warung di pinggir jalan, dan para penjaja makanan, siap memuaskan selera makan pengunjung.

Beberapa jenis makanan tradisional yang dapat kita temukan dan nikmati di Kota Bogor, antara lain:

- *Nasi Tutug Oncom*, yaitu nasi yang diaduk dengan bumbu kencur dan bawang merah, dicampur dengan oncom hitam bakar yang sudah dihaluskan. Nasi tutug oncom ini biasanya dihidangkan dengan tempe dan tahu goreng, ayam goreng, sambel goang, dan lalapan.
- *Gepuk Ayam*; yaitu ayam goreng yang “digepek” (ditumbuk hingga pipih), dimakan bersama nasi timbel.
- *Tauge goreng*; yaitu tauge yang direbus bersama mie di atas nampan yang dipanaskan dengan bara arang. Tauge goreng ini disajikan bersama tahu goreng, lontong, dan disiram kuah tauco.

e. Souvenir / Cenderamata

Kreatifitas para seniman di Kota Bogor, telah mampu menciptakan peluang bagi para seniman di samping untuk mengekspresikan rasa seninya, juga untuk bisa mendapatkan keuntungan finansial dari karya seninya. Berbagai jenis karya seni yang kini banyak dijadikan sebagai cenderamata, di antaranya adalah :

- *Wayang Golek*; wayang golek yang merupakan karya seni ciri khas daerah Priangan, mendapatkan tempat yang cukup layak di kalangan para seniman Kota Bogor. Ini terbukti dengan semakin banyaknya produk wayang golek yang dihasilkan oleh para seniman dan pengrajin di Kota Bogor. Bentuk dan pemberian ornamen, serta hiasan yang indah merupakan salah satu ciri khas kerajinan wayang golek yang dibuat dan diproduksi oleh para pengrajin di wilayah Kota Bogor.
- *Keramik*; jenis kerajinan yang banyak diminati, yang memberikan efek keindahan bagi suatu ruangan. Ciri

khas yang terdapat dalam bentuk, warna, serta kualitas produk yang bermutu tinggi, merupakan faktor di mana produk keramik dari Kota Bogor menjadi incaran para wisatawan.

- *Bordiran*; Perkembangan kerajinan bordiran di Kota Bogor menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Ini terbukti dengan tingkat penjualan yang cendrung meningkat dengan pangsa pasar yang cukup jelas, serta didukung oleh produk yang berkualitas dengan ciri khas dan motif yang bernilai seni tinggi, menjadikan produk kerajinan bordir dari Kota Bogor cukup dikenal keberadaannya oleh para wisatawan dari berbagai daerah.
- *Goong*; adalah bagian dari perangkat musik gamelan. Goong merupakan produk kerajinan unggulan Kota Bogor. Lokasi pembuatan kerajinan goong dan perangkat gamelan lainnya berada di kawasan Pancasan Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, yang juga merupakan obyek wisata yang cukup potensial.
- *Kujang*; Menurut sejarahnya, kujang merupakan senjata khas warisan dari Kerajaan Sunda. Kini senjata kujang menjadi salah satu simbol Kota Bogor. Senjata kujang sebagai barang hiasan dan cenderamata pun kini sudah banyak diproduksi oleh para pengrajin di Kota Bogor.

Wayang Golek: dari Seni Pertunjukan ke Seni Kriya

1. Sekilas Mengenai Sejarah Wayang

a. Wayang Pada Masa Penyebaran Islam



Dalam khasanah budaya Nusantara, wayang sudah menjadi salah satu karya budaya unggulan bangsa. Siapa yang tidak kenal dengan kesenian wayang.

Kesenian wayang bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi sudah mendunia. Di kawasan Nusantara sendiri, kesenian wayang bukan hanya dikenal di Pulau Jawa saja, melainkan juga terdapat pada berbagai kelompok etnik yang ada di Nusantara.

Dalam perjalanan sejarahnya, ke-senian wayang telah menapaki perjalanan yang cukup panjang. Mengenai asal-usul wayang khusus di Indonesia, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wayang berasal dari kebudayaan India yang sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu. Pendapat lain mengatakan bahwa wayang merupakan hasil kebudayaan asli masyarakat Jawa tanpa ada pengaruh budaya lain. Disebutkan pula oleh beberapa sumber bahwa wayang berasal dari relief candi karena candi memuat cerita wayang, seperti candi Prambanan. Bukti keberadaan wayang dalam perjalanan sejarah di Indonesia tercatat dalam berbagai prasasti, seperti prasasti Tembaga (840 M), prasasti Ugrasena (896 M), dan prasasti Belitung (907 M).

Kesenian wayang dalam bentuknya yang asli timbul sebelum kebudayaan Hindu masuk di Indonesia dan mulai berkembang pada jaman Hindu Jawa. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa peneliti sejarah, bahwa sebenarnya budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia yang sudah ada jauh sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Memang, cerita wayang yang populer saat ini merupakan adaptasi cerita dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Tetapi sudah mengalami adaptasi untuk menyesuaikan dengan falsafah asli Indonesia.

Pada sekitar abad ke-15, agama Hindu/Budha masih menguasai masyarakat di Pulau Jawa. Kala itu pula, agama Islam sudah mulai memasuki daerah

kekuasaan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Tersebutlah Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo, mendatangi pulau Jawa setelah ia kembali dari pelbagai negeri ufuk timur seperti Persia, Turki, Mesir dan Cina. Ia datang ke daerah Pulau Jawa dengan misi menyebarkan agama Islam.

Pada waktu itu, rakyat maupun pembesar Tanah Jawa masih memeluk agama Hindu. Sedikit demi sedikit, Sunan Kalijaga mulai memasukkan faham Islam ke dalam kehidupan spiritual masyarakat Tanah Jawa. Ia pun sangat memahami budaya masyarakat setempat sehingga ketika ia mulai menamakan ajaran Islam, ia menggunakan media budaya masyarakat setempat. Ia pun mulai memperkenalkan ajaran-ajaran Islam dengan menggunakan media kesenian wayang yang banyak mengisahkan tentang dewa-dewa yang ada dalam faham religi masyarakat setempat, namun ia pun mulai memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam media wayang tersebut.

Karena ajaran Hindu sudah sedemikian melekat dalam kehidupan masyarakat kala itu, maka cerita Mahabharata dan Ramayana dari Tanah Hindu dimodifikasi untuk mengajarkan Ketauhidan. Misalkan, dalam cerita Mahabharata para dewa memiliki wewenang yang sangat absolut, sebagai penentu nasib dan takdir yang tidak bisa disanggah, maka para wali membuat objek baru yang posisinya lebih kuat yaitu lewat tokoh Semar. Tokoh Semar tersebut yang karena kesalahannya turun ke bumi untuk mendampingi setiap kejadian dalam babak Bharata Yuddha baik sebagai penengah atau sebagai eksekutor tokoh yang tidak bisa diajak ke dalam kebaikan.

Ajaran Islam lambat laun merasuk ke dalam kehidupan masyarakat di Tanah Jawa. Dalam hal ini terjadi sinkretisasi antara ajaran Hindu yang sudah demikian

dalam tertanam dalam jiwa dan perikehidupan masyarakat setempat, dengan ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali. Dengan melalui media budaya setempat, dalam hal ini wayang, maka ajaran Islam pun mulai dimengerti dan difahami oleh masyarakat setempat. Dengan teknik pementasan, bahwa, setiap babak pementasan adalah bidang permata atau ibarat tematis filsafat tertentu, dengan menyirat makna tersendiri, yaitu pertikaian antara kebaikan melawan kejahatan yang pada akhirnya dimenangkan oleh kebaikan.

b. Kelahiran Wayang Golek Trimatra

Di Jawa Barat, tempat berkembangnya wayang pertama kali adalah Cirebon, yaitu pada masa Sunan Gunung Jati (abad ke-15). Jenis wayang yang pertama kali dikenal adalah jenis wayang kulit. Sementara wayang golek mulai dikenal di Cirebon pada awal abad ke-16 dan dikenal dengan nama wayang golek papak atau cepak.

Wayang golek atau disebut “golek” saja, merupakan salah satu jenis tradisi yang hingga sekarang masih tetap bertahan hidup di daerah Sunda. Berbeda dari wayang kulit yang dwimatra, golek adalah salah satu jenis wayang trimatra. Golek memiliki sifat pejal. Ia merupakan boneka tiruan rupa manusia (ikonografi), yang dibuat dari bahan kayu bulat torak untuk mempertunjukkan sebuah lakon.

Kelahiran wayang golek berasal dari ide Dalem Bupati Bandung (Karang Anyar) yang menugaskan Ki Darman, juru wayang kulit asal Tegal yang tinggal di Cibiru, untuk membuat bentuk golek purwa. Awalnya wayang kayu ini masih dipengaruhi bentuk wayang kulit, yaitu gepeng atau dwimatra. Pada perkembangan selanjutnya, tercipta bentuk golek yang semakin membulat atau trimatra seperti yang biasa kita lihat sekarang. Kemudian, pembuatan golek pun

menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat seperti Garut, Ciamis, Ciparay, Bogor, Karawang, Indramayu, Cirebon, Majalaya, dan sebagainya.

Ada 2 macam wayang golek di daerah Sunda, yaitu wayang golek papak (cepak) atau wayang golek menak, dan wayang golek purwa. Wayang golek yang banyak dikenal orang adalah wayang golek purwa. Sama seperti wayang kulit, pementasan wayang golek purwa menampilkan cerita Ramayana dan Mahabharata.

2. Wayang Golek sebagai Seni Pertunjukan

Wayang Golek adalah suatu jenis seni pertunjukan wayang yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan. Pementasan wayang golek pada mulanya hanya dilakukan malam hari, dan memakan waktu semalam penuh. Baru pada abad ke-16, pertunjukan diadakan pula pada siang hari. Wayang yang dipertontonkan memiliki bentuk trimatra, berupa boneka kayu, yang disebut golek. Pertunjukan wayang golek biasanya di tempat terbuka dengan memakai panggung yang ditinggikan (balandongan) sehingga penonton dapat melihat satu arah dan berkonsentrasi pada pertunjukannya.

Sebagaimana alur cerita pewayangan umumnya, dalam pertunjukan wayang golek juga biasanya memiliki lakon-lakon baik galur maupun carangan yang bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Wayang golek adalah sebuah bentuk teater boneka yang dituturkan oleh seorang dalang dalam bahasa Sunda dan diiringi gamelan Sunda laras salendro, yang terdiri atas dua buah saron, sebuah peking, sebuah selentem, satu perangkat bonang, satu perangkat bonang rincik, satu perangkat kenong, sepasang gong (kempul dan goong), ditambah dengan seperangkat

kendang (sebuah kendang Indung dan tiga buah kulanter), gambang dan rebab.

Dalam pertunjukan wayang golek, dalang memiliki peranan yang sangat sentral dan menentukan. Dalang mengarahkan pertgelaran dan sekaligus berperan selaku: ahli teknik yang menghidupkan wayang, juru ceritera, dan konduktor yang memberi petunjuk kepada para nayaga irama apa yang harus dimainkan. Di samping itu, dalang pun harus menggembirakan penonton selama berjam-jam. Untuk memenuhi tuntutan itu, maka dalang harus mampu menarik penonton dengan guyonan-guyonan yang segar, selain harus menguasai berbagai karakter suara.

Dalam pertunjukan wayang golek, lakon yang biasa dipertunjukan adalah lakon carangan. Hanya kadang-kadang saja dipertunjukan lakon galur. Hal ini seakan menjadi ukuran kepandaian para dalang menciptakan lakon carangan yang bagus dan menarik. Pola pengadegan wayang golek adalah sebagai berikut : 1) Tatalu, dalang dan sinden naik panggung, gending jejer/kawit, murwa, nyandra, suluk/kakawen, dan biantara; 2) Babak unjal, paseban, dan bebegalan; 3) Nagara sejen; 4) Patepah; 5) Perang gagal; 6) Panakawan/goro-goro; 7) Perang kembang; 8) Perang raket; dan 9) Tutug.

Salah satu fungsi wayang dalam masyarakat Sunda di antaranya adalah untuk "ngaruat", yaitu membersihkan segala sesuatu, baik orang, maupun lingkungan desa dari segala marabahaya. Orang yang harus diruat disebut dengan istilah "sukerta". Orang-orang yang menurut tradisi Sunda harus diruat (sukerta), antara lain:

- *Nunggal* (anak tunggal);
- *Nanggung bugang* (seorang adik yang kakaknya meninggal dunia);
- *Suramba* (empat orang putra);
- *Surambi* (empat orang putri);

- *Pandawa* (lima putra);
- *Pandawi* (lima putri);
- *Talaga yanggal kausak* (seorang putra dihapit putri);

Samudra hapit sindang (seorang putri dihapit dua orang putra), dan sebagainya.

Pada mulanya, wayang golek sering digunakan untuk menamatkan pagelaran wayang kulit untuk menggambarkan perubahan di jagat raya - aluran berangsur dari tahap wujud eksistensi dwimatra ke yang trimatra. Namun rakyat Jawa Barat lebih menggemari wayang golek karena intisari tematikanya lebih mewujud dan duniawi ketimbang wayang kulit yang lebih cenderung bernuansa abstrak.

Wayang golek saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lingkungannya, baik kebutuhan spiritual maupun hiburan semata. Hal demikian dapat kita lihat dari beberapa kegiatan di masyarakat misalnya ketika ada perayaan, baik hajatan (pesta kenduri) dalam rangka khitanan, pernikahan dan lain-lain, serta dalam acara-acara perayaan yang bersifat nasional, seperti agustusan maupun pada acara-acara resmi kenegaraan.

Sejak tahun 1920-an, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden. Popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi sehingga mengalahkan popularitas dalang wayang golek itu sendiri, terutama ketika zamannya Upit Sarimanah dan Titim Patimah sekitar tahun 1960-an.

Di tengah hingar-bingarnya kesenian-kesenian modern, seorang dalang dituntut untuk bisa memikat khalayak agar tetap tertarik, meminati, dan tidak berpaling dari kesenian wayang golek yang merupakan kesenian

tradisional masyarakat Sunda. Tentu saja ini menuntut kepiawaian dan keberaniannya mendobrak atau merekonstruksi pakem atau aturan pewayangan tradisional. Dengan memasukkan nilai-nilai modernitas, ia dalang berupaya mengkreasi alur cerita, setting, dan jenis wayang kayu. Ini mengindikasikan bahwa wayang golek Sunda tidak anti perubahan. Seni pertunjukan ini terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap dicintai masyarakatnya.

3. Wayang Golek Sebagai Cenderamata

Geliat dunia pariwisata, ternyata membawa dampak positif bagi para pengrajin wayang golek. Di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi keberadaan seni pertunjukan wayang golek, dunia pariwisata telah menciptakan peluang baru yang cukup prospektif bagi para pengrajin wayang golek. Kendatipun wayang golek kini sudah jarang dipesan untuk seni pertunjukan, akan tetapi para pengrajinnya mendapat pangsa pasar lain, yaitu para turis, baik turis asing maupun turis domestik. Dalam hal ini kreatifitas para pengrajin wayang golek dituntut untuk lebih bisa menarik konsumen. Tidak jarang para konsumen ini bukanlah penggemar pertunjukan wayang, akan tetapi mereka semata-mata hanya menyenangi bentuk dan penampilan wayangnya saja. Mereka pun membeli wayang golek hanya sekedar untuk pajangan sebagai benda bernilai seni, penghias ruangan, atau untuk cenderamata.

Sebagai barang cenderamata, pembuatan wayang golek pun tidak harus terlalu mematuhi pakem-pakem yang terdapat dalam dunia pewayangan. Namun karakter dasar dari setiap wayang tetap dipertahankan. Kelebihannya adalah para pengrajin bisa lebih

berimprovisasi, khususnya dalam pewarnaan.

Wayang golek adalah sejenis boneka kayu yang dibuat sedemikian rupa, dengan bagian-bagian, kepala, badan, dan tangan. Kepala dan lengan wayang golek dapat dilepaskan. Antara kepala, badan, dan lengan dihubungkan oleh sebatang kayu kecil bulat yang lazim disebut tuding atau gagang. Tuding digunakan sebagai pegangan dalang pada saat memainkan golek, yaitu alat untuk menggerakkan bagian tangan golek dan untuk menancapkan golek di atas alas gebok/dudukan golek. Tuding biasanya terbuat dari bambu. Wayang golek lazimnya berpakaian tenunan berwarna-warni, kain beludru, dengan aneka asesoris berupa mute-mute plastik.

Daya tarik wayang golek adalah bentuknya yang tidak monoton, baik bagi konsumen (pembeli) maupun bagi pembuatnya. Wayang golek dirancang sedemikian rupa untuk menarik konsumen dan bagus ketika dipajang di galeri. Sementara pembuat wayang golek termotivasi untuk berkreasi misalnya mereka bebas memberi warna pada berbagai karakter wayang golek yang mereka buat. Ini membuat pengrajin wayang golek bisa memnciptakan aneka tampilan wayang golek, sehingga wayang golek ada yang terlihat antik, natural, maupun yang berwarna emas.

Pembuatan dan Prospek Pengembangan Wayang Golek

1. Pembuatan Wayang Golek

Wayang golek adalah sejenis boneka kayu yang dibuat dengan cara diraut dan diukir dengan bagian-bagian, kepala, badan, dan tangan. Kepala, badan, dan lengan wayang golek dapat dilepaskan. Antara kepala, badan, dan lengan dihubungkan oleh sebatang kayu kecil bulat yang lazim disebut gagang.

Wayang golek lazimnya berpakaian tenunan berwarna-warni. Gagang ini selain berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala, badan, dan tangan, juga berfungsi untuk meletakkan wayang tersebut di atas "gebog" (batang pisang), dengan cara ditancapkan.

Setiap tokoh wayang memiliki sifat dan karakter sendiri-sendiri, yang secara umum dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu tokoh yang berkarakter baik, dan yang berkarakter buruk. Dalam setiap pertunjukan wayang, kedua kelompok tokoh yang berlainan karakter ini senantiasa dihadapkan sebagai lawan satu sama lain. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia pedalangan terdapat dua sumber cerita pewayangan, yaitu yang mengambil dari perang Bahabharata, yang menghadapkan tokoh-tokoh dari Negara Amarta dengan tokoh-tokoh Negara Astina yang dihadapkan sebagai dua kelompok yang berlawanan. Tokoh-tokoh Negara Amarta dengan tokoh Pandawanya dikelompokkan dalam golongan protagonis, sedangkan tokoh-tokoh Negara Astina dengan tokoh-tokoh Kurawa-nya digolongkan sebagai kelompok antagonis. Tokoh yang baik (protagonis) selalu tampil dari sisi sebelah kanan, sedangkan lawannya (antagonis), sebelah kiri.

Menurut penuturan seorang informan, terdapat kurang lebih 120 karakter tokoh wayang, yang tergolong ke dalam karakter protagonis dan antagonis. Secara visual, karakter masing-masing tokoh dalam pewayangan ini digambarkan melalui perbedaan bentuk dan warna kulit muka. Secara umum, karakteristik para tokoh ini digolongkan ke dalam 4 golongan utama, yaitu:

Satria



Bentuk tubuh golek golongan satria ini meng-

gambarkan keluwesan, ketenangan dan kelemah-lembutan, dengan tetap tidak menghilangkan un-sur kegagahan dan kecerdasannya. Golongan ini memiliki bentuk mata sipit, alis tipis, dan hidung cenderung kecil dan tidak memiliki kumis. Tokohnya seperti Rama, Samiaji, Nakula, Sadewa.

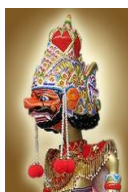
Ponggawa



Golongan golek ini digambarkan sebagai tentara yang ditampilkan dengan bentuk tubuh yang tegap, tegas, dengan mata besar, alis tebal, berkumis, hidung

mancung. Tokoh-tokohnya antara lain Gatotkaca, Bima, Duryudana.

Buta



Buta atau disebut juga raksasa memiliki bentuk tubuh tinggi besar, mata melotot, alis tebal, hidung besar dan bertaring atas bawah. Tokoh golongan ini yang terkenal adalah

Rahwana.

Panakawan



Golongan golek ini digambarkan sebagai tokoh yang kocak dan jenaka. Banyak golek ciptaan baru yang digolongkan dalam go-lek panakawan.

Dilihat dari bentuknya, apabila raut wajah atau muka tokoh wayang dengan sorot mata yang halus serta kepala menunduk, pertanda bahwa wayang tersebut termasuk ke dalam golongan tokoh yang baik. Sedangkan bila bentuk matanya melotot dengan pandangan yang kasar dan lurus ke depan, menandakan tokoh jahat dalam versi pewayangan.

Bahan

Bahan utama untuk membuat wayang golek adalah kayu. Jenis kayu yang biasa dipakai adalah kayu lame atau kayu mahoni yang didapat dari hutan di sekitar Bogor. Dengan peralatan yang sangat sederhana yaitu peralatan tradisional yang digunakan seperti bedog, gergaji, kampak besar, kampak kecil, pisau raut (pisau ukir), dan lain sebagainya, selanjutnya dapat menghasilkan wayang dengan bentuk yang sempurna untuk seterusnya di jual kepada konsumen.

Menurut penuturan seorang informan, konsumen wayang produknya banyak yang dari luar negeri. Oleh sebab itu, ia lebih banyak menggunakan kayu lame, karena kayu lame sudah terbukti ketahanannya dan tidak mudah pecah walaupun di daerah yang memiliki 4 musim. Ada juga pengrajin yang memakai bahan dari kayu albasia, karena jenis kayu ini ringan, mudah dibentuk atau dipahat, serta tahan lama terhadap cuaca.

Bahan lain yang diperlukan untuk membuat wayang adalah cat pewarna. Pewarna yang digunakan adalah cat kayu yang berwarna cerah dan mudah kering. Bahan pewarna yang kini banyak digunakan adalah cat duko (cat untuk mobil). Cat duko lebih menguntungkan dari segi penampilan golek sebab warna golek menjadi lebih cerah. Selain itu, cat duko lebih mudah kering dibandingkan cat kayu.

Bahan lainnya adalah bambu, yang digunakan untuk membuat tuding. Tuding digunakan sebagai pegangan dalang pada saat memainkan golek, yaitu alat untuk menggerakkan bagian tangan golek dan untuk menancapkan golek di atas alas gebok/dudukan golek.

Bahan untuk pakaiannya dibuat dari kain beludru berwarna-warni, dipadu

dengan asesoris dari mute-mute plastik yang berkilat.

asesorisnya dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari.

Proses Pembuatan

Wayang golek dibentuk dengan cara diraut dan diukir. Setelah itu didempul. Sebelum diwarnai, diberi arsiran dulu untuk menentukan bagian mana akan diberi warna apa. Sementara pada bagian hiasannya, dibuat dengan cara dipulas.

Proses awal pembuatan wayang adalah membuat gambar wajah terlebih dahulu secara detail. Setelah itu kayu yang telah dibentuk, dihaluskan dengan amplas, lalu mulai diukir menggunakan pisau ukir dengan sangat teliti untuk membuat bagian kepala. Selanjutnya dilakukan proses pengecatan. Sambil menunggu pengeringan, maka dilanjutkan dengan membuat bagian badan dan tangan. Untuk pembuatan tangan harus diukur terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat bagian mahkota di kepala. Proses pengeringan harus dilakukan pada cuaca yang tepat, karena proses pengeringan tidak boleh terlalu panas sehingga cat tidak mengelupas.

Sementara itu, untuk pakaiannya biasanya digunakan kain tenun berwarna-warni atau kain beludru yang dibuat dengan cara dijahit. Pakaian ini kemudian diberi manik-manik dari bahan mute plastik yang mengkilat.

Membuat wayang golek, tidaklah mudah. Untuk membuat wayang yang detailnya tidak terlalu rumit para pengrajin ini dapat membuat/ menghasilkan 3 kepala wayang perhari, sedangkan untuk wayang dengan detail yang rumit bisa membutuhkan waktu hingga 2 hari per satu kepala dan untuk menyelesaikan satu buah wayang dengan segala bentuk dan komplis dengan

Pemasaran

Dalam hal pemasaran wayang golek terdapat peluang-peluang yang cukup prospektif. Menurut penuturan seorang pengrajin, tanpa melakukan promosi pun wayang golek masih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia maupun turis asing. Beberapa negara asal turis asing yang pernah berkunjung dan membeli wayang golek produk Kota Bogor adalah dari Polandia, Belgia, Jepang, dan Belanda. Belgia adalah negara yang baru saja memesan wayang sebanyak 40 buah guna dibawa ke negaranya sebagai souvenir. Orang Indonesia yang akan pergi ke luar negeri pun banyak yang membawa wayang golek sebagai tanda cideramata atau souvenir atau buah tangan bagi negara yang dikunjungi. Maka secara tidak langsung wayang ini telah dikenal sampai ke berbagai negara.

Upaya-upaya promosi telah memberikan manfaat yang besar. Pada umumnya konsumen datang langsung ke tempat pembuatan wayang atau padepokan. Mereka mengetahui tempat pembuatan wayang hasil dari promosi yang dilakukan oleh para pengusaha dan pengrajin melalui pameran-pameran. Di samping itu sering pula datang pesanan dari berbagai instansi dan hotel seperti, Hotel Indonesia yang memesan wayang hingga 200 buah, dan dari Dinas Pariwisata Serang memesan wayang sebanyak 80 buah.

Wayang golek yang diproduksi oleh para pengrajin di Kota Bogor sudah menyebar ke luar negeri, seperti Belanda, Prancis dan Amerika. Jenis wayang golek yang banyak digemari oleh para turis asing adalah tokoh Rama dan Sinta.

Harga jual satu buah wayang golek untuk turis asing adalah sekitar 30 Euro, sedangkan untuk pembeli lokal dengan ukuran 40 cm dijual seharga Rp. 250.000,- dan untuk ukuran 60 cm dijual dengan harga Rp. 400.000,-. Yang membedakan harga wayang yaitu dari ukuran besar kecilnya bentuk wayang, bukan dari kesulitan dalam membuat wayang.

Kelebihan dari pengrajin wayang golek yang ada di Kota Bogor ini adalah tanpa adanya pendidikan khusus ataupun tanpa kursus, semua bisa dikerjakan dengan baik. Semua itu karena kemauan, memiliki jiwa seni yang tinggi, juga karena ketekunan dan kecintaannya terhadap seni pertunjukan wayang golek.

2. Prospek Pengembangan

Perkembangan dunia modern, di satu sisi memberikan dampak negatif bagi keberadaan wayang golek. Dunia hiburan, kini lebih didominasi oleh jenis-jenis kesenian modern, sedangkan pertunjukan kesenian tradisional, termasuk wayang golek, sangat langka. Akan tetapi di sisi lain, perkembangan dunia modern pun telah membuka peluang yang luas kepada para seniman wayang golek untuk berkreasi lebih jauh. Dari segi substansi, lahir lakon-lakon galur dan carangan yang semuanya bersumber dari Cerita Mahabharata dan Ramayana. Dari segi penampilannya, bentuk wayang pun mengalami modifikasi-modifikasi. Bahkan di era modern sekarang ini, pertunjukan wayang golek cukup sarat dengan tampilan-tampilan yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Ini membuktikan, bahwa kesenian wayang tidak anti perubahan. Maka ungkapan “*miindung ka waktu, mibapa ka jaman*” adalah justifikasi yang tidak mengada-ada untuk menyebut epistemologi praksis gaya dalang-dalang modern untuk tetap mempertahankan

eksistensi kesenian wayang golek di tengah-tengah arus tuntutan zaman. Demikian pula faktor wayangnya yang berupa boneka kayu, terus menerus direkayasa sedemikian rupa dengan menggunakan teknik-teknik modern, sehingga boneka kayu itu nampak lebih hidup dan lebih menarik. Sejalan dengan tuntutan itu, maka teknologi pembuatan wayang golek pun semakin maju.

Frekuensi pertunjukan wayang golek yang mulai surut tidak serta merta turut menyurutkan kreatifitas para seniman dan pengrajin wayang golek untuk terus berkreasi memproduksi wayang golek. Ada pangsa lain yang memungkinkan wayang golek tetap eksis, kendatipun sebagai seni pertunjukan ia telah mulai berkurang. Perkembangan dunia pariwisata ternyata telah membuka peluang yang cukup luas bagi pemasaran kerajinan wayang golek. Kini, pembuatan wayang golek dengan kekhasannya lebih banyak diproduksi untuk bahan cenderamata dari tanah Sunda bagi para turis, ketimbang sebagai alat seni pertunjukan.

Geliat dunia pariwisata, yang sempat terpuruk ketika maraknya aksi bom dan terorisme, telah membawa harapan baru bagi pengembangan seni wayang golek. Arus kedatangan wisatawan Nusantara maupun Mancanegara ke Kota Bogor, telah memberikan dampak positif bagi pemasaran wayang golek. Para pengrajin dan pengusaha wayang golek pun kini memiliki harapan baru untuk tetap eksis dan berkembang, kendati pun seni pertunjukan wayang golek sudah mulai langka.

C. Penutup

Kesenian wayang golek yang telah menjadi ciri dan jatidiri orang Sunda telah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang. Pada awal kelahirannya, wayang golek adalah sebagai sebuah

bentuk seni pertunjukan yang memiliki beberapa fungsi, antara lain: fungsi religius, fungsi hiburan, fungsi sosial, dan fungsi penyampaian informasi.

Pada masa penyebaran Islam, kesenian wayang dijadikan sebagai media syiar Islam yang telah terbukti keampuhannya. Melalui media wayang, ajaran-ajaran Islam lebih mudah diterima dan difahami oleh masyarakat di Pulau Jawa yang pada masa itu menganut Agama Hindu. Dalam perkembangan berikutnya, wayang golek juga lazim dipentaskan dalam perayaan khusus seperti khitanan, perkawinan, perayaan karawitan, hari-hari besar, dan penyambutan tamu-tamu Negara. Wayang golek saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat, yang memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lingkungannya, baik kebutuhan spiritual maupun material.

Perkembangan zaman telah memunculkan tuntutan-tuntutan baru bagi umat manusia, termasuk dalam hal pemenuhan akan hiburan. Derasnya arus jenis-jenis kesenian modern yang kini mendominasi dunia hiburan, telah menyisihkan keberadaan seni-seni tradisional. Kesenian-kesenian tradisional, seperti wayang golek pun ikut tersisih dan semakin langka dipertunjukkan.

Namun demikian, ada pangsa lain yang memungkinkan kesenian wayang golek tetap eksis, yakni melalui industri pariwisata. Kesenian wayang golek pun akhirnya mengalami pergeseran fungsi, yang semula sebagai seni pertunjukan, kini lebih berfungsi sebagai cenderamata.

Kendatipun kesenian wayang golek tetap bisa eksis di tengah-tengah arus perubahan zaman, akan tetapi itu pun tidak berarti tanpa kendala. Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah rendahnya minat masyarakat untuk menjadi pengrajin wayang golek.

Ini mengakibatkan langkanya pembuat wayang golek, padahal peminat dan permintaan terhadap wayang golek masih tinggi, terutama para wisatawan asing. Di samping itu orang dalam negeri yang akan pergi ke luar negeri pun sering membawa wayang golek sebagai cinderamata. Keadaan seperti ini seringkali menimbulkan kesulitan bagi sanggar-sanggar atau padepokan-padepokan yang memproduksi wayang golek, maupun para pengusaha kerajinan untuk memenuhi pesanan para klien.

Mengacu pada permasalahan di atas, berikut dikemukakan beberapa rekomendasi:

1. Perlu adanya penginventarisasian para pengrajin dan seniman wayang golek, khususnya di wilayah Kota Bogor.
2. Perlu adanya bimbingan dan penyuluhan manajerial bagi para pengrajin dan pengusaha wayang golek.
3. Perlu diciptakan even-even khusus yang bisa mempromosikan kesenian wayang golek, baik dalam rangka pertunjukan kesenian, maupun pameran-pameran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kota Bogor. Dinas Informasi Kepariwisata dan Kebudayaan. tth. *Bogor Travel Guide*.
- Kurnia, Ganjar. 2003. *Deskripsi Kesenian Jawa Barat*. Bandung: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Barat.
- Suryana, Jajang. 2002. *Wayang Golek Sunda, Kajian Estetika Rupa Tokoh Golek*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Zeitlin, Irving. 1998.

Memahami Kembali Sosiologi.
Yogyakarta: UGM Press.

KERAJAAN TRADISIONAL CIREBON ABAD XV – XIX

Oleh **Adeng**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: bpsntbandung@ymail.com

Abstrak

Kerajaan Tradisional Cirebon atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Islam Cirebon dan akhirnya menjadi Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Kepemimpinan Sunan Gunung Jati misi utamanya adalah pengembangan agama Islam di Tatar Sunda (sek. Jawa Barat), bukan masalah politik atau pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan Islam di Tatar Sunda sangat pesat.

Kata kunci : Kerajaan Cirebon, penyebaran agama Islam.

Abstract

Traditional Empire of Cirebon or more knowledgeable with the title Empire of Islam Cirebon and finally becomes Sultanate of Cirebon tired its the feather in one's cap top when led by Syekh Syarif Hidayatullah or more knowledgeable by the name of Sunan Gunung Jati. Leadership of Sunan Gunung Jati mission is expansion of Islam in Tatar Sunda (West Java), no matter political or government. Therefore, development of Islam in Tatar Sunda very fast.

Keywords: Cirebon Empire, spread of Islam.

A. Pendahuluan

Sebelum terbentuknya *nation* atau bangsa modern, sejarah Indonesia periode itu lebih terkait pada hal-hal yang bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah di Indonesia seolah-olah mempunyai sejarahnya sendiri. Hal ini penting dan sangat menarik untuk diteliti dan digambarkan perkembangan masing-masing sejarah daerah tersebut. Dalam perkembangan itu dapat dilihat persinggungan perjalanan sejarah masing-masing daerah dalam lingkup yang kemudian disebut Indonesia, bahkan

dalam cakupan yang lebih luas lagi seperti Asia Tenggara. Pada abad ke-15 dan ke-16 dalam sejarah di Asia Tenggara dikenal sebagai kurun niaga. Periode itu di kawasan Asia Tenggara ditandai oleh semakin meningkatnya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Ini berarti bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia ketika itu semakin intensif berhubungan baik dengan kerajaan sekitarnya maupun dengan orang-orang Eropa yang mulai berdatangan. Interaksi pun terjadi dengan

bangsa dari berbagai daerah maupun dengan orang-orang Eropa yang mulai berdatangan. Interaksi itu menarik diamati, karena selain kerajaan-kerajaan itu mengakar pada ikatan primordialnya, juga dihadapkan dengan nilai-nilai modern.

Dari sekian banyak kerajaan di Indonesia dalam kerangka seperti di atas adalah Kerajaan Cirebon. Keberadaan Cirebon di dalam mata rantai pelayaran dan perdagangan di Nusantara tidak terlepas dari letak geografisnya berada di pesisir Utara Pulau Jawa. Perlu dijelaskan sebelum berdirinya Kerajaan Cirebon, menurut Carita Purwaka Caruban Nagari (CPCN) (lihat Atja, 1984), di daerah sekitar Cirebon sekarang terdapat pemukiman yang disebut Pasambangan dengan Kota Pelabuhan Muhara Jati. Penguasa daerah tersebut adalah Ki gedeng Jumajan Jati. Sejak awal abad ke-15 Pelabuhan Muhara Jati sudah banyak dikunjungi pedagang Islam yang berasal dari Arab, Cina, Parsi, India, dan lain-lain.

Pada tahun 1415 di Pelabuhan Muhara Jati datang armada Cina, yang dipimpin oleh Laksamana Cenuwa. Lima tahun kemudian (1420) datang juga di Pelabuhan Muhara Jati seorang ulama dari tanah Arab bernama Syekh Datuk Kahfi. Ia mendirikan pesantren di Amparan Jati. Salah seorang murid Syekh Datuk Kahfi adalah Pangeran Walangsungsang, yang kelak pada tahun 1445 membuka sebuah perkampungan di daerah pesisir yang disebut Lemah Wungkuk. Perkampungan ini merupakan cikal bakal Kota Cirebon sekarang.

Perkembangan Islam di Cirebon berikutnya ditandai oleh kedatangan Syarif Hidayatullah, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati pada tahun 1470. Sembilan tahun kemudian (1470), Sunan Gunung Jati ditetapkan sebagai Tumenggung Cirebon

dan tahun 1482 ia memberhentikan *bulubekti* 'upeti' ke Kerajaan Sunda. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan pertanda lahirnya Kerajaan Cirebon.

Kerajaan Cirebon atau disebut pula Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, perkembangannya sangat pesat, seiring dengan keberhasilan syiar Islam ke daerah-daerah, seperti: Luragung, Kuningan, Indramayu, Talaga, dan lain-lain. Keberhasilan tersebut disebabkan adanya dukungan dari Penguasa Islam Demak dan para Wali (tokoh Islam) di Pulau Jawa.

B. Hasil dan Bahasan

Masa Awal Kerajaan Cirebon

Sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam di Cirebon, di daerah sekitar Kota Cirebon sekarang terdapat pemukiman yang disebut Pasambangan dengan pelabuhan utamanya Muhara Jati. Pasambangan terletak 6 km sebelah Utara Kota Cirebon sekarang atau tidak jauh (kurang lebih 1 km) di sebelah utara Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, sedangkan Muhara Jati letaknya di tepi pantai, tidak jauh dari Pasambangan. Menurut Pangeran Arya Carbon (Atja, 1986: 159), di Pasambangan terdapat pasar, sedangkan Muhara Jati merupakan kota pelabuhan (lihat Adeng, Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra, 1998).

Pemimpin atau penguasa pertama pelabuhan Muhara Jati adalah Ki Gedeng Sindang Kasih. Ia adalah saudara Prabu Anggalarang, penguasa (*tohaan*) di Galuh. Sepeninggal Ki Gedeng Sindangkasih, kedudukan sebagai penguasa pelabuhan Muhara Jati digantikan oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati. Sebagai juru labuhan ia menguasai pula daerah pantai Cirebon atau Cirebon pesisir yang disebut dengan nama Cirebon Larang.

Daerah pedalaman Cirebon yang terletak di sebelah utara kaki Gunung Ciremei dan disebut Cirebon Girang dikuasai oleh Ki Gedeng Kasmaya yang juga masih saudara Prabu Anggalarang. Ki Gedeng Jumajan Jati mempunyai seorang anak perempuan bernama Nyai Subang Larang yang kemudian menjadi istri Raden Pamanah Rasa (Prabu Siliwangi). Dari perkawinan mereka lahirlah tiga orang putra, yaitu Raden Walangsung, Nyai Lara Santang, dan Raja Sengara. Kelak Raden Walangsung lebih dikenal sebagai pendiri Kota Cirebon sekarang (Atja, 1986: 117-125).

Kemudian dalam Carita Purwaka Caruban Nagari (CPCN) disebutkan bahwa sejak awal abad ke-15 Masehi Pelabuhan Muhara Jati sudah banyak dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negeri yang umumnya beragama Islam seperti Arab, Parsi, Cina, India, Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa Timur, Madura, dan Palembang. Mereka, baik yang beragama Islam maupun bukan muslim, setiap harinya sering terlibat jual-beli di Dukuh Pasambangan (Atja, 1986: 122, 159).

Dalam Carita Purwaka Caruban Nagari (Atja, 1986), pada tahun 1415 armada Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cenhuwa (Te Ho menurut CPCN; kiranya yang dimaksud adalah Cheng-Ho), Panglima Kung Way-ping (Wa Heng-ping menurut CPCN), disertai oleh Mah-hwan (juritulis), Ong Keng-hong (jurumudi), dan Pey-sin (juritulis) datang ke Muharajati. Kemudian mereka meneruskan kembali perjalanan menuju Majapahit. Dalam perjalanan, mereka singgah di Pasambangan. Di Pasambangan mereka membuat mercusuar (menara) di atas Gunung Amparan Jati sebagai tanda untuk pantai Muhara Jati. Pembangunan mercusuar itu dipersembahkan untuk juru labuhan, yang pada waktu itu dikepalai Ki Gedeng

Jumajan Jati dan sebagai imbalannya diberikan hasil bumi, seperti terasi, garam, beras tumbuk, rempah-rempah, dan kayu jati. Lima tahun kemudian (1420) datang juga di Pelabuhan Muhara Jati seorang ulama dari tanah Arab beserta rombongannya berjumlah 12 orang, terdiri atas 10 orang pria dan 2 orang wanita. Rombongan tersebut dipimpin oleh Syekh Nurjati atau lebih dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi. Di pelabuhan Muhara Jati, ia diterima oleh Ki Gedeng Jumajan Jati. Atas izinnnya, Syekh Datuk Kahfi mendirikan sebuah pesantren di Amparan Jati.

Sunan Gunung Jati: Pendiri Kerajaan/Kesultanan Cirebon

Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, sejak Sunan Gunung Jati berada di Cirebon, terutama setelah menggalang kekuatan dengan Demak serta ditetapkan sebagai Tumenggung Cirebon dan Panetep Panatagama Islam di tanah Sunda, Cirebon berusaha melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Sunda. Sesungguhnya usaha untuk melepaskan diri dari Kerajaan Sunda itu sudah dirintis sebelumnya oleh Pangeran Walangsung, ketika ia menduduki jabatan sebagai Kuwu Cirebon. Namun kedudukan Cirebon masih lemah, sehingga upaya tadi belum dapat diwujudkan. Baru setelah Sunan Gunung Jati memegang tampuk pimpinan, Cirebon merealisasikan keinginannya. Dengan ditetapkannya sebagai Tumenggung pada tahun 1479 dan dengan diberhentikannya *bulubekti* ke Kerajaan Sunda pada tahun 1482, maka hal itu merupakan pertanda bahwa Cirebon sejak itu mulai memerdekakan diri. Mulai saat itu Cirebon menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka, serta berdaulat penuh atas rakyat dan

wilayahnya (Atja, 1986: 37, 131, 168-169).

Mengenai masa awal Kerajaan/Kesultanan Cirebon, berita Portugis memulainya dengan mengatakan "*The Land of Cherimon is next to Sunda; its lord is called Lebe Uca. He is vassal of Pate Rodim, lord of Demak*" (Coetesao, 1944: 183 dalam Edi S. Ekadjati, 1993: 134). Berkaitan dengan itu, Kern (1973: 13-14 dalam Edi S. Ekadjati, 1993: 134) mengatakan bahwa Tome Pires tidak memahami dengan baik orang yang memberikan keterangan kepadanya. Seorang *lebe* adalah seorang yang hidup untuk agama, bukan seorang kepala negeri. Nama Penguasa Cirebon yang sesungguhnya telah ada pada waktu itu tidak disebut oleh Tome Pires. Pada waktu sekarang *lebe* di Priangan dan Cirebon adalah nama pegawai urusan agama di desa. Sejalan dengan itu, Djajadiningrat (1973: 24) berpendapat bahwa sebutan *lebe* itu dalam pemakaian tahun 1513 dan dalam hubungannya seperti di atas harus dipahami menurut bahasa aslinya, yaitu Tamil. Menurut bahasa Tamil, *lebe* berarti seorang pedagang yang beragama Islam. Sejak dahulu kegiatan berdagang dan menjalankan kewajiban agama bisa dilaksanakan bersama-sama. Hanya saja pengetahuan tentang agama di antara para pedagang akan berbeda satu dengan lainnya.

Dengan demikian, yang mungkin ialah bahwa yang menjadi penguasa Cirebon pada masa awal berdirinya adalah seseorang yang datang dari sebelah Timur (Gresik), yang tidak lain adalah Sunan Gunung Jati atau disebut Syekh Syarif Hidayatullah. Mengenal kedatangan Sunan Gunung Jati dari Gresik ditafsirkan oleh Kern (1973: 10, 12), dengan mengatakan bahwa para pendiri Cirebon dari daerah sebelah timur dan kedatangannya ke Cirebon melalui

emigrasi dipimpin. Hal itulah yang menunjukkan pada kita, bahwa abad ke-15 merupakan waktu pendiriannya Kesultanan.

Cirebon menjalin hubungan dengan Demak. Hubungan Cirebon dengan Demak bukan hubungan dalam pengertian yang satu berada di bawah kekuasaan yang lain, melainkan berupa hubungan kekeluargaan. Cirebon tidak pernah diserang atau diduduki oleh Demak, karena Cirebon diperintah oleh raja-raja yang dihormati dan bahkan dipandang keramat oleh penduduk yang beragama Islam di sepanjang pantai Utara Jawa. Dengan demikian, kedudukan antara Cirebon dan Demak pada dasarnya adalah dua negara yang sejajar, yang masing-masing berdaulat atas rakyatnya dan wilayah kekuasaannya. Hal itu dikuatkan oleh catatan Raffles (1817: 136) yang mengatakan bahwa penobatan Pangeran Trunojoyo menjadi Raja Demak dikukuhkan oleh Panembahan Makdum Jati.

Mengenai hubungan kekeluargaan antara Cirebon dengan Demak bisa dilihat dari perkawinan antara putra-putri Demak dengan putra-putri Cirebon.

Selama berada di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, Cirebon berkembang dengan pesat. Pada masa itu dapat dikatakan Cirebon mencapai puncak kejayaannya. R.A. Kern (1973: 21) mengatakan, bahwa Cirebon pernah mengalami masa yang sangat bahagia pada masa awal berdirinya, dapat mengembangkan dirinya dalam suasana yang penuh dengan kedamaian, dan bisa tumbuh dari suatu tempat menetap untuk pertama kalinya menjadi sebuah negara yang makmur.

Sejak tahun 1528, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati dari Nyai Tepasari. Sejak itu Sunan Gunung Jati sendiri lebih meng-

khususkan diri dalam upaya penyebaran agama Islam ke daerah-daerah pedalaman di Jawa Barat sampai dengan wafatnya pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembung Cirebon.

Perkembangan Kerajaan Cirebon

1. Pemerintahan Panembahan Ratu I dan Panembahan Ratu II

Pada kurun waktu antara tahun 1528—1552, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati dengan Nyai Tepasari. Adapun Sunan Gunung Jati sendiri lebih mengkhususkan diri dalam masalah syiar Islam ke daerah pedalaman. Kemudian setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia, yang mewakili pemerintahan Cirebon adalah Fatahillah selama dua tahun. Selanjutnya Pangeran Mas, putra Pangeran Sutarga, menduduki tahta kesultanan Cirebon dengan gelar Panembahan Ratu I (Ekadjati, 1991: 107—108).

Pada masa Panembahan Ratu I, Cirebon tidak lagi melebarkan sayapnya ke daerah-daerah lain, karena pada waktu itu posisi Cirebon terjepit di antara dua kerajaan besar, yaitu Banten di barat dan Mataram di timur. Sebenarnya Cirebon bisa saja diruntuhkan, baik oleh Banten maupun oleh Mataram mengingat kekuatan angkatan bersenjata Banten atau Mataram. Akan tetapi kedua kerajaan tersebut masih menghormati Cirebon. Banten menghormati Cirebon sebagai tahta leluhurnya, yaitu Sunan Gunung Jati, sedangkan Mataram memandang Cirebon sebagai guru dan keramat (Ekadjati, 1991).

Bukan mustahil Cirebon, yang selalu bersahabat dengan Mataram, dalam banyak hal menjadi teladan bagi Mataram. Mungkin Sitinggil yang

terdapat di Keraton Cirebon pada tahun 1625 ditiru oleh Susuhunan untuk keratonnya dan mungkin Makam Keramat Sunan Gunung Jati dipakai sebagai contoh untuk makamnya di Wonogiri. Ketika Sidang Raya Kerajaan berlangsung pada 1636, rupanya Panembahan Ratu yang dituakan dan dihormati datang ke Mataram dengan maksud untuk memperbesar kewibawaan Susuhunan.

Pada masa Panembahan Ratu I, Cirebon lebih dekat dengan Mataram. Sebagai contoh Putri Ratu Ayu Sakhl, yang merupakan kakak perempuan Panembahan Ratu I menikah dengan Sultan Agung Mataram. Dari pernikahan itu, Sultan Agung berputra Susuhunan Amangkurat I. Kelak salah seorang putri Susuhunan Amangkurat I bersuamikan Panembahan Girilaya dari Cirebon (Atja dan Ajatrohaedi, 1986:22; Atja, 1986:72; dalam Edi S. Ekadjati, 1991:112; Tjandrasasmita, 1995:144). Selain itu, menurut F. Dee Haan (1912 :38), juga ditandai dengan dibangunnya kuta (dinding) yang mengitari Keraton Pakungwati. Kuta yang mengelilingi keraton Cirebon itu dibangun kurang lebih pada 1590, yang pembangunannya merupakan persembahan Senapati Mataram terhadap Panembahan Ratu I Cirebon.

Hubungan dengan Mataram, pada mulanya merupakan kekeluargaan dalam suasana persahabatan. Akan tetapi setelah Mataram makin berkuasa, persahabatan itu makin pincang. Sejak tahun 1615 Mataram mulai mencrangkan pengaruhnya di Cirebon. Kemudian pada 1650 secara keseluruhan merupakan bagian Mataram, dengan demikian tidak mengherankan apabila pada 1684 terdapat berita yang mengerikan, bahwa Cirebon hanyalah terdaftar sebagai bagian dari Kerajaan Mataram (Atja, 1972: 29).

Sepeninggalnya Panembahan Ratu I pada 1649, kedudukan sebagai kepala pemerintahan Cirebon digantikan oleh cucunya bernama Pangeran Putra atau disebut juga Raden Rasmi dan bergelar Panembahan Adiningkusuma atau bergelar Panembahan Ratu II. Setelah meninggal dunia, beliau lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Girilaya, karena dimakamkan di sebuah bukit yang bernama Girilaya, letaknya di sebelah timur Wonogiri, Jogjakarta (Atja, 1972: Tedjasubrata, 1966 : 112).

Menurut berita dari Residen Cirebon (pada tanggal 1 Oktober 1684), setelah diangkat menjadi penguasa Cirebon, Panembahan Girilaya beserta kedua puteranya, yaitu Pangeran Martawidjaja (Pangeran Samsudin) dan Pangeran Kartawidjaja (Pangeran Badrudin / Komarudin), dipanggil oleh Susuhunan Amangkurat I untuk berkunjung ke Mataram dalam rangka menghormati pengangkatannya sebagai penguasa Cirebon. Akan tetapi, selepas upacara tersebut Pangeran Girilaya beserta kedua puteranya tidak diperkenankan kembali ke Cirebon oleh Susuhunan Amangkurat I. Hak sebagai raja Cirebon tetap diakui. Hal itu berlangsung selama 12 tahun, sampai Panembahan Girilaya meninggal dunia (Ekadjati).

Tindakan itu merupakan kebijakan politik pemerintahan Susuhunan Amangkurat I terhadap penguasa-penguasa pesisir. Mataram di bawah Susuhunan Amangkurat I berusaha mencurahkan seluruh tenaga untuk dapat mengendalikan penguasa-penguasa di daerah pesisir guna kepentingannya. Cara yang dipergunakan oleh Mataram itu adalah dengan jalan menjadikan penguasa- penguasa pesisir sebagai abdi istana. Hal itu dimaksudkan agar penguasa daerah pesisir yang cenderung bersikap terbuka terhadap pengaruh luar

menjadi kurang membahayakan dan sekaligus kekuasaan mereka bisa diawasi lebih ketat (Burger, 1962:59).

Selama Pangeran Girilaya dan kedua puteranya berada di Mataram, pemerintahan di Cirebon sehari-hari dipegang oleh putra ketiga, yaitu Pangeran Wangsakerta. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pangeran Wangsakerta selalu diawasi dengan ketat oleh orang-orang Mataram, yang ditugaskan oleh Susuhunan Amangkurat I. Hal itu, menjadikan gerak langkah pemerintahan di Cirebon tidak leluasa.

Telah dikemukakan di atas, bahwa Panembahan Girilaya meninggal dunia pada 1662 di Mataram. Ada beberapa inspirasi mengenai sebab meninggalnya, bukan karena kalah dalam perang besar yang bersifat terbuka dan dilandasi aturan perang yang umum bagi para kesatria di Jawa, tetapi akibat hukuman yang dijatuhkan oleh Susuhunan Amangkurat I terhadap Panembahan Girilaya. Hal itu, terbukti makamnya terpisah jauh dari komplek makam Ibunda dan Pamanda Sultan Agung yang berada di sebelah baratnya, dan dari bentuknya yang tanpa atribut makam seorang raja (R.H. Unang, 1983: 138). Sumber kedua, kematian Panembahan Girilaya akibat diracun oleh orang-orang Mataram dalam suasana perjamuan kehormatan yang diadakan untuk Panembahan Girilaya dan kedua puteranya serta seluruh abdi Istana Cirebon yang berada di Mataram (Tedjasubrata, 1966: 113-114 dalam Ekadjati, 1991: 114).

Diketahui, bahwa Panembahan Girilaya menikah dengan putri Sunan Amangkurat I atau sebagai menantunya, seperti yang telah dikemukakan di atas. Begitu pula putera Panembahan Girilaya, yaitu Pangeran Mastawi juga dan Pangeran Kartawidjaja adalah cucu Sunan Amangkurat I. Namun, tindakan

Sunan Amangkurat I terhadap menantu atau lebih-lebih kepada cucunya tidak mencerminkan seorang ayah atau kakek yang baik atau tidak menunjukkan seorang raja yang arif bijaksana, terlebih-lebih ksatria. Padahal Mataram pada waktu dipegang oleh Sultan Agung merupakan suatu kerajaan yang besar dan berwibawa, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Sikap Sunan Amangkurat I demikian, bukan hanya kepada Panembahan Girilaya dan kedua puteranya saja, tetapi juga kepada orang lain. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Thomas Stamford Raffles, antara lain hukuman mati yang dijatuhkan kepada Tumenggung Wira Guna bersama seluruh keluarganya serta pembantu-pembantunya, yang gagal menghancurkan Blambangan, tanpa diteliti terlebih dulu. Kekejaman lainnya adalah kepada mertuanya sendiri, Pangeran Pakih beserta seluruh keluarganya, yang keseluruhannya berjumlah 60 orang, termasuk istri Amangkurat I, yaitu Ratu Pandan, karena membiarkan putra Mahkota Pangeran Adipati Anom menikah dengan seorang anak yatim yang diasuh oleh seorang *mantra*. Kemudian hukuman mati dijatuhkan pula kepada putrinya sendiri, Ratu Brawa yang “main cinta” dengan putra Panembahan Girilaya (tidak disebutkan namanya), jadi dengan cucunya sendiri (Sunardjo, 1983: 132-133).

Sekitar tahun 1677, Raden Trunojoyo mengadakan serangan besar-besaran terhadap Keraton Mataram. Serangan itu bukan saja berhasil menduduki ibukota Mataram, melainkan juga dapat membebaskan kedua Pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Martawidjaja dan Pangeran Kertawidjaja dari cengkraman Sunan Amangkurat I. Selanjutnya Pangeran Cirebon itu dibawa oleh pasukan Raden Trunojoyo ke

Kediri. Dari Kediri kedua Pangeran tersebut diambil oleh utusan Sultan Ageng Tirtayasa ke Banten (Ekadjati, 1991: 115-16; Sunardjo, 1983: 139; Atja, 1988: 10).

Sultan Ageng Tirtayasa rupanya telah mengadakan persetujuan rahasia dengan Raden Trunojoyo sebelum mengadakan penyerangan ke Mataram. Apabila kekuasaan Mataram dapat dikacaulaukan oleh pasukan Raden Trunojoyo, maka Sultan Ageng Tirtayasa akan menuntut Cirebon agar berada di bawah pengaruh Banten. Dengan demikian, setelah istana Mataram diduduki oleh pasukan Raden Trunojoyo, selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa memberikan perlindungan kepada kedua pangeran tersebut melalui Raden Trunojoyo (Atja dan Ekadjati, 1989: 33). Hubungan baik Sultan Ageng Tirtayasa dengan Raden Trunojoyo itu disebabkan keduanya menghadapi musuh yang sama, yaitu Mataram dan Kompeni Belanda.

Menurut catatan Brandes (1911: 24), mereka kembali ke Cirebon, tahun 1678. Dengan pengakuan Sultan Ageng Tirtayasa, maka Pangeran Martawidjaja (Pangeran Samsudin) menjadi Sultan Sepuh/ Kasepuhan yang pertama, Pangeran Kertawidjaja (Pangeran Badrudi/ Komarudin) menjadi Sultan Anom/ Kanoman yang pertama, sedangkan Pangeran Wangsakerta (Raden Godang) menjadi Panembahan Cirebon yang pertama/Sultan Cirebon (Atja, 1988: 10--11). Dengan demikian, Cirebon terbagi menjadi tiga bagian yang pada hakikatnya hasil keputusan politik Banten terhadap Cirebon, maka dimulailah periode yang baru bagi Cirebon, khususnya dalam aspek pemerintahan.

Menurut keterangan P.S. Sulendraningrat dalam bukunya “Sejarah Cirebon”, Sultan Sepuh (Pangeran

Samsudin) pertama kali memiliki tempat Keraton Pakungwati sebagai keratonnya (sekarang sebelah timur Keraton Kasepuhan). Adapun Sultan Anom (Pangeran Badrudin) pertama kali keratonnya bekas rumah pertama Pangeran Cakrabuana. Tempat itu sekarang termasuk kelurahan Lemah Wungkuk Kotamadya Cirebon. Kemudian Sultan Cerbon (Panembahan Cirebon) sementara waktu bertempat tinggal bersama-sama dengan Sultan Sepuh di kompleks Keraton Pakungwati (Sunardjo, 1983: 153).

Terbaginya Cirebon menjadi tiga kesultanan sederajat adalah untuk mengembalikan lagi kebesaran, kewibawaannya semasa dipegang oleh Sunan Gunung Jati atau semasa Panembahan Ratu, karena ketiga Sultan mempunyai konsep yang berbeda-beda. Sementara itu, dampak terpecahnya menjadi tiga kesultanan merupakan sasaran “empuk” bagi Kompeni Belanda, yang selama itu menginginkan Cirebon di bawah mereka.

Oleh karena itu, tidak asing apabila dalam menjalankan pemerintahannya ketiga Sultan lebih banyak berselisih paham atau saling mencurigai ketimbang saling mendukung satu sama lainnya. Hal itu, bagi Kompeni Belanda merupakan kesempatan untuk menjadi pencegah, di balik ada maksud tertentu. Dari situ kekuasaan Belanda menancapkan pengaruhnya di Cirebon dan kekuasaan para Sultan sedikit demi sedikit digerogeti, yang pada akhirnya melikuidasi kekuasaan politik Sultan.

Keadaan Cirebon makin parah dan penguasa-penguasa Cirebon sudah tidak bisa berbuat banyak. Apalagi setelah adanya perjanjian persahabatan antara Pemerintah Tinggi Kompeni di Batavia dengan penguasa-penguasa Cirebon (1681). Secara politis, Cirebon berada di bawah perlindungan kekuasaan

Kompeni. Masalah Cirebon makin rumit dan panjang setelah meninggal dunia Sultan Sepuh I (1697). Harta benda Kasepuhan dibagi dua antara Pangeran Dipati dan Pangeran Aria Adiwidjaja, namun mengenai siapa penguasa yang paling utama di Cirebon, kembali menimbulkan pertentangan sengit, sehingga mengundang pihak Kompeni untuk menjadi penengah lagi.

Pengaruh Kompeni sangat terlihat dalam kontrak tertanggal 4 Agustus 1699, yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, Panembahan Cirebon menempati derajat kedua, dan kedua putera Sultan Sepuh I, yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Aria Adiwidjaja menempati derajat ketiga dalam urusan pemerintahan di Kesultanan Cirebon (Ekadjati, 1991: 123). Dengan demikian di Cirebon ada empat raja, yang lazim disebut Sultan Sepuh, Sultan Anom, Pangeran Adipati Cirebon dan Raja Cirebon, serta Panembahan Cirebon.

Pada tahun 1773 jumlah raja dikurangi lagi menjadi tiga orang setelah Panembahan Cirebon meninggal dunia, karena tidak berputera dan peninggalannya dibagi dua, yaitu kepada Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Kemudian pada tahun 1813, kekuasaan Kesultanan Cirebon dihapus oleh Raffles. Sejak saat itulah sultan- sultan Cirebon hanya berstatus sosial sebagai pemangku adat.

2. Lahirnya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman

Serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Trunojoyo terhadap Keraton Mataram sekitar tahun 1677, setidaknya-tidaknya dapat mempercepat proses lahirnya Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman di Cirebon. Hal itu mengingat serangan

pasukan Trunojoyo tersebut bukan hanya berakibat ibukota Mataram berhasil diduduki pasukan Trunojoyo, melainkan juga kedua Pangeran Cirebon (Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya) dapat dibebaskan dari cengkraman Susuhunan Amangkurat I. Selanjutnya kedua Pangeran Cirebon itu dibawa oleh pasukan Trunojoyo ke Kediri sebelum akhirnya diambil oleh utusan Sultan Banten. Dengan demikian, penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan Trunojoyo terhadap Keraton Mataram tersebut merupakan suatu peristiwa yang melatarbelakangi proses beralihnya Pangeran-pangeran Cirebon dari tangan Susuhunan Amangkurat I kepada Raden Trunojoyo.

Diselamatkannya Pangeran-pangeran Cirebon oleh Raden Trunojoyo disebabkan sebelumnya telah ada kesepekatan antara Raden Trunojoyo dengan Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang mengatakan bahwa Banten akan membantu Trunojoyo dengan senjata dan perbekalan. Selain itu apabila kekuasaan Mataram dapat dikacaulaikan oleh pasukan Trunojoyo, maka Sultan Ageng Tirtayasa akan menuntut Cirebon agar berada di bawah pengaruh Banten. Dengan demikian, setelah istana Mataram diduduki pasukan Trunojoyo, selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa memberikan perlindungan kepada pangeran-pangeran Cirebon melalui Raden Trunojoyo (Atja dan Edi S. Ekadjati, 1989: 33). Hubungan baik antara Trunojoyo dengan Sultan Ageng Tirtayasa itu disebabkan keduanya menghadapi musuh yang sama, yaitu Mataram dan Kompeni Belanda.

Selama berada di Kediri, Pangeran-pangeran Cirebon mendapat perlakuan baik dari Raden Trunojoyo. Pangeran Wangsakerta yang melihat keadaan kedua orang kakaknya seperti itu, lalu berusaha membebaskannya. Pangeran Wangsakerta mengetahui

bahwa antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Raden Trunojoyo telah terjalin hubungan yang erat, maka jalan yang bisa ditempuh adalah meminta bantuan kepada Sultan Ageng Tirtayasa agar turut mengusahakan pembebasan kedua orang kakaknya itu. Ternyata permintaan Cirebon itu ditanggapi dengan baik oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Segera Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan Kiai Nara dengan sejumlah kapal layar berikut hadiah-hadiah dan surat kuasa untuk Raden Trunojoyo. Utusan-utusan Banten itu diterima dengan baik. Raden Trunojoyo mengabulkan permohonan mengenai pembebasan dua pangeran Cirebon oleh Banten. Pangeran-pangeran Cirebon itu tiba di Banten sekitar awal Oktober 1677. Di ibukota Banten, pangeran-pangeran Cirebon itu diterima oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan penuh kehormatan dan dalam suatu upacara kebesaran. Pada kesempatan itu pangeran-pangeran Cirebon mendapat anugerah gelar Sultan. Sebelum kembali ke Cirebon, pangeran-pangeran Cirebon tersebut dilantik terlebih dahulu oleh Sultan Ageng Tirtayasa sebagai penguasa Cirebon.

1. Pangeran Martawijaya dilantik sebagai Sultan Sepuh dengan gelar Sultan Muhammad Samsudin.
2. Pangeran Kartawijaya dilantik sebagai Sultan Anom dengan gelar Sultan Muhammad Badridin.
3. Pangeran Wangsakerta dilantik sebagai Panembahan Cirebon.

Kemudian Sultan Muhammad Samsudin Martawijaya memperoleh dua buah payung kebesaran berwarna putih, Sultan Muhammad Badridin Kartawijaya memperoleh dua buah payung kebesaran berwarna kuning, dan Pangeran Wangsakerta memperoleh dua payung berwarna hijau (Atja dan Edi S. Ekadjati, 1989: 33-34). Menurut Babad Cirebon Edisi Brandes (lihat Edi S. Ekadjati,

1978) pangeran-pangeran Cirebon itu setelah dilantik di Banten, kemudian kembali ke Cirebon dan tiba pada tahun 1678.

Sebenarnya perlakuan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Cirebon tersebut sama saja dengan perlakuan yang pernah dibuat oleh Sultan Mataram terhadap Cirebon di masa sebelumnya, yaitu sebagai vasal atau raja taklukan. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan mengenai penguasa Cirebon oleh dua kekuatan tadi. Pada saat Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram, terutama dalam kurun waktu antara tahun 1650-1677, penguasa Cirebon diharuskan tinggal di ibukota Mataram sebagai akibat politik yang diterapkan oleh Susuhunan Amangkurat I. Sedangkan pada saat Cirebon di bawah pengaruh Banten, terutama dalam kurun waktu antara tahun 1677-1680, penguasa Cirebon tidak diharuskan tinggal di Banten. Meskipun perlakuan Banten yang agak longgar terhadap Cirebon jika dibandingkan dengan belenggu Mataram, namun hal itu sama sekali tidak dapat memulihkan kembali kekuasaan yang sudah diperlemah sebelumnya, bahkan sebaliknya kekuasaan Cirebon semakin lemah lagi sejak diberlakukannya kosep dua sultan. Tiap sultan memiliki wilayah kekuasaan masing-masing dan mendirikan keraton sendiri-sendiri sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal resmi sultan. Maka muncullah Kesultanan Kasepuhan dengan Keraton Kasepuhan sebagai pusat kegiatan pemerintahannya dan Kesultanan Kanoman dengan Keraton Kanoman sebagai pusat kegiatan pemerintahannya. Semua itu menyebabkan pecahnya Cirebon atas dua kesultanan yang masing-masing berdiri sendiri, yakni Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman.

Selain adanya pengaruh dari luar, timbulnya perpecahan di Cirebon kiranya disebabkan juga oleh kedudukan ketiga putra Panembahan Girilaya yang tidak sama (tidak sekandung). Panembahan Girilaya dari perkawinannya dengan seorang putri Mataram hanya berputra dua orang anak laki-laki. Yang tua bernama Pangeran Martawijaya dan yang muda bernama Pangeran Kartawijaya. Dari istrinya yang lain Panembahan Girilaya mempunyai beberapa orang anak, salah satu di antaranya adalah Pangeran Wangsakerta (Tedjasubrata, 1966: 112).

Dengan kedudukannya yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan setelah Panembahan Girilaya meninggal dunia, ketiga putranya menghendaki kekuasaan, sehingga akhirnya Cirebon pada tahun 1677 terpecah menjadi dua daerah kesultanan, yaitu Kasepuhan dan Kanoman, di samping Panembahan.

Akhir Kerajaan Cirebon

Semenjak Mataram muncul sebagai kekuatan baru di Jawa Tengah, terutama ketika berada di bawah kekuasaan Susuhunan Amangkurat I, kedudukan politik penguasa Cirebon semakin terancam. Keadaan itu lebih diperburuk lagi dengan diangkatnya pangeran-pangeran Cirebon sebagai sultan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Dengan demikian, sebelum kekuasaan Kompeni Belanda berada di Cirebon, sebenarnya kedudukan politik penguasa-penguasa Cirebon sudah lemah. Sejak Kompeni Belanda menancapkan pengaruhnya di Cirebon, kekuasaan para sultan di Cirebon sedikit demi sedikit dikurangi.

Masuknya kekuasaan Kompeni Belanda di Cirebon diawali dengan adanya suatu perjanjian persahabatan antara Pemerintah Tinggi Kompeni Belanda di Batavia dengan para penguasa

Cirebon. Diadakannya perjanjian persahabatan itu disebabkan kebencian Cirebon terhadap Mataram yang telah menahan Panembahan Girilaya beserta kedua orang putranya di Istana Mataram (Edi S. Ekadjati, 1978: 59). Dalam perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1681 itu, pihak Kompeni diwakili oleh Yacob Van Dyck dan Jochem Michielse, sedangkan wakil dari pihak Cirebon ialah Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, Panembahan Cirebon I, dan enam orang lainnya yang termasuk ke dalam kelompok Jaksa Pepitu, yaitu Raksanegara, Anggadira, Anggadiprana, Anggaraksa, Nayapati, dan Singanagara. Hasil perjanjian persahabatan itu menyatakan bahwa Cirebon sejak itu berada di bawah perlindungan kekuasaan Kompeni. Disebutkan pula bahwa pada waktu itu Cirebon bukan lagi sebagai *vazal*, melainkan sebagai sahabat Susuhunan Mataram (Atja dan Edi S. Ekadjati, 1989: 34-35).

Perjanjian persahabatan antara Kompeni dengan Cirebon mengakibatkan pula hak-hak monopoli perdagangan lebih banyak dikuasai Kompeni. Pemerintah Kompeni di Batavia memperoleh hak-hak monopoli atas impor kapas dan candu, ekspor lada, kayu, gula, beras, dan produk-produk lainnya yang dikehendaki oleh Kompeni (Edi S. Ekadjati, 1993: 164).

Dalam menjalankan pemerintahannya, para penguasa Cirebon lebih banyak berselisih paham, sehingga dipandang dari sudut kepentingan Kompeni tidak banyak membawa keuntungan, maka Pemerintah Tinggi Kompeni di Batavia mengutus Francois Tack untuk mengadakan pembenahan atas masalah-masalah yang hangat di Cirebon. Pada tanggal 3 November 1685 Francois Tack berangkat dari Batavia menuju Cirebon. Setibanya di Cirebon masalah yang

pertama kali diatasi ialah meredakan pertikaian di antara penguasa-penguasa Cirebon. Kemudian pada tanggal 4 Desember 1685 ditandatangani suatu perjanjian baru antara Kompeni dengan Cirebon. Pihak Kompeni diwakili oleh Francois Tack, sedangkan dari pihak Cirebon oleh Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Pangeran Tohpati atau Panembahan Cirebon I. Surat perjanjian tersebut dibuat 4 buah yang berkekuatan sama, yang masing-masing pihak yang menandatangani memperoleh sebuah surat. Salah satu keputusan penting dari perjanjian itu menyatakan bahwa dalam hubungan yang sifatnya keluar, Cirebon diwakili oleh syahbandar, yaitu Tumenggung Raksanagara. Hal itu dimaksudkan agar perpecahan yang terjadi di Cirebon tidak diketahui pihak asing. Selain itu, disebutkan juga mengenai adanya tujuh orang majelis yang terdiri atas tiga orang bawahan Sultan Sepuh, dua orang bawahan Sultan Anom, dan dua orang lagi bawahan Panembahan Cirebon (Atja dan Edi S. Ekadjati, 1989: 35-36).

Pada waktu Francois Tack mengadakan pendekatan terhadap penguasa-penguasa Cirebon yang sedang berselisih paham, ternyata sikapnya lebih condong kepada Sultan Anom. Hal itu menimbulkan kecurigaan bagi yang lainnya. Kecurigaan itu lama-kelamaan mengakibatkan timbulnya kembali pertikaian di antara para penguasa Cirebon. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Tinggi Kompeni di Batavia mengirimkan Johannes de Hartog. Pada tanggal 8 September 1688 diadakan kontrak persetujuan antara Johannes de Hartog yang mewakili pihak Kompeni dengan penguasa-penguasa Cirebon, yaitu Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, Panembahan Cirebon I, Pangeran Dipati Anom (putra tertua Sultan Sepuh I), dan 12 orang mantri yang terdiri atas lima

orang bawahan Sultan Sepuh I, empat orang bawahan Sultan Anom I, dan tiga orang bawahan Panembahan Cirebon I. Kedua belas orang mantri itu secara berurutan ialah: Raksanagara, Raksawinata, Suradimarta, Aria Raksadipura, Raksadimanggala, Aria Suradimanta, Suradinata, Mantejagara, Natagara, Raksamanggala, Lingganata, dan Wiratmaka. Akan tetapi persetujuan itu tidak membawa hasil, terlebih pada tahun 1797, pada masa Sultan Sepuh I. Masalah yang terjadi di Kesultanan Cirebon pun semakin panjang. Masalah baru muncul, yaitu mengenai siapa yang lebih berhak menempati kedudukan yang ditinggalkan oleh Sultan Sepuh I. Keadaan yang demikian itu merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Kompeni untuk semakin dalam menanamkan pengaruhnya di Cirebon. Pengaruh Kompeni yang begitu jauh terhadap Cirebon dapat dilihat di dalam kontrak tertanggal 4 Agustus 1699, yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, Panembahan Cirebon menempati derajat kedua, dan putra Sultan Sepuh I, yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Aria Adiwijaya, menempati derajat ketiga dalam daftar urutan kepemimpinan pemerintahan Cirebon. Selanjutnya pergeseran derajat dengan pola yang sama terus terjadi pada penguasa-penguasa Cirebon seperti pada saat meninggalnya Sultan Anom I tahun 1702 dan Panembahan Cirebon I tahun 1715. Sejak dikeluarkan sistem baru tahun 1752, yang menyatakan bahwa pergantian tahta berdasarkan warisan dari ayah kepada anak bagi tiap-tiap raja ditetapkan atas dasar persetujuan Kompeni, maka melalui surat itu kekuasaan Sultan-sultan Cirebon benar-benar dikurangi (Atja dan Edi S. Ekadjati, 1989: 37-39). Tampak sekali bahwa sejak Kompeni Belanda

menanamkan pengaruhnya di Cirebon tahun 1681 secara lambat-laun kedudukan politik para sultan Cirebon semakin menurun.

Telah disebutkan bahwa Cirebon mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Kebesarannya di masa lampau sampai saat ini masih bisa dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung, yang setiap waktu ziarah ke Gunung Sembung tempat Sunan Gunung Jati dimakamkan, terutama setiap malam Jum'at Kliwon. Selain itu, pengaruh kharisma Sunan Gunung Jati terhadap para Sultan Cirebon yang sampai sekarang masih bisa dilihat, ialah pada saat berlangsungnya upacara peringatan hari Maulud Nabi Muhammad Saw. Upacara tersebut pada masyarakat Cirebon lebih dikenal dengan nama Panjang Jimat.

Berkaitan dengan hal di atas, hingga saat ini masih terdapat kelompok kesenian tradisional tertentu yang mengadakan kunjungan ke sultan-sultan Cirebon dengan maksud untuk mendapat ijin dan mohon doa restu dalam rangka pertunjukannya.

Kharisma yang dimiliki oleh sultan-sultan Cirebon ternyata merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sultan-sultan Cirebon masih dianggap sebagai pemangku adat, meskipun kekuasaan politik sudah tidak dimilikinya lagi sejak tahun 1813, yaitu ketika Raffles mencabut hak dan kewajiban sultan-sultan Cirebon untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Meskipun sultan-sultan tidak lagi mempunyai kekuasaan politik, namun mereka tetap berusaha untuk dapat melestarikan kekharismaan yang telah diturunkan leluhur mereka. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan agar hubungan *kawula – gusti*, yaitu hubungan rakyat dengan raja/sultan tetap berjalan seperti masa-masa sebelumnya.

Setelah kekuasaan Kesultanan/Kerajaan Cirebon dihapuskan oleh Raffles tahun 1813, sultan-sultan Cirebon hanya berstatus sosial sebagai pemangku adat.

C. Penutup

Cikal bakal berdirinya Kerajaan Tradisional Cirebon atau disebut pula Kesultanan Cirebon berawal dari adanya pernikahan Pangeran Cakrabumi atau disebut Haji Abdullah Iman Al Jawi dengan putri Ki Gedeng Alang-Alang yang menjadi Kuwu di Dukuh Lemah Wungkuk. Putri Ki Gedeng Alang-Alang bernama Nyai Retna Riris setelah menikah berganti nama menjadi Nyai Larang Kencana. Haji Abdullah Iman menjadi Kuwu Dukuh Lemah Wungkuk menggantikan mertuanya (Ki Gedeng Alang-Alang) yang meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1452, Haji Abdullah Iman mendirikan sebuah Keraton di Dukuh Carbon (sekarang Cirebon) bernama Keraton Pakungwati. Walaupun telah berdiri sebuah keraton, namun segala sesuatunya termasuk roda pemerintahannya masih di bawah kendali Kerajaan Sunda.

Baru setelah timbulnya kekuasaan politik Islam di Cirebon dan Sunan Gunung Jati menancapkan bendera Islam atau mendirikan sebuah Kerajaan Tradisional Cirebon yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Islam Cirebon, maka Cirebon melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sunda, begitu pula kewajiban tiap bulan seperti upeti diberhentikan. Dengan demikian, Kerajaan Tradisional Cirebon telah berdiri sendiri, tidak lagi di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda.

Perkembangan Kerajaan Tradisional Cirebon sangat pesat seiring dengan perkembangan agama Islam. Hal ini terlihat dari perluasan wilayah dengan waktu yang relatif singkat pada daerah Luragung, Kuningan, Majalengka, dan

sebagainya, telah dikuasai dan penduduknya banyak yang pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam. Pada masa ini dapat dikatakan Cirebon mencapai puncak kejayaannya.

Setelah dipegang oleh putranya dan seterusnya, Kerajaan Tradisional Cirebon mengalami kemunduran. Terlebih-lebih setelah Cirebon dibagi menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Tiap Sultan memiliki wilayah kekuasaan masing-masing dan mendirikan keraton sendiri-sendiri sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal resmi sultan. Akhirnya Cirebon terpecah-pecah dan menjadi lemah karena di dalam menjalankan roda pemerintahannya timbul perbedaan paham. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk memancing di air keruh. Dengan masuknya pihak ketiga, yakni Belanda, dua kesultanan di Cirebon makin terpuruk. Pada akhirnya nasib dua kesultanan yang semula mempunyai wibawa dan disegani, sekarang oleh pihak Belanda dijadikan sebagai pemangku adat belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng et al. 1998.
Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Atja. 1972.
Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, Bandung: Ikatan Karyawan Museum
- . 1986.
Carita Purwaka Caruban Nagari. Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

- _____. 1988.
Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Cirebon: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- _____. dan Edi S. Ekajati. 1989.
Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara I. Suntingan Naskah dan Terjemahan. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda.
- Burger, D.H. dan Prajudi. 1962.
Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jakarta: Pradnjaparamita.
- Ekadjati, S. Edi. 1978.
Babad Cirebon Edisi Brandes Tinjauan Sastra dan Sejarah. Bandung: Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran.
- _____. 1991.
Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bandung: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- _____. et al. 1993.
Peta Sejarah Jawa Barat. Jakarta: Depdikbud. Proyek IDSN.
- de Haan, F. 1911-1912.
Priangan: De Preanger Regentschappen Onder het Nederlandsch Bestuur Tot 1811. 4 Vol. Batavia: Kolff.
- Kern, R.A. dan Hoesen Djajadiningrat. 1973.
Masa Awal Kerajaan Cirebon. Jakarta: Bharatha.
- Sunardjo, RH Unang. Tth
Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintah Kerajaan Cirebon 1479-1809.
- Tedjasubrata. 1996.
"Sedjarah Tjirebon" *Kawedar Bahasa Daerah Tjirebon*, Djilid II, Tjirebon.
- Tjandrasasmita, Uka. 1995.
Bandar Cirebon dalam Jaringan Pasar Dunia. Makalah Diskusi Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jarahnitra, Proyek IDSN.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL DAN DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT KASEPUHAN CICARUCUB KABUPATEN LEBAK-BANTEN

Oleh Yudi Putu Satriadi

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: yudiputusatriadi@yahoo.com

Abstrak

Untuk mencegah terjadinya konflik akibat stratifikasi sosial, memerlukan suatu penanaman pengertian terhadap sikap masyarakat. Pemberian pengertian ini, di antaranya dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa yang membuat perbedaan kelas sosial dalam masyarakat adalah atas kehendak Allah. Sebenarnya, kesadaran seperti ini sudah terjadi di dalam masyarakat tradisional dengan selalu mencontoh dan melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh leluhur mereka.

Salah satu contoh tentang kesadaran masyarakat dapat mencegah konflik sosial ditemukan di Kasepuhan Cicarucub. Kondisi ini muncul sebagai upaya pemimpin formal dan informal yang berhasil memadukan hukum formal dengan hukum adat. Perpaduan ini terbukti dapat menciptakan suatu situasi masyarakat yang harmonis dengan tetap menjunjung kedua hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci : Stratifikasi sosial, bibit konflik, pendekatan tradisional.

Abstract

To prevent conflict of social stratification be happened, need a treatment to toward community attitude. This treatment takes form in a way on how to create community consciousness to make them realize that their faith is determined by God. Actually, this self consciousness has occured in traditional community which takes form in blessing from the ancestors.

One of the examples on how community consciousness can prevent social conflict is found in Kasepuhan Cicarucub. This condition emerges as a result of good work conducted by both formal leader and informal leader. They always try to create a harmonius situation in community by putting formal law and traditional law as the main guidance.

Keywords: Social stratification, conflict seed, traditional approach.

A. Pendahuluan

Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat dikenal dengan istilah pelapisan sosial '*social stratification*'. Masih menurut Pitirim A. Sorokin,

pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarchis*). Di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi,

sedang, ataupun kelas-kelas rendah (Soekanto, 1982: 220).

Menurut Leibo (1994:59), timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya berbarengan dengan proses pertumbuhan masyarakat, ada pula yang sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diinginkan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Ada beberapa ukuran atau kriteria umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelapisan sosial pada masyarakat yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan.

Mengingat pelapisan sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya, maka pembeda tersebut akan menimbulkan dampak pada perilaku anggota masyarakat. Berdasarkan uraian di atas masalah pelapisan sosial dalam masyarakat dinilai sangat penting untuk dibahas, maka untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pelapisan sosial tersebut.

Kasepuhan Cicarucub yang berada di wilayah Kampung Cicarucub Desa Neglasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten merupakan kampung adat yang ditandai dengan adanya pemimpin adat yang disebut *olot*, serta adanya norma-norma adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat pendukungnya. Hal yang paling menarik dari desa tersebut adalah dalam komposisi bangunan rumah.

Dengan bertitik tolak pada kenyataan mengenai bentuk rumah yang ada pada tiap lingkaran zona serta kepemilikan barang-barang pada rumah lainnya, dimungkinkan adanya pelapisan sosial, baik dalam kekayaan, hak dan kewajiban, serta kedudukan dalam masyarakat.

Berdasarkan gambaran mengenai komposisi rumah masyarakat di

Cicarucub tersebut, timbul beberapa permasalahan seputar pelapisan sosialnya yang perlu dicermati, yaitu: corak dan dinamika pelapisan sosial; perpindahan atau mobilitas pelapisan sosial; dan dampak sistem pelapisan sosial terhadap keharmonisan kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Ruang lingkup spasial adalah Kasepuhan Cicarucub Desa Neglasari Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Adapun ruang lingkup variabel sasaran utamanya adalah masyarakat Cicarucub, dengan fokus dipusatkan pada kehidupan masyarakat Kasepuhan Cicarucub.

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan data yang relevan serta pelaksanaan penelitian yang terarah dan efektif, maka diperlukan pendekatan yang sesuai.

Penelitian diawali dengan studi pustaka, yakni dengan mencatat sejumlah pustaka dan dokumen tertulis lainnya yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Untuk memperoleh data yang lengkap, yaitu kesatuan yang utuh, menyeluruh/terintegrasi digunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkap fakta-fakta berdasarkan fenomena sosial yang timbul, yang selanjutnya diformulasikan dan dideskripsikan. Dengan demikian, akan dapat digambarkan struktur dan dinamika-dinamika yang berhubungan dengan pelapisan sosial pada masyarakat Desa Cicarucub yang menjadi sasaran penelitian.

Luas keseluruhan Kampung Cicarucub sekitar 441,5 hektar dengan penggunaan sebagai berikut: tanah untuk pemukiman seluas 8 hektar; persawahan 120 hektar, 100,5 berupa tegalan, 212 hektar digunakan untuk perkebunan, dan 1 hektar berupa kolam ikan.

B. Hasil dan Bahasan

1. Pelapisan Sosial Berdasarkan Ekonomi

Sangat sulit untuk menentukan secara pasti dalam hitungan matematis untuk memastikan kriteria golongan ekonomi. Namun demikian, penentuan tersebut sekalipun bersifat subjektif berupa pandangan, pendapat, dan prasangka seseorang tentang kekayaan orang lain dapat dijadikan ukuran tentang keberadaan pelapisan ekonomi di Kasepuhan Cicarucub. Menurut pandangan masyarakat setempat, yang dikatakan orang kaya atau *jelema beunghar* adalah orang yang memiliki rumah, sawah, dan kendaraan. Sudah barang tentu kepemilikan kekayaan tersebut disebabkan oleh penghasilan atau pendapatan yang besar, yang diperoleh dengan berbagai usaha.

Guna melihat kondisi *jelema beunghar* berdasarkan kepemilikan rumah, perlu dideskripsikan mengenai kondisi dan komposisi rumah-rumah yang ada di Kasepuhan Cicarucub. Komposisi rumah yang berada di Kasepuhan Cicarucub diklasifikasikan sebagai berikut: Zona inti, terdapat rumah adat yang dihuni oleh pemimpin adat atau *Olot*; zona berikutnya adalah rumah-rumah yang dihuni oleh keturunan atau anak *Olot*; dan zona luar atau zona ketiga adalah rumah bebas yang dihuni oleh kerabat *Olot* atau orang lain yang tidak terkait kerabat dengan *Olot*. Bentuk rumah tiap-tiap zona menurut pada aturan adat yang berlaku di Kasepuhan Cicarucub, yakni : zona pertama terletak pada tempat paling tinggi, ditempati oleh rumah adat, tempat diam *Olot* beserta keluarganya, rumah adat lain yang berada di sampingnya yang ditinggali oleh *juru basa* atau *kuncen*; zona kedua adalah rumah-rumah yang dihuni oleh keturunan *Olot* yang berjumlah dua belas rumah.

Rumah di zona pertama yang merupakan rumah adat, terikat sangat ketat oleh aturan adat. Rumah di zona kedua bentuknya seragam, yakni secara garis besar sama dengan rumah di zona pertama, yaitu harus menggunakan bahan-bahan bangunan yang tidak mengandung unsur tanah atau semen, kecuali pada bagian teras/beranda menggunakan bahan semen dan bagian atas boleh menggunakan seng serta boleh menggunakan alat penerangan listrik dan menggunakan peralatan elektronik. Perumahan di luar dua zona itu sama sekali tidak terikat oleh aturan adat.

Pemilik berbagai bentuk rumah tersebut semuanya menuju pada tiga dimensi, yakni untuk pencapaian kekuasaan, *privelese*, dan prestise. *Olot* dan *juru basa* yang mendiami rumah adat mematuhi ketentuan adat tentang bangunan adat dan mempertahankan bentuk tersebut semata-mata untuk mewujudkan kekuasaan, *privelese*, dan prestise.

Pelapisan sosial berdasarkan faktor ekonomi tidak hanya dicerminkan oleh bentuk rumah melainkan oleh kepemilikan tanah, baik tanah sawah, kebun maupun tanah lainnya. Kepemilikan tanah tersebut diperoleh dengan berbagai cara, baik dari warisan orang tuanya atau membeli sendiri.

Golongan masyarakat yang memiliki gunung biji emas dan memiliki pabrik pengolahannya dipandang sebagai orang yang sangat kaya. Dengan demikian, sangat berbeda keadaan/kekayaan para pemilik tambang emas dibandingkan dengan penduduk lainnya.

Jenis mata pencaharian lainnya yang mencerminkan kepemilikan uang adalah pekerja yang bekerja di luar Kasepuhan Cicarucub dan bekerja di sektor nonpertanian pada berbagai bidang, seperti sopir, pegawai hotel, dan pegawai swasta lainnya. Mereka

dipandang kaya karena pekerjaan mereka langsung mendapatkan uang secara berkala tiap bulan atau tiap minggu.

Pengguna telepon genggam (*hand phone*) dipandang sebagai orang kaya oleh penduduk Kasepuhan Cicarucub, sekalipun barang ini bukanlah barang yang aneh dan langka bagi kebanyakan orang. Namun, penduduk Kasepuhan Cicarucub akan memandang lebih pemilik dan pengguna telepon genggam. Pemilik telepon genggam dipandang sebagai orang yang selalu bepergian ke luar kasepuhan dan sering berhubungan dengan orang lain, dan hal itu jarang dilakukan oleh penduduk kasepuhan lainnya.

2. Pelapisan Sosial Berdasarkan Usia

Di Kasepuhan Cicarucub sebagai sebuah desa yang masih erat memegang tradisi para orang tuanya, pelapisan berdasarkan usia masih ada bahkan menunjukkan keberlangsungan yang sangat lama. Pendapat ini sangat dimungkinkan, dengan alasan bahwa kewibawaan orang tua harus ditunjukkan dengan adanya pelapisan berdasarkan usia. Walau bagaimana pun kedudukan orang tua harus ditempatkan pada posisi di atas anak-anak. Berkat orang tua lah seorang anak ada dan berhasil menjadi manusia. Bahkan untuk memperjelas tingkatan orang tua dengan anak-anak, banyak aturan yang menyekat antara hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya, bahkan ada yang berwujud *pamali* atau tabu yang sifatnya dogmatis, si anak tidak boleh bertanya tentang hal yang ditabukan. Namun, tabu-tabu tersebut sekalipun tidak diketahui alasan yang pasti, bagi si anak kebaikan yang terkandung di dalamnya tidak disangsikan lagi.

Dalam lingkungan keluarga, terdapat aturan-aturan yang intinya bermuara pada pengkhususan orang tua,

terutama bapak. Terkadang larangan tersebut disampaikan melalui media *pamali* atau tabu, sebab anak-anak tidak baik terlalu banyak bertanya kepada orang tua. Dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang tua, terasa ada kesan otoriter. Namun cara-cara itulah yang dianggap paling efektif dalam membentuk kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya.

Dalam hal makan pun terdapat pelapisan sosial berdasarkan usia. Anak dilarang memakan makanan yang diperuntukkan bagi orang tua, terutama bapak. Bapak dengan usianya dijadikan figur yang harus dihormati dan dikhususkan. Dengan bercermin kepada bapak, diharapkan anak-anak dapat bercermin akan kesungguhan bapaknya dalam menafkahi anak-anaknya serta tanggung jawabnya dalam melangsungkan keharmonisan keluarga. Makanan yang dianggap istimewa, seperti daging akan didahulukan untuk bapak, anak-anak akan memakan kelebihan daging yang telah dimakan oleh bapaknya.

Dalam hal bersikap terhadap orang tua, anak *pamali* untuk menyebut nama orang tuanya. Jika ada anak yang berbuat demikian disebut *culangung* (tidak sopan). Orang tua yang melihat kelakuan tersebut akan menghardik dengan nada keras dan memberitahukan cara-cara yang sopan dalam memanggil orang tua. Oleh sebab itu di Kasepuhan Cicarucub tidak ada seorang anak pun yang memanggil orang tuanya dengan memanggil namanya. Anak *pamali* memegang kepala orang tuanya. Anak yang berbuat demikian dikatakan *calutak* (tidak tahu adat). Anak yang berbuat demikian akan diberi sanksi yang tegas, mungkin berupa pemukulan peringatan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan. Demikian juga dengan *pamali* apabila anak memakai pakaian orang tuanya. Istilah yang menunjukkan

pementingan akan hal ini sampai muncul istilah khusus yaitu *nurunkeun* 'menurunkan' bila pakaian yang sudah tidak terpakai oleh orang tua diberikan kepada anaknya dan anaknya tidak berhak untuk menolak pemberian itu. Bila menolak pemberian itu, anak akan disebut sebagai anak yang tidak tahu diri.

Pada saat akan menyelenggarakan acara hajatan atau acara penting lainnya, peran orang tua sangat dominan dan bahkan jadi penentu. Orang yang akan melaksanakan acara akan meminta saran atau nasihat kepada orang tua, mulai dari penentuan hari terkadang sampai pada hal-hal yang sifatnya teknis, bahkan tidak jarang nama orang tua dicantumkan sebagai orang yang turut mengundang. Pada saat pelaksanaan hajatan atau syukuran, orang tua diharapkan hadir untuk menyaksikan persiapan-persiapan yang dikerjakan tanpa boleh melakukan pekerjaan. Mereka hanya duduk menyaksikan dan mengatur orang-orang yang bekerja.

Pada kegiatan kemasyarakatan dalam pemilihan kepengurusan lingkup RT dan RW, yang menjadi nominator dalam kepengurusan adalah orang tua sebab penunjukkan tersebut, selain bentuk penghargaan terhadap orang tua, juga para orang tua dinilai banyak pengalaman serta mampu berbuat adil dalam pengambilan keputusan penting. Jika orang tua yang ditunjuk tidak bersedia menjadi pengurus dengan alasan kesehatan, barulah kaum muda menggantikan posisinya dan orang tua tersebut tetap ditempatkan pada posisi penting yang tidak terlalu menggunakan aktivitas fisik, seperti pada posisi penasihat atau sebagai sesepuh.

Di Kasepuhan Cicarucub, bentuk pengkhususan lain tampak pada sebutan pemimpin adat di kasepuhan yang disebut *olot* yaitu kependekan dari *kolot* yang berarti tua padahal sebenarnya *olot*

ini tidak selalu berusia tua. Sebutan ini bukan hanya oleh masyarakat Kasepuhan Cicarucub, melainkan oleh orang-orang yang mempertuakan pemimpin adat tersebut yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar luas sampai ke daerah Banten dan sekitarnya. Sama halnya dengan orang yang dipanggil *olot* akan merasa senang. Dalam dirinya muncul perasaan bahwa dirinya sudah *mumpuni* atau cukup banyak pengalaman dan ilmu. Selanjutnya, orang-orang yang dipanggil *olot* pun akan terus berusaha untuk mempertahankan reputasinya agar tetap disegani dan dijadikan panutan oleh orang banyak. Dia akan berusaha mengisi dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang rahasia kehidupan. Ilmu-ilmu yang telah dikuasainya ini disiapkan untuk menjawab pertanyaan orang yang lebih muda yang memiliki permasalahan dalam hidup.

3. Pelapisan Sosial Berdasarkan Pendidikan

Faktor pendidikan telah dianggap penting sejak dulu, terutama setelah masuknya orang Belanda ke Indonesia telah lebih membukakan mata bangsa Indonesia akan arti penting pendidikan. Hal tersebut dianggap penting untuk mensejajarkan posisi bangsa Indonesia dengan bangsa lain yang telah lebih dulu mengenyam dunia pendidikan. Namun, saat itu kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi terhalang oleh sekat status, bahwa bangsa Indonesia merupakan warga pribumi yang terjajah, yang dianggap tidak pantas mengenyam pendidikan tinggi dan tidak boleh memiliki posisi sama dengan bangsa penjajah.

Kini, setelah bangsa Indonesia merdeka dalam kurun waktu cukup lama, muncul kebebasan untuk mengenyam pendidikan sehingga muncul pula golongan-golongan kaum terdidik yang

secara umum memiliki sumbangsih tidak sedikit terhadap proses perkembangan pembangunan di Indonesia.

Di pedesaan, dengan fasilitas dan dana penyelenggaraan pendidikan tidak sebanyak dan selengkap di perkotaan, tingkat minat dan hasil pendidikan masih dinilai rendah dan belum mampu menunjang proses pembangunan seperti yang diharapkan. Kondisi ini akan memunculkan sikap melebihi orang-orang desa yang berpendidikan. Golongan terdidik mendapat tempat tersendiri dalam lapisan sosial masyarakat, termasuk orang-orang yang mendapat gelar akademis, sekalipun mereka tidak mengenal secara pasti tentang nilai perolehan gelar akademis.

Masyarakat kita banyak yang menempatkan individu yang berpendidikan pada status yang lebih tinggi, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengejar gelar tertentu dalam pendidikan hanya untuk menaikkan status sosial dirinya dan keluarganya. Jadi, ada sebagian anggota masyarakat yang sengaja mengejar pendidikan tertentu untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Ini dapat dimengerti, karena umumnya orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih inovatif, mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, dan tak dapat dipungkiri berprestasi lebih baik.

Di Kasepuhan Cicarucub, profesi yang diperoleh seseorang melalui pendidikan serta dinilai memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang menjalani pendidikan di bidang lain adalah guru, mantri kesehatan, dan bidan. Kedua orang dengan profesi tersebut dinilai memiliki jasa langsung dengan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Penghormatan tersebut antara lain profesi tersebut melekat menjadi nama panggilan atau sapaan. Dengan demikian, tidak mengherankan

jika di Kasepuhan Cicarucub akrab sapaan “Pa Guru” atau “Bu Guru” dan “Pa Mantri” atau “Bu Mantri”, dan “Bu Bidan”. Terkadang karena akrabnya sapaan-sapaan tersebut, sehingga dipakai sebagai pengganti nama aslinya. Bagi orang-orang yang berusia sebaya dengan orang-orang tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang bersangkutan, mereka akan memanggil dengan panggilan “*ru*” untuk guru dan “*tri*” untuk panggilan kepada mantri kesehatan. Munculnya sikap meninggikan kedudukan guru dan mantri kesehatan disebabkan jasa yang mereka berikan dirasakan langsung oleh warga masyarakat

Sama halnya dengan guru, mantri kesehatan dinilai memiliki jasa langsung dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tanpa penanganan mantri kesehatan, orang-orang yang sakit tidak akan sembuh dan tidak mustahil jika sakitnya berlanjut dapat meninggal. Meninggal merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh setiap orang karena meninggal adalah saat berpisah dengan dunia dan orang-orang yang sangat dicintai untuk selama-lamanya.

Bidan yang terdapat di Kasepuhan Cicarucub merupakan bidan yang memperoleh pendidikan secara formal di Akademi Kebidanan atau dari sekolah lain yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan. Pandangan terhadap bidan seperti itu, disebabkan mereka mampu menolong persalinan yang artinya sama dengan menolong jiwa manusia. Pandangan masyarakat bahwa saat melahirkan adalah saat-saat seorang ibu berada dalam batas antara hidup dan mati, sehingga jika seorang bidan berhasil menolong persalinan dengan selamat, dianggapnya telah mampu menyelamatkan jiwa seorang manusia.

4. Pelapisan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin

Di Kasepuhan Cicarucub pelapisan sosial berdasarkan jenis kelamin masih dianut secara kuat, walaupun pada beberapa hal perbedaan tersebut mulai memudar, terbatas pada hal-hal ringan yang sifatnya masih dapat dimaklumi. Pelapisan sosial berdasarkan jenis kelamin sangat terlihat pada struktur kasepuhan yang bersifat tertutup. Pada struktur Kasepuhan Cucarucub terdapat aturan yang melarang dan membolehkan jabatan tertentu dipegang seseorang yang berjenis kelamin tertentu. Jabatan ketua adat atau *olot* hanya boleh dijabat oleh laki-laki. Begitu ketatnya aturan ini, dalam pola penurunan pimpinan atau regenerasi ahli waris harus anak laki-laki dan bahkan jika anak *olot* sebagai penerus langsung bukan laki-laki, akan dicari dari silsilah keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam hal ini, jelas bahwa peranan atau fungsi laki-laki dapat mengatur atau mengalahkan peraturan yang dibuat secara turun-temurun.

Bukan hanya jabatan ketua adat yang mengharuskan dijabat oleh laki-laki, jabatan lain pun seperti *juru basa* atau *kuncen*, dan juru tulis harus laki-laki. Jabatan *tukang bebersih* (juru kebersihan) dan *pagawe* (pegawai) boleh laki-laki atau perempuan. Alasan tersebut disebabkan oleh aspek fungsional, yakni perempuan dapat melakukan pekerjaan menyapu dan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jumlah *pagawe* (pegawai) lebih dari satu orang, yang terdiri atas laki-laki dan perempuan karena pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam lingkungan rumah adat terdapat pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh laki-laki dan perempuan dan terdapat juga pekerjaan

hanya dapat diselesaikan oleh laki-laki. Pekerjaan memasak untuk kepentingan makan sendiri dan menyuguhi tamu yang datang sangat tepat jika dipegang oleh pegawai perempuan. Pekerjaan membersihkan halaman dapat dipegang oleh pegawai laki-laki atau perempuan. Pekerjaan-pekerjaan pertukangan untuk memperbaiki rumah adat serta lumbung adat hanya dapat dilakukan oleh pegawai laki-laki.

Cara-cara penurunan kekuasaan pada struktur adat yang mengharuskan beberapa jabatan dijabat oleh laki-laki tidak diketahui alasan secara pasti. Namun diperkirakan hal tersebut berkaitan dengan beberapa tata upacara adat yang harus dipimpin oleh ketua adat dan dilarang bagi mereka yang datang bulan. Dengan demikian, ketua adat yang berjenis kelamin laki-laki tidak akan menemukan kendala dalam melaksanakan upacara adat, serta upacara adat dapat dilaksanakan setiap saat tanpa terganggu oleh halangan akibat datang bulan. Perkiraan lain tentang jabatan adat yang harus dipegang oleh laki-laki karena laki-laki dinilai lebih gesit dalam mengerjakan sesuatu. Lagi pula laki-laki dapat bersikap rasional, tidak mengandalkan emosional dalam memutuskan satu persoalan.

Di luar lingkungan adat, yakni dalam lingkungan masyarakat umum, pelapisan sosial yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin masih sangat terasa. Peran anak laki-laki sebagai anak yang dinilai memiliki kekuatan fisik diberi tugas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ditunjang oleh kekuatan fisik seperti mencangkul, mengambil air, dan lain sebagainya. Anak perempuan yang secara fisik tidak sekuat anak laki-laki tetapi memiliki ketelitian dan kecermatan akan diberi pekerjaan rumah yang memerlukan hal itu. Pekerjaan tersebut di antaranya

mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Jika terdapat perselisihan akibat perbedaan jenis pekerjaan yang dikerjakan, para orang tua mereka akan memberi alasan bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada anak-anak sudah sesuai dengan jenis kelaminnya.

Pembagian tugas antara suami-istri pun masih menitikberatkan pada perbedaan jenis kelamin. Suami dengan penilaian fisik yang kuat memiliki kewajiban bekerja keras untuk mengerjakan segala macam pekerjaan yang dapat menghidupi keluarga. Dalam mendidik anak-anak, bapak identik dengan didikan yang keras. Ibu yang dinilai lebih lembut dijadikan pendamping dan penunjang suami. Ibu memiliki tugas untuk mengelola rumah atau membantu pekerjaan ringan suami. Dalam mendidik anak-anak pun istri identik dengan pola didik yang lembut dan penuh kasih sayang.

Bagi suami yang bermata pencaharian sebagai petani di sawah atau di kebun, istri tidak diberi beban yang berat seperti mencangkul atau menggali. Jenis pekerjaan di sawah atau di kebun yang biasa dikerjakan oleh perempuan adalah *ngarambet* (menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi atau tanaman yang lainnya). Pada saat panen, terkadang istri membantu panen atau menyiapkan makanan bagi orang-orang yang ikut membantu panen di sawah miliknya.

Istri yang suaminya bermata pencaharian sebagai penyadap gula aren akan membantu pekerjaan suami pada pekerjaan-pekerjaan yang ringan serta memerlukan ketelitian. Jenis pekerjaan tersebut di antaranya mempersiapkan peralatan untuk membuat gula seperti *hawu* (tungku), cetakan gula, katel, dan lain sebagainya. Setelah menjadi gula

aren, istri masih bertugas untuk menjual gula tersebut.

Istri yang suaminya bekerja sebagai penggali di tambang emas tidak dapat membantu pekerjaan suaminya secara langsung mengingat lokasi tambang emas relatif jauh dengan tempat tinggal, dan pekerjaan sebagai penggali di tambang emas merupakan pekerjaan berat dan berbahaya. Istri penggali tambang hanya membantu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan oleh suaminya dan mempersiapkan bekal makanan bagi suaminya yang akan bekerja.

Istri yang bersuamikan pegawai yang bekerja di kantor, tidak dapat membantu pekerjaan suaminya secara langsung bukan disebabkan oleh pelapisan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini lebih disebabkan oleh ketidakmungkinan bidang pekerjaan yang dikerjakan suaminya dipindahtangankan kepada istrinya. Sekalipun demikian, peran istri dalam menunjang pekerjaan suami tetap dilakukan seperti menyiapkan pakaian untuk bekerja, menyiapkan makanan saat akan berangkat dan pulang kerja.

Pelapisan sosial berdasarkan jenis kelamin terdapat juga pada bidang pekerjaan lain yang menjadi dominasi perempuan. Pekerjaan tersebut adalah *paraji* (dukun beranak), dan bidan. Pekerjaan dukun beranak dan bidan sampai saat ini masih mutlak menjadi pekerjaan perempuan. Sekalipun bukan merupakan ketentuan adat, norma yang berlaku pada masyarakat masih menganggap tidak pantas bahkan haram alat kelamin seseorang dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya, termasuk antara suami-istri pun banyak yang tidak pernah saling memperlihatkan.

5. Pelapisan Sosial Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan Penduduk Kasepuhan Cicarucub di daerah Kasepuhan Cicarucub adalah bertani, penambang emas, pertukangan, guru, penggiling emas, penjual biji emas, warung, dan beternak, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di luar Kasepuhan Cicarucub kebanyakan pekerjaan dengan menjual jasa tenaga seperti sopir, pegawai hotel, pedagang, dan jasa lainnya. Bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Kasepuhan Cicarucub tersebut telah memunculkan perbedaan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan yang dilakukan seseorang.

Pekerjaan yang dinilai sebagai pekerjaan yang menduduki predikat paling enak dan menghasilkan uang adalah pekerjaan menjual batu-batuan gunung yang mengandung biji emas atau mengelola pertambangan emas. Jenis pekerjaan ini paling cepat menghasilkan uang dalam jumlah sangat banyak. Terbukti penduduk yang memiliki pekerjaan ini, dari segi kekayaan paling menonjol di desanya, baik dilihat dari bentuk rumah yang dimiliki, dari kendaraan bermotor yang dibeli, serta dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.

Pekerjaan selanjutnya yang dipandang sebagai pekerjaan yang enak adalah para pekerja di sektor jasa yang bekerja di luar Kasepuhan Cicarucub. Orang yang bekerja di sektor ini memperoleh upah langsung berupa uang yang dapat dengan leluasa dibelikan apapun. Kebanyakan upah yang mereka peroleh di kota diwujudkan untuk membeli tanah serta membangun rumah di Kasepuhan Cicarucub. Dengan cara ini, rumah mereka akan lebih bagus dibandingkan

dengan rata-rata rumah penduduk lainnya.

Memang, penghasilan mereka di kota tidak terlalu besar, namun jika dibelikan tanah serta bahan bangunan di Kasepuhan Cicarucub akan mewujudkan tanah yang cukup luas dan bentuk rumah yang cukup baik, mengingat harga tanah masih rendah dan upah pekerja bangunan dalam membangun rumah pun tidak semahal di kota.

Mereka memiliki anggapan bahwa keluarganya yang bekerja di kota merupakan salah seorang yang mampu bersaing mengisi kesempatan kerja di kota. Dengan demikian, cerita yang keluar dari mulut para keluarga tersebut adalah cerita yang indah dan menggiurkan, sehingga penduduk lain yang mendengar merasa kagum dan percaya semua cerita baik tersebut karena mereka tidak pernah tahu hal yang sesungguhnya.

Pekerjaan lain yang dinilai dengan pandangan berbeda adalah pekerjaan sebagai pegawai negara yang bekerja pada berbagai bidang dan kantor. Pandangan tersebut berupa ketenangan akan masa depan. Para pegawai negara ini sekalipun pada masa aktif jabatannya tidak dinilai kaya atau berlebihan uang, namun mereka dianggap sebagai orang-orang yang memiliki ketenangan dalam menempuh kehidupan di masa depan.

Perbedaan pandangan yang lain adalah terhadap pekerjaan guru sekolah dan guru mengaji. Orang-orang yang bekerja sebagai guru dinilai sebagai orang yang mulia. Mereka dinilai sebagai orang yang telah mengamalkan ilmunya demi kecerdasan anak didik. Para orang tua banyak yang merasa terbantu oleh guru, terutama bagi orang tua yang anak-anaknya memasuki kelas awal. Di kelas awal inilah catatan sejarah kehidupan anak dalam dunia pendidikan dimulai. Anak yang semula tidak dapat membaca

dan menghitung menjadi anak yang dapat membaca, berhitung, serta mengetahui ilmu-ilmu lainnya. Hal ini merupakan dambaan para orang tua. Dapat dimaklumi, bahwa para orang tua mereka kebanyakan tidak mengenyam sekolah sampai jenjang yang tinggi.

Pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kasepuhan Cicarucub adalah bertani. Para petani di Kasepuhan Cicarucub masih mengelola pertanian secara tradisional, yang diawali pengolahan sawah dengan menggunakan cangkul dan beberapa peralatan sederhana lainnya.

Bila dilihat dari kepemilikan uang, para petani merasakan bahwa mereka berada pada pelapisan sosial bawah, sebab mata pencaharian bertani tidak langsung menghasilkan uang. Uang biasanya diperoleh dengan menjual hasil pertanian lainnya seperti buah-buahan dan sayur-mayur atau upah hasil berburuh.

Mereka yang masih menjadikan pekerjaan bertani sebagai mata pencaharian utama biasanya kaum tua yang tertutup peluangnya di pekerjaan sektor lain dan meneruskan pengolahan tanah hasil warisan leluhur mereka sebagai bentuk tanggung jawab untuk terus *mupusti*, menjaga dan melestarikan sesuai yang diamanatkan ahli warisnya.

Pandangan terhadap pekerjaan lain, seperti sebagai penggali tambang emas masih dinilai lebih baik dibandingkan bertani walaupun resiko hasil yang diperoleh dan kemungkinan tertimpa kecelakaan relatif besar. Wujud uang sebagai imbalan dari pekerjaan ini lebih dipandang sebagai pekerjaan yang enak dan mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Para pekerja yang dipandang khusus oleh masyarakat adalah pekerjaan-pekerjaan yang jarang diminati serta jasanya dibutuhkan oleh masyarakat

banyak. Pekerjaan tersebut adalah *bengkong* atau paraji sunat. Regenerasi pekerjaan ini sangat lambat dan nyaris tidak ada yang meminati. Oleh sebab itu, *bengkong* yang sekarang ada jumlahnya sangat sedikit, hanya beberapa orang sehingga bila banyak anak yang akan disunat mereka harus menentukan waktu secara bergiliran.

Pekerjaan sebagai *bengkong* bukan hanya dipandang sebagai orang yang memiliki keahlian, melainkan nilai-nilai menyunatlah yang lebih dipentingkan. Bagi masyarakat Kasepuhan Cicarucub yang seluruhnya beragama Islam menganggap bahwa seorang anak telah sempurna agamanya apabila telah disunat. Sejak disunatlah anak harus lebih rajin shalat dan mengaji serta berbuat hal-hal yang baik. Dengan demikian, secara tidak langsung *bengkong* ini dipandang memiliki andil besar dalam meng-Islamkan seorang anak. Peristiwa disunat pun merupakan peristiwa sangat bersejarah bagi seorang anak, sebab seorang anak disunat hanya satu kali seumur hidup. Nama *bengkong* yang menyunatnya pun akan dikenang seumur hidup.

Selain *bengkong*, orang yang mengerjakan pekerjaan khusus adalah pembuat perkakas pertanian, yakni *panday*. *Panday* bekerja membuat alat-alat pertanian seperti cangkul, golok, sabit, parang, dan peralatan pertanian lainnya dari besi yang ditempa. Pekerjaan ini dinilai sulit karena harus menempa besi pijar dan membentuk peralatan pertanian. Dengan demikian, tidak semua orang mampu menjadi seorang pandai. Mereka tidak hanya mahir membentuk peralatan dengan bentuk yang bagus namun harus pandai pula menjamin kualitas barang yang dibuat, yakni awet dipakainya, tidak berat, dan tajam.

6. Mobilitas Pelapisan Sosial

Dalam pelapisan di Kasepuhan Cicarucub terdapat dua period, baik pelapisan period yang tertutup maupun terbuka. Sehingga mobilitas period terjadi pada berbagai bidang dan dalam berbagai bentuk.

Pelapisan periode yang tertutup terdapat pada struktur jabatan adat, terutama penentuan pemimpin adat atau *olot*. Pengangkatan *olot* dilakukan apabila *olot* meninggal atau sudah sangat tua. Dengan usia yang sudah tua, dikhawatirkan *olot* tidak sanggup lagi melakukan tugas, atau dapat juga pola period dan perilakunya sudah tidak sesuai atau menyimpang dari pola adat-istiadat yang telah berlaku secara turun-temurun.

Pengangkatan kembali pemimpin adat yang baru apabila *olot* meninggal atau karena usia tua, sama-sama dilakukan dengan cara mengangkat anak laki-laki tertua yang sudah cukup dewasa dan menguasai seluk-beluk upacara adat di Kasepuhan Cicarucub. Bila *olot* tidak atau belum memiliki anak-laki-laki yang dianggap mampu memegang tampuk pimpinan kasepuhan, maka pilihan jatuh kepada adik laki-laki tertuanya. Jabatan-jabatan lain dalam struktur adat, sekalipun agak melonggar dan tidak seketat penunjukan *juru basa*, namun dapat dikatakan tertutup bagi orang-orang yang tidak memiliki pertalian saudara.

Mobilitas period secara periodik yang terjadi secara terbuka terjadi period pada setiap bidang lain di luar kepengurusan adat, terutama yang berkaitan dengan bidang jabatan dan pekerjaan. Jabatan pengurus desa dan pengurus period kemasyarakatan seperti RT dan RW sangat terbuka untuk umum dan pergantian jabatan terjadi secara periodik.

7. Dampak Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial secara tidak langsung memunculkan pengelompokan masyarakatnya. Karakteristik kelompok adalah membawa perbedaan-perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Perbedaan ini dapat membawa dampak tertentu, bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Kekhawatiran yang utama adalah munculnya pandangan negatif antara kelompok-kelompok tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik.

Di Kasepuhan Cicarucub yang masyarakatnya kuat memegang teguh ajaran agama Islam dan norma adat warisan para leluhur sangat memegang teguh ajaran tersebut dan tercermin secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan negatif akibat perbedaan status yang disebabkan kekayaan tidak dipertajam sisi negatifnya melainkan diambil sisi positifnya. Misalnya, orang kaya tidak mereka jauhi atau dikucilkan malahan didekati, sebab dengan kekayaan yang dimilikinya terkandung potensi yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat secara umum.

Pandangan terhadap *tata ,harta* atau jabatan dan kekayaan milik sendiri atau orang lain tidak pernah mengganggu pikiran mereka. Mereka berkeyakinan bahwa jabatan dan kekayaan sifatnya tidak abadi, hanya merupakan amanat dan titipan dari Allah. Malahan jika tidak benar menggunakannya dapat mencelakan diri sendiri.

C. Penutup

Suasana yang harmonis ini dapat dijadikan prototipe bagi daerah-daerah lain yang sering dilanda konflik, yang salah satu penyebabnya adalah pelapisan sosial yang tidak terkontrol. Untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dikaitkan dengan pelapisan sosial yang dapat

menjadi pemicu timbulnya konflik perlu diadakan upaya-upaya melestarikan upacara-upacara adat yang bernilai positif. Dengan demikian makna-makna simbolik yang terkandung dalam tata upacara adat dapat terus aktual dan selamanya hadir dalam kehidupan masyarakat pelaku upacara.

Penjelasan akan kedudukan dan fungsi antara agama dengan adat dengan cara-cara persuasif. Dengan demikian, masyarakat akan mampu menggunakan norma-norma yang terkandung dalam dua hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tanpa berusaha mencari perbedaan-perbedaan yang dapat mempertajam pelapisan sosial yang terdapat di masyarakat.

Melestarikan sistem kepemimpinan model *olot* yang lebih menekankan pada apresiasi masyarakat terhadap warisan para leluhur. Perluas norma-norma formal, selama norma-norma kepemimpinan model *olot* ditujukan untuk ketentraman dan kebahagiaan masyarakat.

Dengan arahan yang tepat dari semua pemimpin yang berkompeten dalam masalah sosial kemasyarakatan, jadikan pelapisan sosial sebagai pemicu motivasi anggota masyarakat agar meningkatkan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang “berkelas”.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagdan, R.C & S.R. Bilken. 1986. *Qualitative Research for Education and Introduction to Theory and Method*. London: Allyn & Bacon Inc.
- Ibrahim Jabal Tarik. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Leibo, Jefta. 1994. *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosyadi. 2005. *Peranan Leuit dalam Kehidupan Masyarakat Kasepuhan Cisungsang di Desa Cisungsang Kec. Cibeber, Kab Lebak Banten*. Jatinangor: Alqa Print.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Subadio, Maria Ulfah, dan T.O. Ihromi. 1986. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suparlan, Parsudi. 1980/1981. “Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya, Perspektif Antropologi Budaya” dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra (Indonesian Journal of Culture Studies)* November, Jilid IX. Jakarta: Bharata.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

LINTASAN SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG ABAD XVI - XX

Oleh **Euis Thresnawaty**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: bpsntbandung@ymail.com

Abstrak

Sejarah pemerintahan daerah Serang mencakup waktu sangat panjang, karena berawal dari pembentukan Kesultanan Banten abad ke-16. Berarti pemerintahan di daerah tersebut berlangsung pada zaman Kompeni, Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Banten mengalami dinamika akibat gejolak situasi politik pada zaman penjajahan, bahkan kesultanan itu akhirnya dihapuskan. Zaman Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang, Serang menjadi ibukota Keresidenan Banten dan Kabupaten Serang. Kedudukan Serang yang disebut terakhir berlangsung sampai sekarang. Mulai akhir tahun 2000, Serang kembali memiliki kedudukan penting sebagai ibukota kabupaten merangkap ibukota Provinsi Banten sejak tanggal 4 Oktober 2000.

Dalam perjalanan sejarahnya, banyak peristiwa penting terjadi di daerah Serang yang penting dipetik maknanya. Atas dasar itulah tulisan ini dibuat.

Kata Kunci: Sejarah Serang, pemerintahan.

Abstract

History of government of area Serang include; covers very time length, because having beginning of from forming of Sultanate Banten century XVI. Means government in the area takes place at period Kompeni, Hindia Belanda, Japan Occupying, and independence.

On the way its the history, Sultanate Banten experiences dynamic as result of distortion of political situation at colonization period, even the sultanate finally is abolished. Dutch Indies period and Occupying Jepang, Serang to become capital of Residence Banten and Sub-province Serang. Position Serang so-called last taken place until now. Starts is year-end 2000, Serang had important position as capital of regency doubles capital of Provinsi Banten commencing from the date of 4 October 2000.

On the way its the history, many important events happened in area Serang which is important is taken the meaning. On the basis of that is this article made.

Keywords: *History of Serang, governance.*

A. Pendahuluan

Pada periode pembangunan dewasa ini sangat diperlukan pemahaman

mengenai sejarah daerah yang lengkap, terutama bagi para penentu kebijakan. Pemahaman mengenai sejarah masa lalu ini dapat dipergunakan sebagai alternatif

dalam mencari pemecahan berbagai persoalan pembangunan dewasa ini maupun masa yang akan datang. Pemahaman ini tentu sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam pengulangan kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau.

Dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pemerintahan Kabupaten Serang maka perlu dilakukan kajian terhadap perubahan-perubahan tersebut dari sisi sejarah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai Sejarah Pemerintahan Kabupaten Serang yang difokuskan pada studi perkembangan pemerintahan di Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Berdirinya pemerintahan Kabupaten Serang memiliki rentang sejarah yang cukup panjang, dimulai sejak Kabupaten Serang berada di bawah pemerintahan Propinsi Jawa Barat sampai Kabupaten Serang masuk ke dalam wilayah Propinsi Banten.

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengantisipasi hilangnya berbagai peristiwa sejarah daerah sebagai bagian dari sejarah nasional dan untuk mengungkap perjalanan sejarah Kabupaten Serang dengan fokus utama pada perkembangan Pemerintahan Kabupaten Serang.

Penelitian sejarah Pemerintahan Kabupaten Serang ini memiliki ruang lingkup aspek spasial meliputi daerah Kabupaten Serang, sedangkan aspek temporal berada pada kurun waktu sejak pembentukan Kabupaten Serang sampai tahun 2000.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yaitu:

1. *Heuristik* atau proses pencarian dan pengumpulan sumber, pada tahap heuristik ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan di berbagai perpustakaan baik di Bandung maupun Serang Banten
- b. Kerja lapangan, yaitu langsung menuju ke tempat tujuan.
- c. Melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang berperan atau mengetahui tentang sejarah Kabupaten Serang.
2. *Kritik* sumber untuk memperoleh kebenaran dan kejernihan data, baik kritik ekstern (tentang wujud sumber) ataupun kritik intern (tentang isi sumber) maupun melakukan perbandingan data yang berasal dari berbagai sumber.
3. Pada tahap *interpretasi*, data mengalami proses pemberian makna dan penafsiran secara jelas dan lengkap.
4. *Historiografi* adalah proses terakhir dalam penulisan sejarah yang berupa proses merangkaikan fakta-fakta yang berhasil dihimpun dalam sebuah kisah sejarah.

B. Hasil dan Bahasan

1. Kondisi Geografi dan Kependudukan

Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah yang berada di Propinsi Banten dan sekaligus sebagai ibukota Propinsi Banten. Serang merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di Propinsi Banten, terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa, dengan jarak sekitar 70 kilometer dari Jakarta, ibukota Negara Republik Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Serang mencapai 170.341,25 hektar, tersebar menjadi 34 wilayah kecamatan, 353 desa dan 20 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Serang adalah: Kecamatan Serang, Cipocokjaya,

Kasemen, Taktakan, Kramatwatu, Waringinkurung, Bojonegoro, Puloampel, Ciruas, Walantaka, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Cirenang, Binuang, Petir, Tunjungteja, Curug, Baros, Cikeusal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Anyer, Mancak, dan Cinangka. Tahun 2007 Serang dimekarkan menjadi dua daerah tingkat II dengan pembentukan Kota Administratif Serang sebagai ibukota Propinsi Banten.

Secara administratif Kabupaten Serang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda

Penduduk Kabupaten Serang berdasarkan data hasil sensus menunjukkan jumlah yang terus bertambah. Pada tahun 1961 tercatat sebanyak 648.115 jiwa, tahun 1971 sebanyak 766.410 jiwa, meningkat menjadi 968.358 pada tahun 1980 dan 1.244.755 pada tahun 1990. Pada tahun 2000 jumlah penduduk tersebut telah bertambah lagi menjadi 1.786.223. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2006 adalah 1.786.223 terdiri dari 917.132 laki-laki dan 869.091 perempuan (BPS Kab Serang, 2007).

Penduduk Kabupaten Serang sebagian besar memeluk agama Islam. Hanya sebagian kecil yang memeluk agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Kehidupan beragama antar pemeluk agama yang berbeda berjalan harmonis dan tidak pernah terjadi pertikaian. Kerukunan hidup dan

tenggang rasa dalam beragama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Untuk menunjang kehidupan beragama di Kabupaten Serang telah terdapat sarana peribadatan Islam sebanyak 5.719, gereja 7, pura 1, dan 2 vihara. Sementara itu penganut agama Islam 1.890.457 orang, Protestan 4.674 orang, Katolik 2.228 orang, Hindu 3.094 orang, dan Budha 536 orang (BPS Kabupaten Serang, 2007).

Masyarakat Kabupaten Serang sebagian besar menggunakan bahasa Jawa Serang dalam berkomunikasi sehari-harinya. Bahasa Jawa Serang merupakan bahasa Jawa dialek Serang yang berbeda dengan bahasa Jawa standar yang ada di Jawa Tengah. Pemakaian bahasa Jawa di masyarakat Serang erat kaitannya dengan latar belakang historis penyebaran agama Islam oleh para wali yang masuk melalui daerah Banten.

2. Lambang Daerah

Lambang Daerah Kabupaten Serang berbentuk perisai dan pita berwarna kuning emas dengan kedua ujungnya dilipat ke bawah, terletak dibagian bawah perisai. Pada bagian perisai terdapat:

- a. Garis atas dengan 17 lengkungan, garis bawah 8 lengkungan diantara buah cengkeh sedangkan di bawahnya terdapat empat untai daun dan 5 akar beringin. Hal ini menggambarkan hari Proklamasi RI 17 Agustus 1945.
- b. 6 buah cengkeh berwarna merah dan putih yang mencerminkan Rukun Iman, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sedangkan buah cengkeh melambangkan kemakmuran, hasil pertanian dan perdagangan serta kejayaan daerah dan masyarakat. Warna putih mempunyai arti kesucian.

- c. Menara Mesjid Agung Banten berwarna putih, melambangkan syiar agama dan pusat kegiatan kebudayaan serta pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa.
- d. Benteng Keraton Surosowan yang didalamnya terdapat dua puluh enam (26) kotak dan berpuncak 10 kotak serta celah-celah kotak yang berjumlah 8 ini melambangkan hari jadi Kabupaten Serang, yaitu tanggal 8 Oktober 1526. berwarna merah bata yang berarti semangat abadi.
- e. Pohon beringin, melambangkan persatuan yang kokoh dan kuat. Berwarna hijau yang berarti kesuburan, kesegaran, dan kesehatan.
- f. Dua buah sungai, yang melambangkan bahwa di Kabupaten Serang terdapat dua aliran sungai, yaitu Cibanten dan Ciujung. Warna biru laut mempunyai arti kejernihan suasana dan keaslian watak.
- g. Dua buah laut, melambangkan bahwa Kabupaten Serang diapit oleh Laut Jawa dan Selat Sunda. Berwarna biru laut. Pada bagian yang berbentuk pita terdapat tulisan yang berbunyi "*Sepi ing pamrih rame ing gawe*". Semboyan merupakan himbauan agar masyarakat mengutamakan kerja keras untuk mencapai kemakmuran dan keadilan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan serta imbalan, berjuang dengan ikhlas. Warna kuning emas berarti keagungan orang-orang mengamalkan motto yang terukir didalamnya.

3. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Serang

a. Masa Kesultanan Banten

Menguraikan sejarah pemerintahan di Kabupaten Serang tidak akan terlepas

dari sejarah Banten, karena Serang merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang berdiri pada abad XVI. Di daerah Banten, tepatnya di Pulau Panaitan, pernah berdiri kerajaan tertua di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Salakanagara (Negeri Perak) dengan pusatnya di Kota Rajatapura yang terletak di pesisir Pandeglang. Selain itu Banten merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang berpengaruh besar dalam pengislaman di daerah Jawa Barat, Jakarta (Sunda Kelapa), Lampung, Sumatra Selatan, dan beberapa daerah lain di sekelilingnya.

Dalam bukunya "*The Suma Oriental of Pires*", Armando Cortesao memaparkan bahwa nama Banten pertama kali muncul dalam laporan perjalanan Tome Pires seorang Portugis yang menjabat sebagai inspektur pajak di Malaka yang ikut dalam ekspedisi ke Jawa pada tahun 1513. Disebutkan bahwa Banten adalah sebuah kota pelabuhan yang ramai dan berada di kawasan Kerajaan Sunda. Kesaksian Tome Pires ini dapat dijadikan petunjuk bahwa Bandar Banten sudah berperan sebelum berdirinya Kesultanan Banten pada tahun 1526, atau pada masa Kerajaan Sunda. Bisa diduga bahwa Banten telah berdiri sekurang- kurangnya pada pertengahan abad kesepuluh atau bahkan abad ke-7.

Pada awalnya masyarakat Banten adalah penganut Hindu-Budha, dan sampai awal abad XVI termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada saat itu Kerajaan Sunda yang dikenal dengan sebutan Pajajaran merupakan kerajaan besar dengan daerah kekuasaan yang meliputi seluruh Banten, Kalapa (Jakarta), Bogor, sampai Cirebon, ditambah pula dengan Tegal dan Banyumas sampai batas Kali Pamali (Cipamali) dan Kali Serayu (Ekadjadi, 1983: 19). Pelabuhan Banten

dan Sunda merupakan pelabuhan besar dan ramai yang banyak dikunjungi pedagang dari luar negeri.

Pada awal abad XVI, yang berkuasa di Banten adalah Prabu Pucuk Umum atau disebut juga Ratu Ajar Domas. Pusat pemerintahannya adalah Kadipaten yang terletak di Banten Girang. Sedangkan Banten Lama atau Banten Ilir hanya berfungsi sebagai pelabuhan saja. Untuk menghubungkan antara Banten Girang dengan Pelabuhan Banten dipakai jalur sungai Kali Banten yang pada waktu itu masih dapat dilayari (Ayatrohaedi, 1979:37), disamping masih ada jalan darat yang melalui Kalapadua (Djajadiningrat, 1983:124).

Banten yang berada di jalur perdagangan internasional, diduga sudah memiliki hubungan dengan dunia luar sejak awal abad Masehi. Kemungkinan pada abad ke-7 Banten sudah menjadi pelabuhan yang dikunjungi para saudagar dari luar. Ketika Islam dibawa oleh para pedagang Arab ke timur kemungkinan Banten telah menjadi sasaran dakwah Islam. Menurut berita Tome Pires, pada tahun 1513 di Cimanuk sudah dijumpai orang-orang Islam. Setidaknya pada akhir abad ke-15, Islam sudah mulai diperkenalkan di pelabuhan milik kerajaan Hindu Sunda. Ketika Sunan Ampel Denta pertamakali datang ke Banten, ia mendapati orang Islam di Banten, meskipun penguasanya masih beragama Hindu (Michrob dan Chudori:1993:50-51).

Pada tahun 1525 Hasanuddin berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umum di Banten Girang dibantu oleh pasukan gabungan Cirebon dan Demak. Selanjutnya atas kesepakatan Demak dan Cirebon diangkatlah Pangeran Hasanuddin menjadi Adipati Banten dengan pusat pemerintahan di Banten Girang. Berdasarkan petunjuk dari Syarif Hidayatullah, Pangeran Hasanuddin

memindahkan pusat pemerintahan Banten yang semula berada di pedalaman Banten Girang, sekitar 13 kilometer dari Serang ke dekat Pelabuhan Banten. Hal ini terjadi pada tanggal 1 Muharam tahun 933 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526. Pada saat pemindahan pusat pemerintahan Banten ke pesisir, Syarif Hidayatullah yang menentukan posisi istana, benteng, pasar, dan alun-alun yang harus di bangun di dekat Kuala Sungai Banten yang kemudian dinamakan Surosowan dan menjadi ibukota Kesultanan Banten. Surosowan dipilih sebagai ibukota Kesultanan Banten berdasarkan pertimbangan antara lain karena Surosowan lebih mudah dikembangkan sebagai Bandar pusat perdagangan.

Oleh karena Banten semakin besar dan maju, pada tahun 1552 Masehi, Banten yang semula hanya sebuah kadipaten diubah menjadi negara bagian Demak dengan dinobatkannya Pangeran Hasanuddin sebagai Sultan di Kesultanan Banten dengan gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan (Lubis, 2003:28).

Pada masa pemerintahan Hasanuddin (1552-1570) Banten memperluas wilayah kekuasaannya ke Jayakarta, Karawang, Lampung dan daerah sekitarnya. Langkah pertama Pangeran Hasanuddin sebagai penguasa Banten ialah mendirikan komplek keraton Surosowan yang disebut juga *Gedong Kedaton Pakuwon* dan mesjid. Mesjid pertama yang didirikannya terletak di Kampung Pecinan sekarang. Pangeran Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin bisa dikatakan sebagai orang pertama yang menyusun kekuatan dan kekuasaan Banten sebagai negara yang berdiri sendiri.

Pada tahun 1568 Pangeran Hasanuddin mampu memanfaatkan situasi kemelut yang terjadi di

Kesultanan Demak untuk melepaskan diri dari pengawasan Demak. Banten menjadi negara merdeka, menjadi kesultanan dengan Sultan Hasanuddin sebagai Sultan pertamanya. Daerah kekuasaannya meliputi seluruh Banten, Jayakarta, Lampung, Bengkulu dan daerah-daerah lainnya di Sumatra bagian selatan. Maulana Hasanuddin memerintah Banten sekitar 18 tahun, ia meninggal pada tahun 1570 Masehi, dimakamkan disamping Masjid Agung Banten. Setelah Maulana Hasanuddin wafat, rakyat Banten menyebutnya Pangeran Surosowan, *Penembahan Sedakingkin*, yang artinya rindu akan kebijaksanaannya.

Sepeninggal Maulana Hasanuddin sebagai penggantinya adalah Maulana Yusuf, putra pertamanya yang memerintah tahun 1570-1580. Selanjutnya silih berganti hingga Sultan Banten ke-5. lebih dikenal dengan nama *Sultan Ageng Tirtayasa* (1651-1672), seorang ahli strategi perang yang dapat diandalkan.

Ia ditangkap pada tanggal 14 Maret 1683, akibat penghianatan putranya sendiri, Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai ia meninggal tahun 1692. Atas permintaan keluarganya, khususnya cucunya yaitu Sultan Abdul Al Mahasin Zainul Abidin, jenazah Sultan Ageng Tirtayasa di pulangkan ke Banten dan di makamkan di Kompleks Mesjid Agung Banten (Ekadjati, 1995:101-102; *Ensiklopedi Sunda*, 2000: 661).

Kedudukan para Sultan yang kemudian silih berganti menduduki tahta selanjutnya tidak lebih dari *vassal* VOC yang bertindak sebagai *Lord* sampai berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1799

Kesultanan Banten dalam struktur pemerintahannya mempunyai hak *prerogatif*, baik dalam urusan politik

maupun agama. Sultan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan yang disertai tugas-tugas tertentu. Para pejabat yang langsung di bawah sultan adalah para pangeran, anggota keluarga sultan, dan anggota-anggota kaum bangsawan lainnya. Mereka memiliki tugas masing-masing, ada yang bertugas mengawasi pasukan pengawal keraton dan budak-budak atau tugas lainnya. Yang tergolong anggota keturunan sultan biasanya tidak dilibatkan ke dalam organisasi administratif. Kekuasaan administratif diserahkan kepada anggota-anggota lapisan atas birokrasi. Yang mengepalai birokrasi pusat adalah *Patih* yang dibantu oleh dua *Kliwon* yang biasanya juga disebut patih. Pengadilan keagamaan dipegang oleh seorang ahli agama, disebut *fakin*.

Pejabat-pejabat tingkat teratas memiliki bawahan yang disebut *Ponggawa*. Para ponggawa ini memiliki tugas untuk mengatur administrasi dan pengawasan atas penanaman lada, produksi, dan perdagangannya. Kemudian para *Syahbandar* yang diberi tugas mengatur administrasi dan pengawasan atas perdagangan luar negeri di kota-kota pelabuhan (Pemda Jabar, 1993: 198). Sejarah dengan pejabat di kota-kota pelabuhan adalah kepala daerah yang mengepalai pemerintahan suatu daerah, yaitu yang berkedudukan di Lebak, Caringin, Pontang, dan Jasinga. Selanjutnya adalah sederetan *Ponggawa*, *Ngabei*, *Kliwon*, dan *Paliwara* yang bertugas mengawasi gudang-gudang dan urusan rumah tangga keraton atau pejabat-pejabat penghubung (Michrob, 1988: 98).

Penggantian tahta kerajaan yang berlaku di Kesultanan Banten adalah bersifat turun-temurun. Pada dasarnya seorang sultan memegang pemerintahan sampai meninggal. Sebagai pengganti

sultan yang meninggal adalah putra laki-laki tertua raja yang lahir dari istri permaisuri. Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka dapat dipilih putra laki-laki yang lain atau kakak/ adik sultan atau cucu sultan. Apabila putra mahkota belum dewasa, maka pemerintahan untuk sementara dapat dipegang oleh seorang wakilnya, biasanya *Mangkubumi*.

Kedudukan sultan dalam pemerintahan kerajaan sangat sentral, karena sultan adalah penguasa tertinggi. Oleh karena itu apa yang ditetapkan oleh sultan harus dipatuhi oleh rakyat. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan sultan akan berakibat buruk atau menerima hukuman. Sultan bukanlah orang sembarangan, mereka yang memerintah dikesultanan Banten adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon.

b. Masa Hindia Belanda

Gubernur Jenderal H.W. Daendels adalah orang pertama yang memperkenalkan sistem pemerintahan Barat yang modern kepada masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, ia sangat memperhatikan urusan pemerintahan dan administrasi negara. Dalam hal ini, Daendels menjalankan pemerintahan yang bersifat *sentralistis*. Segala kekuasaan dan keputusan berada pada dirinya. Semua urusan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah diatur dari pusat di Batavia. Pejabat-pejabat di daerah hanya menerima dan menjalankan instruksi dari Gubernur Jenderal.

Dalam sistem pemerintahannya Daendels memperkenalkan jabatan *prefect*, yaitu pejabat Eropa/ Belanda setingkat residen yang menguasai wilayah administratif yang disebut *prefectur*. Prefect merupakan wakil pemerintah kolonial di daerah yang

dikuasainya dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal. Istilah *prefect* kemudian diubah menjadi *landdrost*, dan *prefectur* menjadi *landdrostambt*.

Daendels menyatakan bahwa semua pejabat, baik pejabat Eropa maupun pribumi adalah pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Dengan kata lain, ia memodifikasi kedudukan bupati dari penguasa daerah (tradisional) menjadi aparat pemerintah kolonial yang berada di bawah pengawasan *prefect*. Sistem pergantian bupati secara turun-temurun tidak diakui, kemudian diganti dengan sistem penunjukkan (Syafurudin, 1993 : 263).

Berdasarkan *Regeringsreglement (RR)* 1854, pemerintahan di Hindia Belanda tetap bersifat *sentralistis*, kecuali pemerintahan desa yang dibiarkan otonom berdasarkan adat setempat. Akan tetapi pada pemerintahan yang *sentralistis* itu dijalankan pula azas *dekonsentrasi*, yaitu sejumlah tugas pemerintahan dilimpahkan oleh pemerintah pusat yaitu gubernur jenderal kepada pejabat-pejabat pusat yang lebih rendah tingkatannya secara hierarkis. Pejabat-pejabat itu berkedudukan di daerah-daerah dan mereka menjalankan tugasnya terbatas pada lingkungan wilayah jabatan tertentu yang disebut daerah administratif atau pemerintahan lokal administratif (Syafurudin, 1993: 271). Karena pemerintahan dijalankan oleh *pangrehpraja*, maka pemerintahan itu dikenal dengan sebutan "Pemerintahan Pangrehpraja" (Lubis, 2003: 91).

Dalam sistem pemerintahan kolonial ini meskipun menerapkan sistem pemerintahan modern dan berusaha mengurangi kekuasaan bupati, tetapi pemerintahan tradisional tetap berlangsung tanpa mengalami perubahan sistem pemerintahan. Bupati tetap dibantu oleh

pejabat struktural dan pejabat fungsional. Pejabat struktural terdiri atas *patih*, *wedana*, (kepala *distrik/ hoofddistrict*), asisten *wedana (hoofdonderdistrict)*, dan *lurah* (kepala desa). Pejabat fungsional terdiri atas *jaksa* kepala (*hoofdjaksa*), penghulu kepala (*hoofdpenghulu*), *kanduruan* (kepala/ *mantri* besar *paseban*), *kumitir* kepala (*hoofdcommitter*), *ondercollecteur* (pengumpul pajak, *demang*, *ngabei*, *kaliwon*, *panglaku*, *lengser* (kabayan), sejumlah *mantri*, dan lain-lain (Lubis, 2003: 91).

Tahun 1862 terjadi perubahan dalam pemerintahan tradisional sebagai akibat pemerintahan kolonial memperkenalkan sistem *afdeeling* dalam pembagian wilayah kabupaten. Tiap kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas rata-rata dibagi menjadi dua *afdeeling*. Secara politis, perubahan itu dimaksudkan oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi kekuasaan bupati, karena pemerintahan sehari-hari di wilayah *afdeeling* dilakukan oleh asisten residen (*hoofd van plaatselijke bestuur*) dengan didampingi oleh *patih afdeeling* yang disebut "*zelfstandige patih*".

Akhir abad ke-19 wilayah Jawa Barat dibagi dalam lima karesidenan. Tiap karesidenan terdiri atas sejumlah *afdeeling* dan kabupaten. Kelima karesidenan itu adalah:

1. Karesidenan Batavia terdiri atas tiga *afdeeling*, yaitu *Meester Cornelis* (Jatinegara), Tangerang, dan *Buitenzorg* (Bogor).
2. Karesidenan Karawang terdiri atas tiga *afdeeling*, yaitu Tanah-tanah Negara, Pamanukan dan Ciasem, dan Tegalwaru.
3. Karesidenan Banten terdiri atas empat *afdeeling*, yaitu Anyer, Pandeglang, Caringin, dan Lebak.
4. Karesidenan Priangan terdiri atas sembilan *afdeeling*, yaitu: Bandung,

Cicalengka, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Limbangan, Tasikmalaya, dan Sukapura Kolot.

5. Karesidenan Cirebon terdiri atas empat *afdeeling*, yaitu Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Galuh.

Di antara 5 daerah tersebut, pada abad ke-19 perubahan politik dan pemerintahan terutama terjadi di tiga daerah yaitu Karesidenan Banten, Karesidenan Priangan, dan Karesidenan Cirebon, karena daerah Karawang dan Batavia khususnya, telah berada di bawah kekuasaan kolonial sejak abad ke-17.

c. Masa Pendudukan Jepang

Setelah tentara Jepang berkuasa di Jawa, Panglima Tentara ke-16 mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1942. Undang-undang tersebut merupakan induk peraturan tentang tata negara selama pemerintahan sementara militer Jepang. Undang-undang ini berisi antara lain:

- Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu itu di daerah yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.
- Pasal 2 : Pembesar Balatentara Nippon memegang kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal.
- Pasal 3 : Semua badan pemerintah, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer.
- Pasal 4 : Bahwa Balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Jepang.

Apabila melihat isi dari undang-undang tersebut tergambar jelas bahwa jabatan gubernur jenderal pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang berada di tangan gubernur jenderal sekarang dipegang oleh pembesar tentara Jepang. Aparat pemerintahan bangsa Indonesia tetap diteruskan, sejak dari jabatan bupati ke bawah.

Susunan pemerintahan militer Jepang di Jawa terdiri atas *Gunsyireikan* atau *Saikosyikikan* sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan yang dipegang oleh Panglima Tentara ke-16. Tetapi operasional pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Stafnya yang disebut *Gunseikan*. Staf *Gunseikan* disebut *Gunseikanbu*. *Gunsyireikan* menetapkan peraturan-peraturan yang dinamakan *Osamu Seirei*, sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* disebut *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah), penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu*. Panglima Tentara ke-16 di Pulau Jawa yang pertama adalah Letnan Jenderal Imamura Hitosyi dengan Kepala Stafnya Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Mereka disertai tugas untuk membentuk pemerintahan militer sementara di Jawa. Yang diangkat menjadi kepala *Gunseibu* (gubernur) di wilayah Jawa Barat adalah Kolonel Matsui, bekas komandan pasukan yang merebut Bandung dengan wakilnya R. Pandu Suradiningrat dan Atik Suardi sebagai pembantu wakil Gubernur.

Pada tanggal 29 April 1942 diangkat empat orang putra Jawa Barat menjadi residen di wilayah Jawa Barat, yaitu :

1. R.A.A. Hilman Jayadiningrat, sebagai Residen Banten yang berkedudukan di Serang.

2. R.A.A. Suryajayanagara, sebagai Residen Bogor yang berkedudukan di Bogor.
3. R.A.A. Wiranatakusumah, diangkat sebagai Residen Priangan yang berkedudukan di Bandung. Dalam pelaksanaannya ia tidak sampai menjalankan kekuasaan sebagai residen, melainkan hanya sebagai Penasehat Residen Priangan Kolonel Matsui.
4. Pangeran Aria Suriadi, diangkat sebagai Residen Cirebon yang berkedudukan di Cirebon.

Pemerintahan Sementara Militer Jepang berakhir pada bulan Agustus 1942. Pada bulan tersebut dikeluarkan Undang-undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 28 tentang aturan pemerintahan Syu dan *Tokubetsu Syi*. Kedua Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan reorganisasi struktur pemerintahan yang semula sifatnya sementara, yang mengakhiri eksistensi *Gunseibu*.

Selanjutnya dilakukan reorganisasi pemerintahan setelah datang tenaga-tenaga ahli pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa. Tenaga-tenaga ahli ini mulai ditempatkan pada badan-badan pemerintahan untuk melaksanakan reorganisasi. Dengan perubahan pemerintahan itu dimaksudkan oleh penguasa militer Jepang untuk menjadikan Pulau Jawa yang tanahnya subur sebagai sumber perbekalan perang di daerah selatan.

Kedudukan tinggi dalam struktur pemerintahan, yaitu di atas jabatan bupati, yang semula diserahkan kepada orang Indonesia, diambil alih oleh orang Jepang. Pribumi hanya menduduki jabatan bupati ke bawah. Adapun isi Undang-undang No. 27 tahun 1942 adalah:

- Pasal 1 : Tanah Jawa dan Madura, kecuali *Kooti (Vorstenlanden)*, terbagi atas *Syu, Syiken, Gun, Son, dan Ku*.
- Pasal 2 : Daerah *Syu* sama dengan residen dahulu.
- Pasal 3 : Daerah *Syu* dibagi atas *Syi* dan *Ken*. Daerah *Ken* terbagi atas *Gun*, dan daerah *Gun* terbagi atas *Son*, dan *Ku* sama dengan *distrik, onderdistrict*, dan desa.
- Pasal 4 : Di dalam *Syi, Ken, Gun, Son, dan Ku*, masing-masing diangkat seorang *Syityoo, Kentyoo, Guntyoo, Sontyoo, dan Kutyoo*. Aturan yang berlaku pada *Stadsgemente, regentschap, district, onderdistrict*, dan desa tetap berlaku pada *Syi, Ken, Gun, Son, dan Ku*.
- Pasal 5 : *Syi* yang ditunjuk *Gunseikan* dinamai *Tokubetsoe Syi*.

Walaupun tidak ada perubahan struktural, namun terdapat perbedaan di dalam pelaksanaan pemerintahannya. Luas daerah *Syu* sama dengan keresidenan dahulu, tetapi fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residen dahulu merupakan pejabat daerah sebagai pembantu gubernur. Sedangkan *Syu* merupakan pemerintahan daerah tertinggi dan bersifat otonom. *Syu* dikepalai oleh *Syucokan* yang kedudukannya sama dengan gubernur dulu. Seorang *Syucokan* memegang kekuasaan tertinggi di daerahnya, karena ia mempunyai kekuasaan legislatif disamping kekuasaan eksekutif (Syafudin, 1993: 351).

Banten *Syu* membawahi beberapa *Ken* (Kabupaten), yaitu Serang, Pandeglang, dan Lebak. *Syucokan* (Residen) yang pernah mengepalai wilayah Keresidenan Banten ialah :

- Letkol Onokuchi (1942)
- Kolonel Orio (1942-1943)

- Watanabe Hiroshi (1943-1944)
- Banjokyosji (1944-1945)

d. Masa Kemerdekaan

Tanggal 19 Agustus 1945, Pemerintah berhasil menyusun 12 kementerian, diantaranya Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A Wiranatakusumah. Pada tanggal itu pula PPKI berhasil membentuk delapan propinsi yang dikepalai seorang Gubernur dan masing-masing propinsi terdiri atas karesidenan-karesidenan yang dipimpin oleh residen. Kedelapan propinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Masing-masing dipimpin oleh Gubernur. Sebagai Gubernur Jawa Barat adalah R.Sutarjo Kartohadikusumo.

Berdasarkan amanat pasal 18 UU Dasar 1945 berikut, pasal I dan II Aturan Peralihan UUD RI JO Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 1945, dibentuk karesidenan-karesidenan yang masing-masing dikepalai oleh residen. Selanjutnya setiap karesidenan dibagi lagi atas kabupaten-kabupaten dan kotapraja yang diperintah oleh Bupati dan Walikota. Para Pejabat kepala daerah tersebut yaitu residen, bupati, dan walikota pada umumnya ditunjuk/dipilih oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) setempat. Sebagian dari mereka yang ditunjuk adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan yang sama pada masa pemerintahan Militer Jepang. Sebagai realisasi UUD 45 dan PP no 2 tahun 1945 di Jawa Barat kemudian dibentuk lima karesidenan, 18 Kabupaten, dan 5 Kotapraja. Salah satu karesidenan di Provinsi Jawa Barat adalah karesidenan Banten dengan residennya yaitu R.Ng.Tirtasoejatna.

Setiap karesidenan terdiri atas beberapa Kabupaten dan Kotapraja. Karesidenan Banten terdiri atas tiga

Kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Lebak, dan pandeglang. Para bupati yang ditunjuk/diangkat baik oleh pemerintah pusat maupun oleh KNID setempat, diantaranya adalah R.Hilman Jayadiningrat sebagai Bupati Serang; K.H TB. Hasan sebagai Bupati Lebak; dan K.H. TB. Abdul Halim sebagai Bupati Pandeglang (Lubis, 2003: 207-208).

Pada dasarnya pembagian wilayah administratif tersebut sama seperti pada masa akhir Hindia Belanda. Demikian pula pembagian pemerintah daerah dari tingkat kabupaten ke bawah tetap seperti keadaan sebelumnya. Walaupun sudah diangkat gubernur sebagai penguasa tertinggi di setiap propinsi, namun dalam bulan-bulan pertama setelah proklamasi roda pemerintahan daerah belum berfungsi dengan baik karena kegiatan pemerintahan tergeser oleh kegiatan perjuangan menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan serta mencegah kembalinya kekuasaan kolonial yang lebih bersifat perjuangan fisik bersenjata daripada bersifat politik.

Pada akhir bulan Agustus 1945 diadakan musyawarah para tokoh Banten baik dari golongan pemuda, jawara, wanita, maupun kelompok masyarakat lainnya. Musyawarah diadakan di rumah Dzulkarnaen Surya Kartalegawa di Serang. Dalam musyawarah diputuskan bahwa pengambil alihan kekuasaan diserahkan kepada Dzulkarnaen, urusan perjuangan pemuda diserahkan kepada Ali Amangku, urusan pemerintahan sipil kepada K.H. Tb. Achmad Chatib, dan urusan militer kepada K.H. Syam,un. Sedangkan K.H. Tb. Achmad Chatib pada tanggal 2 September 1945 diangkat oleh pemerintah RI sebagai Residen Banten. K.H. Tb. Achmad Chatib adalah putra seorang ulama terkenal dari Pandeglang yaitu K.H. Tb. Muhammad Waseh, dan menantu dari K.H. Tb.

Asnawi, seorang ulama terkenal dari Caringin.

Sebagai Residen Banten yang dipilih rakyat, K.H. Tb. Acmad Chatib mulai menjalankan tugas dengan menyusun personalia pemerintahan di Karesidenan Banten. Semua pejabat lama tetap duduk dalam jabatan masing-masing. Para bupati yang menjabat waktu itu masing-masing adalah Bupati Serang Raden Tumenggung Aria Hilman Djayadiningrat, Bupati Pandeglang Raden Tumenggung Djoemhara Wiriaatmadja, dan Bupati Lebak Raden Tumenggung Hardiwinangun.

Apabila di telaah lagi, sejak adanya jabatan Regent atau Bupati pada tahun 1826 sampai tahun 2008, telah terjadi 32 kali pergantian Bupati di Kabupaten Serang.

Daftar Regent/ Bupati Kabupaten Serang

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Pangeran Mudzafar Adi Santika (Regent) | : | 1816-1827 |
| 2. Agoes Rajak R.A. Djayakusumaningrat (Regent) | : | 1828-1840 |
| 3. R.T. Mandoera Radja Djajanagara (Regent) | : | 1840-1848 |
| 4. R. Toemenggoeng Basudin Tjandranagara (Regent) | : | 1849-1870 |
| 5. R.T. Pandji Gondokoesomo (Tb. Hanafi) (Regent) | : | 1870-1888 |
| 6. R. Toemenggoeng Sutadiningrati Murawan (Regent) | : | 1888-1893 |
| 7. R. Toemenggoeng Bagus Djaja (Regent) | : | 1893-1898 |
| 8. R. Ariadjaatmadja (Regent) | : | 1898-1901 |
| 9. R.A. Achmad Djajadiningrat (Regent) | : | 1901-1904 |
| 10. R. Toemenggoeng Prawirokoesomo (Limbangan) | : | 1904-1931 |
| 11. R.A.A Abas Soerianataatmadja (Priangan) | : | 1931-1935 |
| 12. R.A.A Hilman Djajadiningrat (Banten) | : | 1935-1945 |
| 13. Kolonel K.H. Syam'um (Bupati) | : | 1945-1949 |
| 14. Mas Parmadidjaja (Bupati) | : | 1949-1950 |
| 15. Entol Dyong Tarnaya (Bupati) | : | 1950-1955 |
| 16. Mas Adjenam Bin Mas Basa (Bupati) | : | 1955-1957 |

17. M. Sirian Sutawidjaja (Bupati) : 1957-1959
18. R. Bidin Suria Gunawan (Pj. Bupati) : 1959-1960
19. M. H. Gogo Rafiudin Sandjadirdja (Bupati) : 1960-1962
20. Letnan Kolonel Tb. Suwandi (Bupati) : 1962-1968
21. H.S. Ronggowaluyo (pj. Bupati) : 1968-1974
22. Kolonel H. Tb. Saparudin (Bupati) : 1974-1975
23. Drs. Kartiwa Suryasaputra (Bupati) : 1975-1978
24. Letnan Kolonel Atmawidjaja (Bupati) : 1978-1983
25. H. Tjakra Sumarna (Bupati) : 1983-1988
26. H.M.A. Sampurna (Bupati) : 1988-1993
27. Kolonel H. Sukron Roshadi (Bupati) : 1993-1998
28. Kolonel Inf. Solichin Dachlan (Bupati) : 1998-1999
29. R. Nuriana/Gubernur Jawa Barat (Pj. Bupati) : 1999
30. Drs. H. Rosadi Natawisastro (pj. Bupati) : 1999-2000
31. Drs. H. Bunyamin, MM, MBA (Bupati) : 2000-2005
32. Drs. H. Rivai, M.Si (Pj. Bupati) : 2005
33. Drs. H. A. Taufik Nuriman, MM, MBA (Bupati) : 2005-sekarang

Daftar Sultan Banten

1. Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan : 1552-1570
2. Maulana Yusuf Panembaha Pakalangan : 1570-1580
3. Maulana Muhammad Pangeran Ratu Banten : 1580-1596
4. Sultan Abdul Mafakir Mahmud : 1596-1640
5. Sultan Abdul Maali Achmad Kenari : 1640-1651
6. Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fath : 1651-1672
7. Sultan Haji Abu Hasri Abdul Kahar : 1672-1687
8. Sultan Abdul Fadhal : 1687-1690
9. Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin : 1690-1733
10. Sultan Muh. Syifai Jainul Arifin : 1733-1750
11. Sutan Syarifuddin Ratu Wakil : 1750-1752
12. Sultan Muh. Wasi Jainul Alimin : 1752-1753
13. Sultan Muh. Arif Zainul Asyikin : 1753-1773
14. Sultan Abdul Mafakh Muh. Aliuddin : 1773-1799
15. Sultan Muhyidin Zainussalihin : 1799-1801
16. Sultan Muh. Ishak Jainul Mutaqin : 1801-1803
17. Sultan Pangeran Wakil Natawijaya : 1803
18. Sultan Aliudin (Aliudin II) : 1803-1808
19. Sultan Pangeran Wakil Suramanggala : 1808-1809
20. Sultan Muhammad Syafiudin : 1809-1813
21. Sultan Muhammad Rafiudin : 1813-

C. Penutup

Perjalanan sejarah pemerintahan Kabupaten Serang diwarnai dengan perubahan bentuk pemerintahan, yaitu dari bentuk pemerintah lokal dan kabupaten. Jejak sejarahnya tidak bisa lepas dari perjalanan panjang Banten yang kini telah menjadi Propinsi, memisahkan diri dari Propinsi Jawa Barat sejak 4 Oktober 2000. Perubahan pemerintahan itu telah berlangsung lama sejak abad 18 yaitu sejak masa Kesultanan kemudian masa Kolonial Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Sebelumnya Banten Girang dipilih sebagai pusat pemerintahannya, tetapi karena letaknya dipedalaman, pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Surosowan, Serang. Dipilihnya Surosowan atau Serang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Serang, karena lokasi ini sangat strategis bagi komunikasi antara Priangan, Batavia (Jakarta) dan wilayah Pulau Sumatra. Selain itu, Serang merupakan tempat yang nyaman bagi peristirahatan serta memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi karena memiliki pelabuhan besar Merak, serta kekayaan sumber alam, khususnya bidang industri.

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 19 September 1870, pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan struktur pemerintahan, berupa pembentukan beberapa afdeling di Jawa Barat. Afdeling itu antara lain Afdeling Serang yang berada di bawah *Residentie Banten Regentchappen*, yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan di Serang telah mengalami 4 (empat) kali masa peralihan kekuasaan/pemerintahan, yaitu:

1. Pemerintahan Kesultanan Kerajaan Banten yang berkuasa selama kurang lebih 290 tahun, dimulai

sejak Sultan Maulana Hasanuddin yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816. Dan ketika berdirinya Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan yang ditandai dengan penobatan Pangeran Sabakingskin dengan Pangeran Hasanuddin pada tanggal 1 Muharam 933 H/ 8Oktober 1526 M, kemudian dijadikan landasan penetapan sebagai Hari Jadi Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa selama kurang lebih 126 tahun yaitu dari tahun 1816 sampai tahun 1942.
3. Pemerintahan Jepang yang berjalan selama 3,5 tahun yaitu dari tahun 1942 sampai tahun 1945.
4. Pemerintahan Republik Indonesia dimulai sejak Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. 1995.
Banten Sebelum Islam, Dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Jakarta: Depdikbud.
- BPS Kabupaten Serang. 2000.
Serang Dalam Angka. Serang: BPS.
- BPS Kabupaten Serang. 2007.
Serang Dalam Angka. Serang: BPS.
- Djajadiningrat, R. Husein. 1982.
Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Jakarta: Djambatan.
- Djajadiningrat, P.A.A. 1937.
Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat. Batavia: Kolff-Buning- Bale Pustaka.
- Ekadjati, Edi S. et al. 1978/1979.
Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat. Bandung: Depdikbud Proyek PPKD Jabar.
- , 1982.
Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat. Jakarta: Depdikbud.
- Ekadjati, Edi S. 1995.
“Kesultanan Banten dan Hubungannya Dengan Wilayah Luar” dalam *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. Jakarta: Depdikbud.
- Hakim, Lukman. 2006.
Banten Dalam Perjalanan Jurnalisti. Banten Heritage.
- Ismail, Muhammad. 1983.
Petunjuk Jalan dan Keterangan Bekas Kerajaan Kesultanan Banten. Serang: Saudara.
- Lubis, Nina H. et al. 2000.
Sejarah Kota-kota Lama Jawa Barat. Bandung: Alqaprint.
- Lubis, Nina H. 2003.
Banten Dalam Pergumulan Sejarah. Jakarta: LP3ES.
- , 2003.
Sejarah Tatar Sunda. Jilid I dan II Bandung: Satya Historika.
- Michrob, Halwany. 1990.
Catatan Masa Lalu Banten. Serang: Penerbit Saudara.
- Michrob, Halwany. 1993.
Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten. Jakarta: Yayasan Baluwarti.
- Roesjan, Tb. 1954.
Sedjarah Banten, Djakarta: Penerbit Arief.
- Syafrudin, Ateng, 1993.
Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. Bandung, Pemda Propinsi Jawa Barat.

MITOS NYI RORO KIDUL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT CIANJUR SELATAN

Oleh **Irvan Setiawan**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: *kamaliasetiawan@yahoo.co.id*

Abstrak

Nyi Roro Kidul adalah legenda yang sangat populer pada masyarakat di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat hingga saat ini masih percaya terhadap wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul di sepanjang laut selatan Pulau Jawa berikut kekuatan gaib yang dapat memberikan ketentraman ataupun sebaliknya pada masyarakat. Dua hal tersebut ditanggapi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan upacara penghormatan, tidak melanggar pantangan.

Masyarakat Cianjur Selatan dengan wilayah administratif tepat berada di sepanjang pantai Kabupaten Cianjur adalah sebagaimana halnya masyarakat di sepanjang pantai Pulau Jawa yang juga melaksanakan ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul berikut perilaku yang diupayakan sebisa mungkin untuk tidak melanggar pantangan Nyi Roro Kidul. Meski melakukan perilaku sama namun masyarakat di Cianjur Selatan tentu ada beberapa perbedaan dalam menanggapi keberadaan sosok penguasa laut selatan tersebut.

Kata Kunci: Nyi Roro Kidul, mitos.

Abstract

Nyi Roro Kidul is a real popular legend at public in Java island. Some of the existing finite publics still believing to power region of Nyi Roro Kidul alongside south sea Java island following occult strength of which can give peace and or on the contrary at public. Two the things answered to public in the form of execution of respect ceremony, doesn't impinge abstention.

Public north Cianjur with accurate administrative territory resided in coast wise Cianjur district is as also to public alongside coast Java island which also executes ritual respect to Nyi Roro Kidul following behavior strived can be possible not to impinge abstention Nyi Roro Kidul. Even does same behavior but public in north Cianjur of course there are some difference in answering to existence of the south sea power figure.

Keywords: Nyi Roro Kidul, myth.

A. Pendahuluan

Mitos Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa

seakan tidak pernah habis termakan usia. Benar atau tidaknya adalah bukan sebuah pernyataan yang penting karena terdapat

perbedaan pandangan antara dunia logika, agama dan kepercayaan. Dikatakan demikian karena menurut pandangan logika bahwa segala bentuk gaib sebenarnya merupakan kumpulan energi yang terjadi pada beberapa tempat tertentu serta memancarkan kekuatan untuk membangkitkan sesuatu obyek. Agama (Islam) memang menyebutkan bahwa ada dunia jin yang mendampingi dunia manusia. Pengertian mendampingi dapat berarti membantu atau mengganggu manusia. Hampir sama halnya dengan pandangan agama, kepercayaan yang kerap dikaitkan dengan mitos memandang bahwa dunia gaib itu juga ada dan memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia baik dalam lingkungan keseharian, pekerjaan, ataupun keimanan. Perbedaan dengan pandangan agama bahwa terdapat banyak variasi makhluk halus dalam dunia kepercayaan disertai dengan istilah berbeda karena disesuaikan dengan kondisi kebahasaan masyarakat setempat.

Percaya atau rasa ingin tahu terhadap dunia makhluk halus tergantung dari kondisi pemikiran manusia. Namun, rasa keingintahuan menjadi faktor utama yang menggugah rasa seseorang untuk menguak tabir yang selama ini masih menutupi apa dibalik kejadian atau gejala alam di sekitar lingkungan mereka. Bencana alam, kurang beruntung, ingin sukses, dan sebagainya adalah bagian dari kehidupan manusia.

Penggunaan metode logika seringkali terbentur pada kesulitan melaksanakan proses untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik, aman, dan sukses. Metode supranatural adalah cara yang dianggap mumpuni dan cukup mudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan proses ritual tertentu, sebagian masyarakat merasa mendapat perlindungan dari penguasa gaib wilayah mereka.

Kondisi geografis daerah Jawa Barat berkontur pegunungan dan pantai dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan mendapatkan penghasilan dari keuntungan geografis tersebut. Lahan di daerah pegunungan dimanfaatkan untuk menanam sayuran, tanaman hias, dan sebagainya. Sementara itu, daerah pantai dihuni sebagian besar nelayan yang jelas mengambil keuntungan dari kekayaan lautan yang ada di bagian selatan dan utara wilayah Jawa Barat.

Kaitan tradisi ritual yang ada di dua wilayah pantai Jawa Barat (selatan dan utara) dengan mitos tentang Nyi Roro Kidul sangat menarik untuk disimak karena pantai utara Jawa Barat tidak disebutkan sebagai wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Wilayah selatan pantai Jawa Barat, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, pun tidak semua yang memiliki tradisi kuat terhadap mitos Nyi Roro Kidul. Sepengetahuan penulis, ada dua wilayah yaitu Cianjur, dan Ciamis dengan pelabuhan ratu/pangandaran yang kuat memegang teguh mitos Nyi Roro Kidul. Terlangkahi oleh wilayah Tasikmalaya dan Garut menyebabkan sebuah pertanyaan mengapa masyarakat Cianjur kerap menjalankan tradisi upacara *nyalawena*, *syukur pasisiran*, dan sebagainya sebagai bagian dari proses ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, permasalahan yang timbul adalah seputar:

1. Upacara apa saja yang merupakan wujud dari penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul pada masyarakat di wilayah Cianjur Selatan,
2. Keberadaan Nyi Roro Kidul di Cianjur Selatan apakah sebuah mitos atau fakta?

Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepercayaan

terhadap Nyi Roro Kidul pada masyarakat di pantai selatan Kabupaten Cianjur, tepatnya di wilayah pantai APRA kecamatan Sindang Barang.. Hasil dari deskripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat tentang keanekaragaman budaya yang ada khususnya perilaku budaya pada masyarakat di Cianjur Selatan.

Mitos kerap dikaitkan dengan penghuni "alam lain" yang berdampingan dengan alam manusia. Mahluk halus sebagai penghuni alam lain dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang baik atau buruk.

Istilah "alam lain" kerap dihubungkan dengan kepercayaan dari setiap suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa Jawa dikenal memiliki agama asli dengan istilah kejawen, suku bangsa Sunda umum dikenal memiliki kepercayaan dengan istilah sunda wiwitan. Agama asli ini telah ada jauh sebelum agama baru – Hindu, Budha, Islam, dan Kristen – mulai menanamkan pengaruh keimanan mereka di bumi nusantara.

Konflik memang tidak dilakukan secara terbuka namun hingga saat ini agama asli masih kontinyu berusaha bertahan dan membentuk citra positif agar tidak menjadi sasaran hujatan penyelewengan agama. Subagya menyatakan bahwa agama pendatang itu unggul dalam perlengkapan doktriner, kenegaraan dan lambat-laun berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral. Namun penduduk tetap menganut agama asli sekalipun digolongkan *out-group*. Di Jawa pada masa Hindu penganut agama asli ini disebut *jaba* (1981: 237).

Sebenarnya masalah konflik antar umat beragama tidak perlu dilakukan apabila masyarakat mengerti dan mengamati kilas balik sejarah pembentukan Indonesia yang dimulai dari masa kerajaan tradisional.

Kerajaan besar yang ada pada waktu itu, Majapahit, telah menunjukkan ketentraman di antara umat beragama seperti yang tertera dalam Kakawin Sutasoma.

Penjelasan dari Kakawin Sutasoma tersebut di atas memang harus diamati dalam menelaah kehidupan agama asli di Indonesia saat ini. Berbagai jenis kepercayaan terhadap "alam lain" hingga saat ini masih sangat dipercaya dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi masyarakat. Pengaruh positif dapat berupa kelancaran dalam mencari jodoh dan karir, sementara pengaruh negatif adalah sakit yang tidak dapat dijelaskan dari segi ilmu kedokteran modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu berupaya deskripsi tentang mitos Nyi Roro Kidul di daerah Cianjur Selatan. Analisa data cenderung diarahkan pada sisi etnografi untuk proses klarifikasi dan kategorisasi data yang diperoleh. Oleh karena itu, penggunaan teori dan referensi amat diperlukan untuk mempermudah analisa data. Surbakti (2005: 34) mengatakan bahwa teori dalam penelitian sosial sangat berguna untuk memberikan pola interpretasi data, menghubungkan satu studi dengan lainnya, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti, dan memungkinkan kita menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.

Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih, yaitu kualitatif, dengan berpedoman pada paparan Oetomo (2005: 186) bahwa data kualitatif dapat dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu: wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan penelaahan dokumen tertulis.

Responden dan informan merupakan jenis data primer yang harus dicari dengan spesifikasi yang dapat mengarahkan pada keakuratan data. Spesifikasi yang dimaksud adalah kekayaan informasi dari informan tentang mitos

Nyi Roro Kidul. Oleh karena itu sebagai wacana pencarian informan pencarian informan mengarah pada tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Sementara itu, kriteria responden adalah masyarakat di wilayah pesisir pantai Cianjur Selatan.

B. Hasil dan Bahasan

Mitos Nyi Roro Kidul dalam Kehidupan Masyarakat Di Cianjur Selatan

1. Sekilas tentang Kabupaten Cianjur

Cianjur salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Barat memiliki letak yang strategis karena dilintasi jalur jalan negara antara Jakarta Bandung. Luas wilayah 350.148 Ha dan memiliki pantai sepanjang 75 Km. Kabupaten dibatasi oleh 5 Kabupaten, masing-masing adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bogor dan Purwakarta,
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah kabupaten Bandung dan Garut
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Pada bagian selatan Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan samudera Indonesia, terdapat wilayah pantai yang memiliki panorama indah dan sekaligus menyimpan misteri tentang keberadaan sosok Nyi Roro Kidul. Akses ke lokasi pantai Apra dari pusat kota kecamatan Sindangbarang sangat dekat, dari alun-alun jaraknya hanya sekitar 600 meter, bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati perkampungan penduduk. Sedangkan dari Cianjur kota, bisa ditempuh menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dengan jarak 110

km, melewati beberapa kecamatan. Sedangkan dari Jakarta diperkirakan jaraknya 220 km. Jarak tempuh yang relatif jauh dengan kontur jalan berkelok-kelok membuat perjalanan menuju pantai Apra terasa melelahkan¹.

Masyarakat di sekitar pantai APRA hanya sedikit yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di Pantai Apra melakukan kegiatan melautnya dengan bermodalkan sendiri. Nelayan yang ada masih bersifat tradisional, belum ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan ke tengah laut dengan perahu atau kapal yang modern. Di Pantai Apra baru ada satu perahu milik warga, namun itupun tidak digunakan ke tengah laut karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Pantai APRA ombaknya sangat besar dan angin yang cukup kencang sehingga sangat membahayakan keselamatan bagi para nelayan di tengah laut. Selain itu, dipercaya bahwa Pantai Apra adalah salah satu pantai yang masih angker, janganakan melaut ke tengah berenang di pinggir pantai saja tidak boleh saking berbahayanya, lepas dari kepercayaan itu secara logika memang berbahaya karena pantainya sangai curam dan ombaknya besar.

Modal yang mereka pergunakan dalam sekali menangkap ikan tidak terlalu besar sebab menangkap ikannya hanya di sekitar muara pantai saja. Hasil ikan yang mereka peroleh, mereka konsumsi sendiri dan dijual ke pasar. Hasil laut para nelayan di Pantai Apra hanya cukup didistribusikan ke daerah Sindangbarang, Cibinong, dan Cikadu.

¹ Selebihnya tentang keelokan pantai lihat, "APRA Pantai Apra Sindangbarang Cianjur 'Saksi' Pemberontakan APRA", dalam *Pikiran Rakyat tanggal 15 Maret 2008*.

2. Upacara dan Kesenian untuk Penghormatan Terhadap Nyi Roro Kidul.

Budhisantoso (1990:7) mengatakan bahwa upacara adalah sebuah tingkah laku resmi bentukan sekelompok masyarakat yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia atau kekuatan supernatural, seperti roh nenek moyang pendiri desa, roh leluhur yang dianggap masih memberikan perlindungan kepada keturunannya, dan sebagainya.

Kaitan antara masyarakat di pesisir pantai Cianjur Selatan dengan Nyi Roro Kidul sangat erat. Keeratan tersebut ditandai dengan beberapa upacara yang secara umum ditujukan untuk menghormati keberadaan dan kekuasaan Nyi Roro Kidul atas wilayah pantai mereka. Beberapa temuan upacara tradisional terkait dengan keberadaan Nyi Roro Kidul di pesisir pantai Cianjur Selatan adalah nyalawena, syukuran pasisiran, hajat mulud, babad astana, bebersih cikaheuran, ngaruwat, dan mitembayan panen pare.

a. Nyalawena

Nyalawena berasal dari *salawe*, yang artinya dua puluh lima. Kaitan angka tersebut adalah tanggal upacara selalu dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan Islam tahun Hijriah.

Pantai APRA, mulai dari hulu sungai hingga garis pantai sejauh 2 km, di Kecamatan Sindangbarang kerap menjadi lokasi Upacara Nyalawena. Selain di Cianjur, upacara ini juga dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama seperti di pantai di Garut Selatan. Tradisi ini hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat terutama di sekitar daerah Rancabuaya dan

Cijayana.² Upacara ini diikuti selain oleh masyarakat sekitar juga dihadiri oleh masyarakat daerah lain yang sebagian besar berasal dari Suku Sunda.

Istilah lain untuk upacara Nyalawena adalah “*Ngala Impun*” yang artinya menangkap ikan kecil atau *impun*. Latar belakang pelaksanaan upacara Nyalawena dikaitkan dengan mata pencaharian masyarakat di pesisir selatan yang sebagian besar petani dan peladang. Kondisi cuaca dan keadaan geografis alam pesisir selatan yang tidak ramah mengakibatkan warga kerap mengurungkan niat untuk pergi mencari ikan. Ketakutan akan kondisi alam seputar pesisir selatan membuat warga merasa ada keanehan pada lokasi hunian mereka. Tentu saja, sebagaimana daerah lainnya di pesisir selatan pulau Jawa, Nyi Roro Kidul kerap menjadi acuan atas segala kejadian alam yang dialami warga pesisir selatan Kabupaten Cianjur ini.

Mitos Nyi Roro Kidul dalam upacara Nyalawena semakin mengental setelah kemunculan mitos “*si pacul*”. Dikisahkan dalam mitos tersebut tentang seorang pendatang yang bekerja di daerah Sindangbarang. Ia bekerja tanpa mengenal lelah bahkan waktu shalat, termasuk shalat jumat, diabaikannya. Akibat dari kelalaian menghargai waktu shalat, suatu hari pendatang tersebut hilang tanpa jejak. Bukti satu-satunya

² Menurut masyarakat di sekitar Cijayana dan Rancabuaya, tradisi nyalawena sudah berlangsung sejak dahulu kala. Ketika musim *impun* tiba, orang dari mana-mana sengaja datang untuk menangkap *impun*. Jika sudah demikian, muara sungai di sepanjang pantai akan dipenuhi orang dengan berbagai alat yang dibawanya. Biasanya mereka menggunakan *sair* atau *waring* (sejenis jaring). Belakangan, dan sering menimbulkan protes, ada orang berburu *impun* dengan menggunakan *tua* (racun ikan) dan *setrum listrik*. Selebihnya, lihat “Nyalawena”, dalam <http://sunda.web.id/category/adat-istiadat/>

bahwa pernah ada pendatang tersebut hanyalah sebuah pacul. Memang agak membingungkan untuk menghubungkan antara kepercayaan masyarakat setempat dengan proses penghukuman karena melanggar waktu shalat yang sejatinya adalah perintah dalam agama Islam. Kaitan satu-satunya adalah menempatkan faktor kesukuan (Sunda) berikut adat istiadat di dalamnya sebagai bagian tidak terpisahkan dengan agama Islam. Aceh juga menganut prinsip serupa yang tercantum dalam pepatah *adat ngon hukom lagee dzat ngon sifeut*. Pepatah tersebut mengibaratkan adat dan hukum (Islam) sama halnya dengan zat yang tidak lepas dari sifat (zat tersebut).³

Kembali pada mitos “si pacul”, proses sanksi terhadap seseorang yang melanggar aturan, dalam hal ini “si pacul”, secara terus menerus diingatkan dalam bentuk sesaji untuk si pacul. Hal ini juga dipercaya oleh masyarakat bahwa bagi setiap pendatang jangan sampai melanggar pantangan-pantangan karena apabila dilanggar akan terjadi kecelakaan bagi pendatang, terutama pendatang dari Bandung dan sekitarnya. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan Upacara Nyalawena terlebih dahulu harus dilakukan ritual pemberian sesajen kepada Nyi Roro Kidul dan Si Pacul.

Setelah pemberian sesajen kepada Nyi Roro Kidul dan Si Pacul selesai

dilaksanakan, selanjutnya adalah upacara pokok, yaitu Nyalawena, baru digelar. Masyarakat memiliki hasrat cukup besar untuk mengikuti upacara Nyalawena karena pelaksanaan hari adalah bertepatan dengan bulan-bulan Rajab, Mulud, atau pada Peringatan Hari Besar Islam yang memang diyakini bertepatan dengan kedatangan ikan dalam jumlah besar di wilayah laut sindangbarang. Ada kepercayaan bahwa tradisi nyalawena telah tiba ketika terdengar guntur dari tengah samudra. Suara guntur itu dipercaya sebagai awal dari menetasnya telur-telur ikan yang kemudian bertumbuh menjadi *impun*. Konon siklus ini terjadi hampir sepanjang tahun, terutama pada bulan-bulan transisi dari kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Awalnya, ikan yang hidup di sungai membiarkan telurnya hanyut sampai ke tengah laut. Ketika telur-telur ini menetas, maka anak-anak ikan yang disebut *impun* itu secara naluriah akan kembali ke habitatnya di sungai. Siklus ini mirip dengan proses perkembangan-biakan ikan Salem di daratan Amerika.

Saat ini di sela-sela kegiatan upacara Nyalawena ditemukan kebiasaan mencari jodoh di kalangan muda mudi. Meskipun demikian, ritual “si pacul” tampak cukup berhasil sehingga saat upacara nyalawena berlangsung tampak tidak ada kegiatan-kegiatan yang melanggar susila, walaupun kemungkinan tersebut terbuka lebar dengan banyaknya muda-mudi yang mengikuti upacara ini. Apalagi pelaksanaan upacara ini biasanya berlangsung sampai malam hari.

Sayangnya, tradisi nyalawena tersebut mulai ditinggalkan masyarakat setempat, terutama kaum muda. Tradisi nyalawena ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh kaum muda. Yang masih tetap teguh melaksanakan tradisi ini, kata mereka hanyalah orang-orang tua yang

³ Islam menghargai tradisi. Islam tak selamanya memusuhi tradisi lokal, tetapi justru menjadi sarana vitalisasi nilai-nilai Islam sebab nilai-nilai Islam perlu kerangka yang akrab dengan kehidupan pemeluknya. Islam yang berkembang adalah Islam yang mampu berdialog dengan tradisi lokal, seperti diangkat Alquran dan masa awal kedatangan Islam. Kalau saat ini ada masjid yang bentuknya seperti pura, merupakan sebagai hasil interaksi dengan budaya lokal. Lebih lanjut lihat Toto Suparto, “‘Ngalap Berkah’ pada Garebek Maulud”, dalam *Media Indonesia*, Sabtu 7 April 2007 halaman 8.

kukuh mempertahankan tradisi. Padahal, tradisi itu telah dilakukan selama bertahun-tahun di daerah tersebut. Biasanya masyarakat menangkap *impun*, ditandai dengan suara gemuruh dari laut dan sudah berlangsung puluhan tahun.

b. Syukur Pasisiran

Nama Syukur Pasisiran berasal dari dua kata, yaitu kata syukur yang berarti 'rasa syukur' dan pasisiran yang berarti 'daerah yang berada di sekitar pantai'. Jadi, syukur pasisiran secara harfiah berarti rasa syukur masyarakat yang berada di sekitar pantai.

Syukur pasisiran diadakan masyarakat Sindangbarang sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, ungkapan rasa syukur juga ditujukan kepada penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul, yang telah berkenan memberikan limpahan hasil panen serta keselamatan nelayan baik selama berada di laut maupun aktivitas yang dilakukan di sekitar pantai.

Tanggal pelaksanaan syukur pasisiran saat ini hanya mengikuti kalender hari besar baik daerah (Cianjur) maupun nasional. Oleh karena itu kadang acaranya diadakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cianjur atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Tempat pelaksanaannya pun kadang-kadang di beberapa pantai. Selain pantai APRA, daerah pantai lainnya di Cianjur Selatan yang pernah menyelenggarakan syukur pasisiran adalah Pantai Sereg, Pantai Jayanti, atau di Pantai Batu Kukumbung. Pantai Apra setidaknya pernah diselenggarakan dua kali syukur pasisiran, yaitu tahun 2003⁴

dan 2006. Pelaksanaan di tahun 2006 tidak disertai dengan pelarungan persembahan ke tengah laut karena ombak sangat besar sehingga persembahan hanya dilakukan di bibir pantai saja.

Pelaksanaan upacara syukur pasisiran terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama para nelayan atau masyarakat sekitar menyiapkan semua persembahan atau perlengkapan upacara, baik dengan cara sumbangan maupun membuat sendiri. Biasanya untuk pengadaan barang-barang yang membutuhkan biaya besar, selalu ditanggung bersama, seperti kepala kerbau. Sedangkan barang-barang kecil yang tidak membutuhkan biaya besar, dikumpulkan dari perorangan. Semua persembahan yang telah tersedia disiapkan di suatu tempat, biasanya di halaman rumah juru kunci, tokoh masyarakat yang akan memimpin jalannya upacara.

Pagi hari yang sudah ditentukan untuk memulai upacara, masyarakat berbondong-bondong mengarak persembahan ke bibir pantai untuk diberikan doa-doa, melakukan doa bersama, selanjutnya pergi ke laut dengan perahu-perahu yang penuh dengan persembahan. Itu pun dilakukan kalau bisa melaut,

jenis kesenian tradisional seperti tari nyalawena, seni reak, tanjidor, dan rengkong. Sukur Pesisir sendiri, akan terus berlangsung sepanjang tahun 2003, setelah di Cianjur, pantai Sindang Barang (17-20 Mei), akan beralih ke Ciamis pantai Pangandaran (30-31 Mei dan 1 Juni), Cirebon, Pantai Mundu (10-17 Juli), Subang, pantai Blanakan (1-7 September), Karawang, Pantai Tanjung pakis (19-21 September), Indramayu, pantai Song (1-7 Oktober), Garut, pantai Cialit Eureun (10-12 Oktober) dan Tasikmalaya, pantai Pamayangsari (16-22 Oktober). Lebih lanjut, lihat Matdon, "Sisi Lain dari Sukur Pesisiran 2003: Geliat Tradisi Pesisir di Pantai Apra", dalam *Sinar Harapan* tahun 2003, atau <http://www.sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2003/0524/bud2.html>

⁴ Pelaksanaan syukur pasisiran tahun 2003 bertepatan dengan kalender pariwisata Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, upacara syukur pasisiran lebih banyak didominasi oleh peragaan berbagai

tetapi kalau tidak bisa ke tengah laut, cukup di bibir pantai saja.

c. Ngaruwat

Ngaruwat adalah upacara yang bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta pada para karuhun yang termasuk di dalamnya adalah penguasa pantai selatan - yaitu Nyi Roro Kidul. Prosesi ngaruwat sebenarnya hampir berlaku umum di setiap suku bangsa di Indonesia. Salah satunya dilakukan pada masyarakat Aceh yang disebut dengan istilah *peusijuek*⁵. Sama halnya pola *life cycle* dalam agama Islam juga sering ditindaklanjuti dengan upacara selamatan.

Ngaruwat biasanya dipimpin oleh seorang juru ruwat atau orang yang ahli dalam ngaruwat, bisa dari tokoh masyarakat atau tokoh ulama yang telah biasa melaksanakannya. Upacara ini bisa diikuti oleh masyarakat umum atau cuma oleh orang-orang tertentu saja. Kalau yang diruwatnya tempat-tempat umum biasanya diikuti oleh masyarakat umum, sedangkan kalau yang diruwatnya tempat-tempat pribadi (tertentu) hanya diikuti oleh orang-orang tertentu, terutama orang yang mempunyai hajat.

3. Antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul

Dua nama yang menurut mata masyarakat awam adalah sama antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul. Pandangan ini akan sangat

berbeda dengan pakar yang membidangi masalah mitologi ataupun paranormal yang kerap bersentuhan dengan dunia gaib. Ternyata ada kekeliruan besar yang selama ini dibiarkan terjadi yaitu menyamakan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul.

Masyarakat Cianjur selatan tampak tidak begitu paham akan perbedaan kedua nama tersebut (Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul). Kepastian yang ada hanya penghormatan terhadap sosok yang menguasai wilayah tempat mereka menetap dan mencari nafkah - sebagai petani dan nelayan - serta memberikan sesaji melalui upacara Nyalawena ataupun syukur pasisiran dan Ngaruwat kepada sosok tersebut. Apalagi beberapa informan yang ditemui tidak ada satupun yang pernah menemui kejadian aneh yang berkaitan dengan perjumpaan dengan sosok penguasa laut selatan tersebut, meskipun di daerah lain telah terjadi keanehan yang merujuk pada pertemuan antara seseorang atau berkelompok dengan Nyi Roro Kidul.

Pengkaburan atas dua nama ini mengarah pada awal pengkultusan sosok Kanjeng Ratu Kidul yang memang berasal dari tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa masyarakat awam di Tanah Parahyangan tidak begitu membedakan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul karena keduanya adalah sama-sama sebagai sosok penguasa laut selatan. Meski demikian, keyakinan akan adanya sosok penguasa pantai selatan hingga saat ini masih ada. Apalagi para sesepuh adat Sunda di Cianjur Selatan yang memang telah dibekali pengetahuan supranatural hingga mampu melihat melalui batin terhadap berbagai gejala alam dari sudut pandang gaib.

Kemampuan dalam menelaah dunia gaib para sesepuh adat Sunda bukan datang dengan sendirinya. Fenomena agama asli Sunda wiwitan patut

⁵ *Peusijuek* dapat digelar dalam bentuk upacara sederhana maupun berskala besar. Inti dari upacara *peusijuek* adalah memohon keselamatan dari orang yang berkepentingan terhadap benda, barang, karir, dan perkawinan. Tahapan sederhana adalah pembacaan doa dari *teungku* yang dilanjutkan dengan suapan nasi kuning dari *teungku*. Setelah itu, *teungku* memercikan air dengan menggunakan tiga tangkai dari tiga jenis tanaman.

menjadi bahan referensi untuk mengetahui keberadaan sosok penguasa pantai selatan daerah parahyangan ini.

Upaya agar penguasa pantai selatan tidak membuat kerusakan terhadap wilayah tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat Cianjur Selatan kerap diadakan dalam bentuk pemberian sesaji dalam upacara Nyalawena, syukur pasisiran, dan ngaruwat yang diadakan setiap tahun. Oleh karena itu, setiap ada tanda – terutama gejala alam di lautan – seperti halilintar yang bersahut-sahutan disertai dengan gelombang besar merupakan salah satu pertanda akan datang kemurkaan dari sang penguasa laut selatan.

Tanda-tanda alam yang diamati dan dianalisis masyarakat Cianjur Selatan hingga menuju pada kesimpulan bahwa kemurkaan alam disebabkan ulah penguasa laut selatan menunjukkan keeratan hubungan masyarakat Cianjur Selatan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menurut Peter L. Berger & Thomas Luckmann didasarkan dorongan biologis manusia untuk terus bersentuhan timbal balik dengan lingkungan. Di lain pihak pola persentuhan tersebut terkait dengan budaya yang membungkus manusia agar mengikuti prosedur tertentu sehingga tercapai unsur keseimbangan perilaku manusia dalam memanfaatkan alam lingkungan.⁶

Sesaji sebagai salah satu produk budaya yang lekat dengan unsur kepercayaan kerap selalu disediakan dalam setiap upacara. Upacara Nyalawena, Syukur Pasisiran, dan Ngaruwat juga wajib menggunakan sesaji. Terutama sesaji sebagai suguhan kepada penguasa lautan selalu disertakan kepala kerbau seperti dalam upacara

Nyalawena. Di Pangandaran ada istilah *dongdang*, yaitu sesaji yang ditaruh dalam sebuah kotak. Di antara jenis sesaji tersebut terdapat sebuah kepala sapi jantan, seperangkat peralatan wanita lengkap mulai dari sanggul, alat rias, sampai pakaian dalam, bubur merah, bubur putih, rujak, dan lainnya. Pemberian warna merah dan putih pada sesaji bubur hanyalah sebagai simbol bendera negara Indonesia.

Bentuk sesaji sebagai suguhan tersebut tidak lebih dari upaya balas jasa, pamrih atas apa yang telah diberikan ataupun kemurahan hati dari sosok penguasa laut selatan tersebut. Dari pandangan antropolog, diistilahkan pemberian tersebut sebagai bentuk resiprositas (pertukaran) yaitu pemberian kepada seseorang yang telah memberi sesuatu (barang atau jasa). Bentuk resiprositas ini dalam prosesnya mengarah kepada sistem upeti atau pemberian yang wajib diberikan kepada seseorang yang dianggap berkuasa. Apabila pemberian tidak dilakukan maka akan timbul kemarahan dari sang penguasa tersebut dalam bentuk pengrusakan harta benda atau kesengsaraan kepada seseorang atau sekelompok orang.

4. Keberadaan Nyi Roro Kidul di Cianjur Selatan: Antara Fakta dan Mitos

Dikatakan dalam banyak cerita dan legenda bahwa Nyi Roro Kidul sebagai sosok gaib penguasa laut selatan pulau Jawa. Penampakan dalam bentuk kejadian ataupun lewat mimpi tentang Nyi Roro Kidul yang ditindaklanjuti dalam bentuk kebiasaan melakukan upacara sebagian besar terkonsentrasi pada lokasi-lokasi tertentu. Di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, upacara penghormatan kepada Nyi Roro Kidul terpusat di Provinsi

⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, “Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan”, *Makalah*, hal. 69 - 70

Yogyakarta, tepatnya di pantai Parangtritis. Di Provinsi Jawa Barat, Mitos yang ditindaklanjuti dalam bentuk upacara untuk menghormati Nyi Roro Kidul juga terkonsentrasi pada lokasi atau tempat tertentu saja. Peta administratif Provinsi Jawa Barat bagian selatan yang berbatasan dengan bibir pantai terbagi dalam beberapa kecamatan seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Kecamatan dalam wilayah pesisir
Selatan Jawa Barat

Ciamis	Tasikmalaya	Garut	Cianjur	Sukabumi
Kali-pucang	Cikalong	Mekar-mukti	Cidaun	Tegalbuled
Pangandaran	Karangnunggal	Caringin	Sindangbarang	Surade
Cijulang	Bantar Kalong	Bungbulang	Agrabinta	Ciracap
Sidamulih	Cipatujah	Pakenjeng	-	Ciemas
Cimerak	-	Cikelet	-	Pelabuhanratu
-	-	Pamengpeuk	-	Cibitung
-	-	Cibalong	-	Cikakak
-	-		-	Cisolok

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

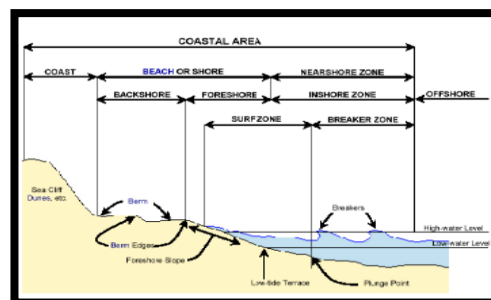
Di lima kabupaten yang tertera pada tabel di atas tampak hanya ada beberapa kecamatan saja yang santer menyorot keberadaan Nyi Roro Kidul, yaitu pangandaran (Ciamis), Sindangbarang (Cianjur), dan Pelabuhanratu (Sukabumi)⁷. Dengan demikian, timbul keraguan apakah benar Nyi Roro Kidul adalah benar penguasa seluruh pantai bagian selatan Pulau

Jawa? Selain itu, mengapa Nyi Roro Kidul hanya berkuasa di bagian selatan Pulau Jawa? Selain itu, ada wacana yang membedakan antara Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Apakah ada perbedaan atau hanya sekedar istilah yang berbeda sementara individu yang dituju adalah satu orang saja?

Kisah Nyi Roro Kidul ada kesamaan dengan kisah Batara Baruna dalam dunia pewayangan dan kisah Poseidon dalam mitologi Yunani Kuno. Ketiga kisah tersebut mengkuatkan satu sosok sebagai penguasa lautan. Ketiganya memiliki kewenangan untuk menjadikan lautan tenang, berombak, bahkan tsunami.

Gambar 2

Batas-batas fisik wilayah pesisir pantai
Cianjur selatan



Sumber: Brahtz, 1972

Faktor geografis Pantai Sindangbarang memang sangat berpotensi menimbulkan gelombang besar yang sangat membahayakan para nelayan. Dengan demikian, dari segi fakta telah tampak kaitan dengan mitos. Apalagi setelah menyimak kondisi pantai dan laut selatan Pulau Jawa secara keseluruhan. Eko Yulianto,⁸ seorang

⁷ Asal usul nama pelabuhanratu berkaitan erat dengan Nyi Roro Kidul. "Ratu" pada nama Pelabuhanratu adalah tidak lain dari Ratu Kidul yang berlabuh di tempat yang saat ini bernama pelabuhan ratu.

⁸ Lihat, Hubungan Bencana Tsunami dengan Legenda Nyi Roro Kidul, dalam <http://kumpulan-artikel->

peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan bahwa kawasan pantai selatan, berhadapan dengan Samudera Indonesia, yaitu daerah zona subduksi⁹ lempeng bumi. Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan sangat subur adalah hasil dari proses subduksi yang berlangsung secara terus menerus. Walaupun telah berbentuk kepulauan, proses subduksi masih terus berlanjut dan melalui proses itu pula yang memberikan berbagai bencana, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami seperti yang telah ataupun sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Telaah keberadaan Nyi Roro Kidul di antaranya adalah melalui gambar atau lukisan yang saat ini banyak dicetak di berbagai mass media. Di antara lukisan tersebut sebagian besar terpampang sosok Nyi Roro Kidul saat mengendalikan kereta kuda di tengah gelombang laut yang sangat besar.

Gelombang besar dalam lukisan Nyi Roro Kidul apabila terjadi dalam kenyataan bencana di Indonesia tentu akan banyak menelan korban jiwa. Setelah terbawa arus laut korban kemudian terbawa arus balik dan terdampar kembali di pantai.

Herry Harjono, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, mengatakan bahwa sangat aneh untuk mengkaitkan legenda atau mitos Nyi Roro Kidul dengan sejarah tsunami di Indonesia. Walaupun demikian, Harjono mengatakan bahwa “bantuan ilmuwan sosial untuk mengungkap asal-muasal legenda itu juga diyakini bisa membantu penelitian sejarah kejadian tsunami.”

menarik.blogspot.com/2008/11/hubungan-bencana-tsunami-dengan-legenda.html

⁹ Subduksi ialah proses menghujamnya lempeng benua yang bermassa lebih besar ke lempeng benua yang ada di bawahnya.

Melalui mitos Nyi Roro Kidul setidaknya akan memperkuat data para geolog dalam mencari jejak tsunami purba, seperti mengenai bukti gempa dan endapan tsunami yang terjadi pada 400 tahun lalu di Cilacap dan Pangandaran yang diyakini jauh lebih besar ketimbang yang terjadi pada 2006. Pasca tsunami yang telah melanda pantai di Cilacap dan Pangandaran tahun 2006 lalu masih menyisakan rasa was was para penduduk yang bermukim dekat pantai. Di Cilacap rasa was was saat itu masih sangat terasa apalagi saat muncul pesan pendek via *handphone* (SMS) yang mengabarkan bahwa tsunami akan terjadi Selasa Kliwon. Gelar ritual larung kepala kerbaupun segera dilaksanakan di pantai Teluk Penyus Cilacap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006.¹⁰

Endapan pasca tsunami juga telah membentuk semacam endapan tsunami di tebing sungai Cimbunan Pangandaran. Salah satunya berupa lapisan pasir tebal hingga 20 cm yang diendapkan di atas lumpur mangrove dan ditutupi endapan banjir. Oleh karena itu, hutan *mangrove* (bakau) seperti tertera di atas kerap dijadikan lokasi semedi untuk memohon sesuatu kepada Nyi Roro Kidul. Dalam endapan juga ditemukan pasir yang mengandung cangkang “fora minifera” seperti yang biasa hidup di laut lepas. Analisis pentarikan umur terhadap dua sampel yang diambil dari dua tempat berbeda menunjukkan lapisan pasir tsunami itu diendapkan 400 tahun lalu.

Petunjuk endapan yang sama pasca tsunami di Indonesia juga ditemukan di sepanjang pantai daerah Majene, Lombok, Mentawai, dan Simeulue. Khususnya di Simeulue – sebuah pulau di barat daya Provinsi NAD rupanya

¹⁰ Eviyanti, “Rasa Was Was Hantui Warga Pesisir”, dalam *Pikiran Rakyat* 31 Juli 2006, hal. 7.

telah mengenal tanda-tanda pra tsunami dengan istilah *smong*. *Smong* memuat pesan sederhana, namun masih dipatuhi warga Simeulue. Pesan itu berbunyi: “Jika terjadi gempa bumi kuat diikuti oleh surutnya air laut, segeralah lari ke gunung karena air laut akan naik”. Pengetahuan tradisional itu muncul setelah tsunami 1907. Disebutkan, seringnya tsunami sebelum 1907 di pulau itu memiliki andil bagi bersemainya pengetahuan tersebut. Catatan sejarah dan penelitian geologi menunjukkan pulau itu terlanda tsunami pada 1797, 1861, dan 1907.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Bermula dari proses adaptasi manusia dengan alam secara kontinyu. Manusia mengamati dan menterjemahkan gejala alam hingga akhirnya menemukan solusi - atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh lingkungan sekitar – berdasarkan tingkat pengetahuan pada masa itu. Agama asli adalah jawaban atas segala pertanyaan yang menyelimuti manusia atas gejala alam yang dialaminya.

Terutama agama asli yang berwujud animisme, saat ini masih tetap bertahan di Indonesia yang disebut dengan kepercayaan. Di Pulau Jawa, kelompok besar kepercayaan yang ada mengandung paham kejawaan dan sunda wiwitan. Dan, keduanya sama-sama menaruh rasa hormat atas keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai sosok penguasa laut selatan.

Ada perbedaan paham antara penamaan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Masyarakat sukubangsa Jawa memberikan status tertinggi kepada Kanjeng Ratu Kidul sementara Nyi Roro Kidul adalah salah satu patih yang tidak disukai Kanjeng Ratu Kidul karena memiliki sifat iri dan dengki. Ketidaksukaan tersebut diwujudkan

kan dalam bentuk pengusiran terhadap Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul akhirnya membuat istana sendiri di daerah Parangtritis dengan wilayah kekuasaan di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.

Masyarakat Sunda tidak begitu paham dengan perbedaan tersebut karena menganggap keduanya (Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul) adalah sama, yaitu sama-sama sebagai penguasa laut selatan.

Paham yang sama juga dianut oleh masyarakat Cianjur Selatan. Masyarakat Cianjur selatan memberikan rasa hormat kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk pelaksanaan upacara seperti Nyalawena, Syukuran Pasisiran, dan Ngaruwat. Sementara itu, ada juga beberapa pantangan yang harus ditaati berkaitan dengan ketidaksukaan Nyi Roro Kidul atas beberapa hal tertentu. Mitos “Si Pacul” adalah salah satu contoh sebagai sosok penderita, yang terkena tumbal atas perilaku yang telah melanggar larangan Nyi Roro Kidul. Mitos ini secara kontinyu diperingati dalam setiap upacara Nyalawena.

Mitos yang merupakan produk budaya bukanlah tidak dibuat begitu saja oleh para leluhur tanpa ada makna bukti dari kebenaran yang melandasinya. Saat ini mitos kurang begitu berarti bagi masyarakat. Mereka hanya sebatas tahu tanpa menganalisa makna yang terkandung dalam mitos tersebut. Analisa mitos dapat dilakukan dengan bersandar pada kondisi fisik suatu daerah dan etika kekinian. Analisa mitos Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan lebih banyak didasarkan pada kondisi fisik pantai selatan Pulau Jawa. Telah dibuktikan bahwa ada kaitan – meski tidak terlalu signifikan – antara kemarahan Nyi Roro Kidul dengan sejarah gelombang besar, atau bahkan tsunami, yang melanda terutama di sepanjang pantai selatan, termasuk di Cianjur Selatan tentunya.

2. Saran

Mitos tentang Nyi Roro Kidul di Cianjur Selatan, berdasarkan penelitian ini, ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Meski dari pemikiran kekinian tidak tampak sosok jelas Nyi Roro Kidul namun makna etika yang terkandung di dalam mitos ini patut untuk difikirkan kembali. Terdapat banyak etika positif yang dapat diambil berkaitan dengan unsur pelestarian lingkungan serta interaksi antar individu ataupun dengan sekelompok masyarakat.

Upaya pelestarian kebudayaan yang saat ini tengah gencar dilakukan sangat terkait dengan penggalan potensi wisata tiap daerah. Terkadang segi mitos hanya sebagai unsur pendukung yang tidak memiliki makna sosial sama sekali. Beberapa pantangan dalam mitos sering dilanggar terutama oleh wisatawan. Oleh karena itu, disarankan agar mitos-mitos yang ada terutama di daerah kunjungan wisata budaya patut dilestarikan karena berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan dan keserasian tatanan sosial masyarakat di lingkungan daerah wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. 1996.
P.R.A.—Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.
- Chambers, R. 1999.
“Relaxed and Participatory Appraisal: Notes on Practical Approaches and Methods, Notes for Participant”, dalam *P.R.A. Familiarization Workshop*. Brighton: Institute of Development, Studies University of Sussex, hlm. 1–23.
- Driya Media Berbuat Bersama Berperan Serta. 1996.
Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1993.
Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Jambatan.
- Rosyadi et al. 2007.
Nilai-Nilai Budaya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Wilayah Budaya Priangan Barat (Kabupaten Cianjur). Jakarta: Depbudpar.
- Subagya, Rachmat. 1981.
Agama Asli Indonesia. Edisi II. Jakarta: Sinar Harapan.
- Surbakti, Ramlan A. 2005.
“Teori dalam Penelitian Ilmu Sosial”, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed) *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syam, Nur. tth
Islam Pesisiran dan Islam Pedalaman: Tradisi Islam Di Tengah Perubahan Sosial. Makalah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel.
- Umam, Fawaizul. tth
Mengurai Ketegangan Islam dan Lokalitas dengan Etnohermeneutik. Makalah. Mataram: IAIN.
- “Seren Taun’, Melestarikan Budaya Asli Sunda”, 2003, dalam *Kompas*, Sabtu, 05 April.

Sumber Elektronik

- “Alam Mahluk Halus”, dalam www.merbabu.com
- “Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2004”, dalam [http://www.cianjur.go.id/ Ver.2.0/ Content_ Nomor_Menu_18_3.html](http://www.cianjur.go.id/Ver.2.0/Content_Nomor_Menu_18_3.html)
- “Nyalawena”, dalam [http://sunda.web.id/ category/naskah-sunda/nyalawena](http://sunda.web.id/category/naskah-sunda/nyalawena)
- “Nyalawena”, Tradisi Mencari ‘Impun’ Masyarakat Sindangbarang, dalam www.compas.co.id.

PERANAN PEMIMPIN INFORMAL PADA MASYARAKAT GURADOG

Oleh **Ani Rostiyati**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: *ani.rostiyati@yahoo.com*

Abstrak

Kebergantungan masyarakat pada pemimpin informal yang berperan sebagai pemimpin adat, sangat tinggi. Hal itu disebabkan warga masyarakat meyakini, bahwa pemimpin adat mempunyai kemampuan dan kelebihan tertentu. Masyarakat percaya bahwa kehadiran pemimpin adat dapat memberi ketenangan dan harmoni. Ia dapat merepresentasikan masyarakat untuk berhubungan dengan leluhur. Pemimpin adat merupakan mediator antara masyarakat dengan leluhurnya.

Dengan demikian, pemimpin informal/pemimpin adat mempunyai kedudukan dan peran yang penting. Ia bukan sebagai pemimpin adat yang berperan sebagai pemimpin masyarakat dalam hukum adat dan melindungi tradisi leluhur, tetapi juga sebagai figur yang berperan sebagai mediator pemerintah di bidang sosial dan adat. Pemimpin informal dengan peran demikian itu antara lain terdapat pada masyarakat Guradog, Kabupaten Lebak Propinsi Banten.

Kata Kunci: pemimpin informal, adat-istiadat.

Abstract

People's dependency at informal leader who personating leader of custom, is very high. It is caused by society citizen believe, that leader of custom have certain excess and ability. Society believe that attendance of leader of custom can give harmony and calmness. He can give presentation society to deal with ancestor. Leader of custom represent mediator between society with its ancestor.

Thereby, informal leader / leader of custom have an important status and role. He is not only as leader of custom who personate leader of society in customary law and protect ancestor tradition but also as figure which personate government mediator in social area and custom. Informal leader with role that way for example there are at society of Guradog, Regency of Lebak Province of Banten

Keywords: informal leader, custom.

A. Pendahuluan

Proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pembangunan, pemerintah dihadapkan pada kenyataan kehidupan

masyarakat pedesaan yang umumnya masih lekat memegang adat istiadat, sehingga program pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan.

Seringkali terjadi, suatu program pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah tidak memperhitungkan faktor sosial dan kebudayaan masyarakatnya, padahal dukungan dan partisipasi masyarakat setempat merupakan suatu keharusan. Pentingnya dukungan dan partisipasi warga masyarakat bukan hanya berkaitan dengan kepentingan program pembangunan tersebut, tetapi berkaitan dengan tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan tersebut baru akan berhasil bila didasarkan pada kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Bentuk nyata dari dukungan dan partisipasi masyarakat di antaranya dengan memperhatikan keberadaan pemimpin informal tradisional pada masyarakat tersebut. Peranan seorang pemimpin informal tradisional dinilai penting karena dapat berperan ganda, selain sebagai pemimpin masyarakatnya, juga sebagai perantara atau *culture agent* antara masyarakat yang dipimpinnya dengan pemerintah. Pemimpin informal tradisional di pedesaan, khususnya pemimpin adat, selalu menjadi tokoh panutan yang berperan dalam mengatur dan mempertahankan nilai-nilai adat yang dianut masyarakat, serta sebagai mediator pemerintah untuk menyampaikan program pembangunan.

Pemimpin informal tradisional di pedesaan memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai pimpinan adat maupun sebagai media pemerintah. Demikian pula, di Desa Guradog yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Lebak Propinsi Banten memiliki pemimpin adat yang disebut *olot* (ketua adat). *Olot* (sesepuh adat) sebagai pimpinan adat di Desa Guradog memiliki peranan penting dan menjadi panutan masyarakatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Guradog berpegang teguh pada penuturan *olot* (sesepuh adat), yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi. Beberapa hal yang menurut sesepuh adat dianggap tabu maka harus ditaati oleh masyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Guradog. Sesepuh adat juga berperan sebagai media pemerintah untuk menyampaikan program pembangunan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Guradog, sesepuh adat berperan sebagai sesepuh dan pemimpin adat dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam aspek pemerintahan juga ikut membantu perangkat desa dalam menyampaikan program pembangunan.

Mengingat pentingnya peranan *sesepuh* adat sebagai pemimpin informal di Desa Guradog, maka perlu adanya penelitian mengenai sejauh mana peranannya dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek sosial, pemerintahan, dan hukum (adat).

Setiap manusia dalam lingkungannya memegang peranan dalam kehidupan dengan status yang dimilikinya. Menurut *Ralph Linton*, ada dua macam status yaitu:

- a. *Ascribed status*, yaitu status yang diperoleh berdasarkan wewenang.
- b. *Achieved status*, yaitu status yang diperoleh dengan usaha sendiri.

Adapun peranan mengandung pengertian suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain yang menduduki status tertentu. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan William F. Kendel yang mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai kedudukan maka ia akan diberi sejumlah harapan untuk dapat melaksanakan sesuai kedudukan yang disandangnya. Peranan juga meliputi aspek-aspek kehidupan yang

luas dari individu tersebut. Peranan bukan hanya dikaitkan dengan posisi dalam suatu kedudukan/pekerjaan namun mencakup sikap, perilaku, dan tanggung jawab pada masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud pemimpin informal ialah orang yang berpengaruh dan diakui sebagai pemimpin oleh suatu kelompok atau masyarakat pedesaan dan tidak memegang jabatan resmi dalam pemerintahan desa. Menurut Koentjaraningrat (1977:41) yang dimaksud pimpinan informal adalah pimpinan yang tidak diangkat langsung oleh pemerintah tetapi mempunyai pengaruh yang luas dalam masyarakat bahkan lebih besar pengaruhnya dari pemimpin formal. Pemimpin adat adalah termasuk pemimpin informal tradisional yang memiliki pengaruh dan peranan besar dalam masyarakat pedesaan. Apabila berbicara tentang peranan pemimpin adat, maka secara tidak langsung membicarakan peranannya dalam masyarakat yaitu bagaimana pemimpin adat sebagai pemimpin informal tradisional membawakan peranannya dalam proses perubahan, yaitu sebagai mediator atau *cultural agent* yang bertugas untuk melaksanakan program pembangunan sekaligus mempertahankan adat istiadat masyarakat yang dipimpinnya.

Sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui bagaimana peranan pemimpin informal dalam kehidupan masyarakat Guradog, yang meliputi peranan pada aspek sosial, aspek pemerintahan, dan aspek hukum (adat).
- b. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan berguna memberi masukan bagi pembuat kebijakan dalam kaitannya dengan pembinaan lembaga adat khususnya pemimpin

informal (adat) yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai peranan pemimpin adat pada kehidupan masyarakat Guradog, meliputi peranan pada aspek sosial, aspek pemerintahan, dan hukum adat. Pada aspek sosial, peranan bisa dilihat dalam memimpin musyawarah, memimpin upacara adat, tempat bertanya dan meminta nasihat, serta panutan masyarakat dalam melaksanakan tata cara kehidupan sehari-hari. Pada aspek pemerintahan bisa dilihat pada tugas pemimpin adat dalam membantu perangkat desa menyampaikan program pembangunan dari pemerintah pada masyarakat. Sedangkan pada aspek hukum bisa dilihat dari tugas pemimpin adat melaksanakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan hukum Islam.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah deskriptif karena masalah yang diteliti sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai peranan pemimpin adat dalam kehidupan masyarakat. Dengan metode kualitatif, data yang diambil diharapkan dapat menggambarkan mengenai peranan pemimpin adat pada masyarakat Guradog. Untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam pada sejumlah informan. Informan yang dipilih adalah pemimpin informal masyarakat, seperti *olot* (sesepuh adat), pembantu *olot*, ulama, sesepuh, dan sebagian masyarakat serta pemimpin formal yaitu perangkat desa.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Guradog, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Dipilihnya lokasi penelitian ini,

berdasarkan pertimbangan bahwa pemimpin tertinggi masyarakat Guradog dipegang oleh seorang pemimpin adat (*olot*) dan pembantu *olot* (sekretaris adat, *baris kolot*, dan *pangiwa*). Dalam melaksanakan tata cara kehidupan sehari-hari, masyarakat berpegang teguh pada penuturan pemimpin informal (*olot* dan pembantu *olot*), baik mengenai hal-hal yang dilarang (tabu) maupun kewajiban yang harus ditaati masyarakat. Dapat dikatakan peranan sesepuh adat sangat strategis dalam membina kerukunan hidup masyarakat Guradog.

B. Hasil dan Bahasan

Desa Guradog merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak. Lokasi desa ini sekitar 17 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 36 kilometer dari ibu kota kabupaten. Desa Guradog berada pada ketinggian 100-400 meter di atas permukaan air laut yang memiliki bentang wilayah berbukit, sebagian besar tanah berwarna merah atau kuning. Suhu rata-rata antara 32 sampai 40 derajat Celsius. Jumlah curah hujan dalam tiap tahun berlangsung selama 9 bulan dengan curah hujan 1.500 mm/tahun. Luas keseluruhan Desa Guradog sekitar 1.020,39 hektar terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan pemukiman.

Komposisi penggunaan lahan tersebut menggambarkan mata pencaharian penduduk Desa Guradog yakni sebagai petani sawah atau kebun serta pekerjaan yang berkaitan dengan hutan seperti penyadap, tukang kayu, atau pembuat arang. Sekalipun dalam jumlah relatif sedikit, terdapat pula penduduk dengan mata pencaharian di luar bidang pertanian di antaranya sebagai buruh dan pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan kependudukan, Desa Guradog berpenduduk sebanyak 3.716

orang dengan komposisi jenis kelamin 1.877 orang laki-laki dan 1.839 perempuan. Jumlah tersebut terdiri atas 919 kepala keluarga (KK). Penduduk Desa Guradog kebanyakan tidak dapat memasuki dunia kerja formal mengingat dasar pendidikan yang dimiliki oleh mereka sangat rendah. Rendahnya keikutsertaan anak didik di bangku sekolah disebabkan oleh terbatasnya fasilitas persekolahan di Desa Guradog. Keterbatasan fasilitas sekolah ini menyebabkan tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan untuk ukuran rata-rata masyarakat Desa Guradog, terutama untuk biaya transportasi dari rumah ke sekolah yang lokasinya berada di luar Desa Guradog. Faktor rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan termasuk hal yang menyebabkan rendahnya minat peserta didik untuk bersekolah. Pola pikir para orang tua yang lebih mementingkan untuk mengelola alam menjadi penyebab lain rendahnya kesadaran untuk bersekolah. Alam Desa Guradog yang subur, memang sangat memerlukan tenaga yang banyak untuk mengolah menjadi bumi yang produktif. Dengan mengolah alam menjadi lebih produktif menyebabkan mudah dalam menghasilkan uang, sebagai contoh terdapat beberapa potensi alam yang mampu mendatangkan uang seperti: getah karet, batu gunung, bambu, kayu, dan lain sebagainya. Bahan ini sangat mudah diperoleh dan jika dijual dapat dengan cepat menghasilkan uang.

Penduduk Desa Guradog seluruhnya beragama Islam. Oleh sebab itu, tempat-tempat beribadat yang terdapat di Desa Guradog hanya berupa mesjid dan langgar. Jumlah mesjid yang terdapat di Desa Guradog sebanyak 4 mesjid dan 3 langgar atau mushola. Adapun pola pemukiman masyarakat Desa Guradog termasuk tipe mengelompok yakni menempati

sepanjang jalan besar dan gang dengan arah menghadap ke jalan. Biasanya rumah baris pertama yang menghadap jalan akan diikuti oleh rumah-rumah lain di belakangnya. Arah rumah yang demikian lebih mementingkan jalinan hubungan sosial dengan tetangga agar terus terjalin. Di Desa Guradog mengalir tiga buah sungai, yakni Sungai Citundun, Sungai Ciapus, dan Sungai Citembong. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat, di antaranya untuk mencuci, mandi, dan kakus. Kelompok rumah lainnya menempati lahan yang berada jauh dari jalan raya atau sungai yakni di sekitar sawah atau kebun. Pemilik rumah yang mendirikan rumah di lokasi ini karena mereka tidak memiliki lahan di tempat lain atau sengaja mendirikan rumah di tempat tersebut dengan maksud agar dekat dengan sawah atau ladang miliknya.

1. Desa Guradog Sebagai Desa Adat

Desa Guradog merupakan desa yang dikategorikan sebagai desa adat. Komunitas warga Desa Guradog disebut sebagai komunitas adat kasepuhan atau *kaolotan*. Sebutan kasepuhan/*kaolotan* menunjuk suatu sistem kepemimpinan dari suatu komunitas atau kelompok sosial, di mana semua aktivitas anggotanya berazaskan adat para orang tua (*sepuh* atau *kolot*). Terlihat dalam tata cara kehidupan mereka yang masih kukuh menjalankan *tatali paranti karuhun* (K. Adimihardja pada Rosyadi, 2005: 28). Kehidupan masyarakat Desa Guradog termasuk kehidupan yang khas. Kepemimpinan masyarakatnya diatur oleh dua tipe kepemimpinan yakni pemimpin formal dan pemimpin informal. Kedua tipe kepemimpinan tersebut berjalan selaras dalam mengatur gerak dan langkah masyarakat Desa Guradog.

Pemimpin formal mengatur gerak masyarakat yang terkait dengan program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemimpin formal akan menjembatani pelaksanaan program pemerintah dengan masyarakat. Struktur organisasi kemasyarakatan formal diisi oleh camat, kepala desa, ketua RW, dan ketua RT. Pemimpin formal ini ditunjuk oleh masyarakat melalui pemilihan yang demokratis dan disetujui atau diangkat berdasarkan surat keputusan dari pemerintah. Dasar hukum yang digunakan oleh pemimpin formal dalam mengelola masyarakat adalah undang-undang dan ketentuan pemerintah lainnya. Sanksi bagi pelanggar undang-undang dan ketentuan lainnya adalah yuridis formal yang berupa hukum pidana dan perdata.

Di Desa Guradog, selain terdapat pemimpin formal, juga terdapat pemimpin informal yang disebut *olot*. Dasar hukum yang digunakan oleh pemimpin informal ini adalah adat yang sudah berlaku turun-temurun dan dipatuhi oleh warganya. Pemimpin informal merupakan pemimpin adat masyarakat Desa Guradog yang menjadi bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Dalam melaksanakan perannya, kedua pemimpin ini saling bekerjasama satu dengan lainnya. Tujuan utama mereka adalah membawa kehidupan masyarakat agar damai, rukun, dan sejahtera. Kerja sama yang baik dan padu ditunjukkan oleh falsafah *tuli sapamilu, dua sakarupa, nu hiji eta keneh* (tiga bersama-sama, yang dua masih serupa, yang menjadi satu masih yang itu juga). Maksud falsafah *tilu sapamilu* adalah tiga komponen pemerintahan, agama, dan tradisi harus berjalan dengan selaras dan harmonis. *Dua sakarupa* berarti antara tradisi dan agama jangan dipisahkan dan dipertentangkan. *Nu hiji eta keneh* maksudnya semua komponen tersebut

harus menuruti dan sesuai dengan aturan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua model kepemimpinan tersebut di atas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Pemimpin formal melaksanakan semua urusan yang terkait dengan administrasi kenegaraan, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, surat pengantar, atau berbagai surat keterangan. Pemimpin informal mengelola masyarakat dari sisi spiritual dan adat yang tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin formal seperti pelaksanaan upacara adat, konsultasi tentang nasib, penentuan hari baik, perjodohan, dan lain sebagainya. Masyarakat menggunakan kewenangan kedua pemimpin tersebut secara tepat, sehingga tidak pernah terjadi benturan kewenangan. Bahkan jika melihat kenyataan, pemimpin informal memiliki tugas dan kepercayaan yang lebih besar dibandingkan pemimpin formal mengingat hampir seluruh tatanan kehidupan diatur dengan adat dan masyarakat selalu konsultasi dengan pemimpin informal. Bahkan adakalanya untuk memperlancar komunikasi dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah, pemimpin formal sering meminta bantuan pemimpin informal.

2. Olot: Pemimpin Informal (Adat) di Desa Guradog

Dengan tugas dan fungsi pemimpin informal yang begitu banyak, menunjukkan bahwa peran dan kedudukan pemimpin informal sangat penting. Ketua adat yang sekaligus merupakan pemimpin mereka disebut *olot* yang menduduki tempat tertinggi dalam struktur masyarakat Desa Guradog. Jabatan *olot* diperoleh melalui garis keturunan yang jatuh pada turunan laki-laki yakni anak laki-laki atau adik laki-laki. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan dan kelayakan turunan yang

akan menggantikan jabatan *olot*. *Olot* atau ketua adat ini dibantu juga oleh beberapa pembantu yakni sekretaris adat, 30 *baris kolot*, dan *pangiwa*. Mereka ini sebagai penasihat dan pembantu *olot* dalam menjalankan kehidupan yang berkaitan dengan adat atau tradisi di Desa Guradog.

Seorang ketua adat atau *olot* diharapkan mampu berpikir bijak, menjadi panutan, dan melindungi warganya. Hal yang lebih utama adalah seorang *olot* harus mampu menjaga agar tradisi yang telah turun-temurun dilakukan tetap lestari, dapat berjalan selaras dengan agama yang dianut masyarakat dan selaras pula dengan peraturan pemerintah. Pada awalnya, peran *olot* hanya sebagai pembimbing masyarakat pada hal-hal yang berkaitan dengan adat, namun kini tugas *olot* berkembang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di berbagai aktivitas sosial dan sebagai media pemerintah dalam penyampaian program pembangunan.

Fungsi *olot* sebagai pemimpin informal sangat berperan menjaga nilai-nilai luhur budaya peninggalan para *karuhun*. Salah satu penerapan norma-norma tersebut dengan memberlakukan pantangan atau tabu. Setiap anggota masyarakat yang mempercayainya harus patuh pada pantangan tersebut. Selain itu persatuan dan kerukunan oleh *olot* diterapkan juga dalam sistem pemilihan lurah. Bukti menunjukkan sekalipun calonnya hanya satu dan berasal dari keluarga *olot*, suara mutlak pemilih selalu terpenuhi. Dari bukti ini menunjukkan bahwa *olot* tidak gegabah dalam menentukan calon lurah, serta suara penuh yang ditunjukkan oleh pemilih menunjukkan rasa setuju atas figur pemimpin yang dipilihnya. Namun demikian *olot* tidak dapat berbuat sewenang-wenang, menentukan semuanya seorang diri, dia didampingi oleh

penasihat lain yang tugasnya memberi saran untuk segala permasalahan. Kelompok tersebut disebut *baris kolot*. Dengan demikian, *baris kolot* akan selalu mengadakan pengawasan terhadap segala keputusan yang diambil *olot*, hingga keputusan-keputusan yang diambil oleh *olot* akan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Olot adalah sebutan ketua adat di Guradog yang merupakan lapisan sosial tertinggi berdasarkan keturunan. Saat ini yang menjadi ketua adat di Guradog adalah keturunan keempat dari *olot* sebelumnya. *Olot* berfungsi sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan adat istiadat yang ada di Guradog. Selain itu juga sebagai mediator pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunan seperti pemilihan kepala desa (kades), KB, perbaikan jalan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Boleh dikata ketua adat (*olot*) ini memiliki peran ganda dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, *olot* juga dibantu oleh sekretaris adat. Sekretaris adat ini juga merupakan keturunan adat yang berasal dari Kampung Alung. Dia dipilih sebagai sekretaris adat karena memiliki garis keturunan adat dari sekretaris adat sebelumnya. Sekretaris adat berfungsi sebagai pembantu *olot* dalam memimpin musyawarah atau rapat adat, kegiatan upacara adat, dan menyelesaikan masalah adat. Selain sekretaris adat, *olot* juga dibantu oleh *pangiwa* yakni orang yang membantu dalam menyebarkan undangan atau pengumuman yang berkaitan dengan adat. Orang yang menjadi *pangiwa* adalah orang yang memiliki garis keturunan adat. *Olot*, sekretaris adat, dan *pangiwa* inilah orang yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Guradog. Jabatan ini didapat secara turun-temurun dari orang tua sebelumnya, kemudian dipilih oleh

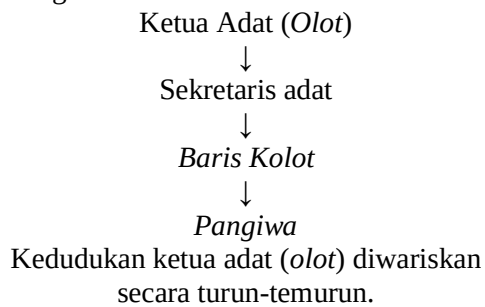
masyarakat. Boleh dikata ketiga tokoh ini yang menjadi panutan dan tempat bertanya masyarakat Guradog dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih *olot*, apa yang dikatakan atau dilarang olehnya dipatuhi oleh masyarakat.

Dilihat dari sejarahnya, kepala desa di Desa Guradog semuanya masih keturunan dari keluarga *olot*. Ini mengisyaratkan bahwa *olot* memiliki pengaruh dan peranan yang penting pada masyarakat Guradog. Dalam pemilihan kepala desa pun juga dipengaruhi oleh keputusan *olot*. Di Desa Guradog selain lembaga formal seperti kepala desa, RT, RW, juga terdapat lembaga adat yang menjalankan fungsi-fungsi adat istiadat setempat. Lembaga adat adalah struktur masyarakat yang didasarkan pada kedudukan adat serta menjalankan fungsi-fungsi adat-istiadat setempat. Struktur lembaga adat terdiri atas ketua adat dengan istilah sapaan "*olot*", sekretaris adat, *baris kolot*, dan *pangiwa*. Ketua adat (*olot*) memimpin hampir semua aktivitas pelaksanaan adat-istiadat penduduk setempat. Ketua adat juga menentukan dan memutuskan semua perkara yang bertalian dengan aturan-aturan adat yang harus senantiasa ditaati oleh semua warga Guradog. Adapun sekretaris adat bersama *olot* bertugas untuk memimpin rapat atau musyawarah warga yang dilakukan sebulan sekali.

Ketua adat di Desa Guradog disebut dengan istilah "*olot*", menempati posisi sangat penting dalam struktur masyarakat setempat. *Olot* sekarang adalah H. Ono yang merupakan keturunan ketiga dari *olot* sebelumnya. *Olot* selain memimpin hampir semua aktivitas pelaksanaan adat-istiadat masyarakat juga membantu dalam hal urusan pemerintahan. Semua warga Guradog harus menaati ketentuan yang disampaikan oleh *olot*. Oleh sebab itu,

kedudukan *olot* sangat dihormati di lingkunganarganya.

Posisi selanjutnya adalah para pembantu *olot* yang disebut dengan sekretaris adat, *pangiwa*, dan *baris kolot*. *Baris kolot* terdiri atas orang-orang pilihan yang berpengaruh di Desa Guradog. Para pembantu *olot* ini masing-masing memiliki tugas khusus dan menjadi tangan kanan *olot* dalam setiap penyelenggaraan upacara adat atau hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Sekretaris adat membantu *olot* dalam memimpin rapat atau musyawarah adat dan menyelesaikan berbagai masalah adat. *Pangiwa* adalah orang yang membantu menyampaikan undangan atau pengumuman hasil rapat adat. Sedangkan *baris kolot* yang terdiri dari 30 orang keturunan adat adalah orang yang membantu pekerjaan sekretaris adat dan *olot* dalam membuat keputusan. Secara skematis, struktur sosial komunitas adat masyarakat Guradog dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Pemimpin Informal di Desa Guradog

Pemimpin informal dalam hal ini pemimpin adat di pedesaan memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai mediator pemerintah maupun sebagai pemimpin adat. Demikian pula di Desa Guradog yang merupakan kampung adat di Kabupaten Lebak memiliki pemimpin adat yang disebut ketua adat dengan sapaan *olot*, yang dihormati dan menjadi

panutan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tata cara kehidupan sehari-hari, masyarakat Guradog berpegang teguh pada penuturan *olot* yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi. Aturan dan tutur kata pemimpin adat sangat ditaati oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, sesepuh adat merupakan tempat bertanya, meminta nasihat, dan petunjuk. Dalam kehidupan sosial, sesepuh adat berperan sebagai pemimpin adat dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.

Selain itu, ketua adat di Guradog memiliki peranan penting dalam aspek pemerintahan yakni sebagai mediator bagi pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan. Ketua adat ikut berperan dalam membantu perangkat desa dalam menyebarluaskan informasi pembangunan pada masyarakat. Demikian pula dalam aspek hukum, ketua adat melaksanakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan agama Islam.

Secara umum sebagai pemimpin adat, ketua adat selalu menjadi tokoh panutan yang berperan dalam mengatur dan mempertahankan nilai-nilai adat yang dianut masyarakat. Berikut ini diuraikan tentang peranan ketua adat yang disebut dengan *olot* dalam kehidupan masyarakat Guradog, meliputi peranan pada aspek sosial, aspek pemerintahan, dan aspek hukum. Namun, sebelum itu akan dibahas mengenai sosok ketua adat atau *olot* Guradog dan para pembantu adat.

Olot, H. Ono, adalah anak ke-4 dari 10 bersaudara dan merupakan keturunan ke-3 dari *olot* sebelumnya, yakni H. Kadung (orang tua) dan H. Sarmin (kakek). H. Kadung memiliki 10 orang anak, dan hampir semua anak telah melaksanakan ibadah haji. Anak-anak H. Kadung memiliki jabatan atau kedudukan penting baik di pemerintahan maupun

masyarakat yakni sebagai kepala desa dan tokoh agama yang memimpin setiap acara keagamaan di Desa Guradog. Saudara-saudaranya yang lain pun dianggap keluarga mampu dan terpan-dang, karena memiliki usaha perkebunan karet yang cukup sukses.

Dalam menjalankan tugas, ketua adat (*olot*) dibantu oleh sesepuh adat yang lain yakni sekretaris adat, *baris kolot*, dan *pangiwa*. Saat ini yang menjabat sebagai sekretaris adat adalah Bapak Harun. Sekretaris adat memiliki peran yang sangat penting, yakni sebagai pelaksana semua kegiatan adat, musyawarah adat, dan menyelesaikan semua masalah. Dapat dikatakan tugas yang diemban sekretaris adat cukup berat dan dia juga sering mewakili *olot* pada acara-acara tertentu jika *olot* tidak bisa hadir. Pengetahuan adat yang dimiliki Bapak Harun cukup luas, oleh karena itu banyak warga yang datang untuk minta petunjuk atau restu. Misalnya jika ada warga yang mau menikahkan anaknya, maka mereka melakukan upacara *maros* yakni mohon doa restu dan “minta hari baik” pada Bapak Harun. Syarat yang harus dipenuhi adalah membawa seperangkat sirih yang dibungkus dengan daun pisang lengkap dengan rokok satu bungkus dan uang sekedarnya minimal 10 ribu rupiah. Pada acara *maros* ini, orang yang datang diberi doa ijab kabul oleh Bapak Harun, kemudian mereka disuruh pulang untuk menunggu penentuan “hari baik”. Bersama H. Itok (pemuka agama) dan ke-30 *baris kolot*, Bapak Harun menentukan hari baik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kelancaran upacara. Seminggu kemudian mereka sudah mendapatkan jawaban tentang hari baik tersebut.

Sekretaris adat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 30 *baris kolot*, yakni orang yang masih memiliki garis keturunan adat. Ke-30 *baris kolot*

tersebut membantu sekretaris adat dalam membuat semua keputusan yang menyangkut masalah adat. Hasil keputusan tersebut kemudian dilaporkan pada *olot*. Jika ada satu permasalahan maka *olot*, sekretaris adat, dan *baris kolot* bermusyawarah untuk membuat satu keputusan. Ke-30 *baris kolot* ini juga ikut mengerjakan sawah adat yang hasilnya untuk kepentingan warga seperti untuk biaya dalam pelaksanaan upacara adat yang membutuhkan dana dan beras. Secara bergiliran ke-30 *baris kolot* tersebut mengerjakan sawah adat mulai dari menanam sampai panen.

Selain dibantu oleh ke-30 *baris kolot*, sekretaris adat juga dibantu oleh *pangiwa* yakni orang yang menyampaikan undangan dan pengumuman pada warga. Dalam menyampaikan undangan biasanya secara lisan melalui pengeras suara di mesjid. Saat ini yang menjabat sebagai *pangiwa* adalah Bapak Madsuni yang masih memiliki garis keturunan adat. Selain sebagai *pangiwa*, Bapak Madsuni menjabat juga sebagai kepala RW di wilayah Desa Guradog. Sesepuh adat lain adalah pemuka agama yakni Kyai H. Itok beserta para ustadz. Pemuka agama ini memiliki peranan penting dalam kegiatan keagamaan maupun adat. Kyai Itok adalah adik dari *olot* H. Ono yang sangat disegani oleh masyarakat Guradog. Sebagai Kyai, dia juga sering didatangi warga untuk dimintai pertolongan atau nasihat tentang perkawinan, perjodohan dan lain sebagainya. Seperti halnya keluarga H. Ono, Kyai Itok ini cukup berada. H. Itok dilahirkan 51 tahun yang lalu di Guradog. Tinggal bersama istri dan tiga anaknya yang belum menikah, semuanya masih sekolah. H. Itok sehari-hari aktif mengelola Pondok Pesantren Rodatul Mutaqin dan penyelenggara *salafi* yakni sekolah SLTP nonformal serta aktif di badan zakat amil (BAZ). Selain itu juga

sebagai pengusaha karet dan petani sawah yang memiliki lahan kurang lebih 20 Ha.

Demikianlah pemimpin adat yang ada di Desa Guradog, ternyata mempunyai peranan penting dalam menjaga tradisi atau adat istiadat agar tidak tergerus oleh jaman. Meskipun sistem kepemimpinan pada masyarakat Guradog terbagi dalam pemimpin formal dan informal, akan tetapi peranan pemimpin informal dalam hal ini ketua adat (*olot*) dan semua pembantunya (sekretaris adat, *baris kolot*, *pangiwa*) memiliki peranan menonjol bila dibandingkan dengan pemimpin formal. Terbukti semua keputusan *olot* sangat dipatuhi oleh warga, oleh sebab itu setiap adanya program pemerintah selalu melibatkan pemimpin informal yang digunakan sebagai media pada masyarakat untuk menyampaikan program pembangunan. Bahkan setiap keputusan kepala desa dalam setiap musyawarah atau rapat yang selalu dihadiri para sesepuh adat selalu dipengaruhi oleh persetujuan *olot*.

Dari uraian di atas, tampak bahwa pemimpin informal dalam hal ini pemimpin adat memiliki tugas penting dalam mengatur semua aktivitas warga Desa Guradog, yaitu meliputi aspek sosial, hukum, dan pemerintahan. Tidak hanya sebagai pemimpin upacara adat saja, melainkan sebagai *culture agent* atau perantara dan pengendali sosial bagi masyarakat Guradog. Berikut ini akan dikemukakan peranan pemimpin informal dalam hal ini *olot* dan para sesepuh adat lainnya meliputi aspek sosial, pemerintahan, dan hukum adat.

4. Peranan Pemimpin Informal dalam Aspek Sosial

Dalam kaitannya dengan tata cara kehidupan sehari-hari, ketua adat mempunyai peranan yang cukup penting, yaitu memberikan petunjuk dan

menjelaskan tentang riwayat Desa Guradog. Pemberian petunjuk dilakukan pada saat:

- a. Pengajian warga yang diselenggarakan setiap malam Jum'at. Pada saat itu *olot* memberi petunjuk atau nasihat mengenai adat atau tata cara yang dilakukan oleh leluhur pada warga terutama kaum muda yang dinilai masih awam dan kurang mendalami aturan adat istiadat yang berlaku.
- b. Musyawarah atau adanya pertemuan, karena saat itu seluruh warga hadir. Misalnya dalam pelaksanaan upacara adat *seren taun* dan *ngarengkong*. Selain itu, sesepuh adat sering mengaitkan hal-hal yang sedang dimusyawahkan dengan aturan adat di Guradog

Pada aspek sosial, ketua adat (*olot*) dan para pembantunya (sekretaris adat, *baris kolot*, *pangiwa*) pun memegang perasaan sangat penting dan menonjol. Hal ini terlihat dari tugas-tugas yang diembannya, yaitu:

- a. Sesepuh adat bertugas mencari dan menentukan "hari baik" warga yang akan melangsungkan pernikahan. Orang tua yang akan menikahkan anaknya, akan datang padanya untuk menanyakan tentang hari baik pernikahan anaknya. Menurut Bapak Harun, penentuan hari baik ditentukan dengan cara menghitung dari hari lahir calon pengantin. Demikian pula bagi orang yang akan mengkhitan anaknya, terlebih dahulu dicarikan hari baik.
- b. Sekretaris adat bertugas melayani tamu yang datang untuk berziarah ke makam keramat H. Sarmin. Makam tersebut sangat ramai dikunjungi peziarah, terutama pada saat upacara *seren taun* dan *ngarengkong*. Selain berziarah, ada juga pengunjung yang

menginap di makam tersebut untuk meminta berkah demi kemajuan usaha, kenaikan pangkat, bahkan untuk keberhasilan sekolah. Sebagai pemimpin adat, *olot* dan sekretaris adat dianggap sebagai tokoh masyarakat yang sangat disegani dan dihormati. Hal ini tampak dalam persiapan upacara perkawinan dan upacara adat lainnya, mereka selalu diharapkan hadir untuk memberi doa restu. Kehadirannya sangat diharapkan warga, karena dianggap memberikan berkah dan doa restu.

- c. *Olot* dan para pembantunya juga berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan rapat atau musyawarah warga. Di Desa Guradog, sebulan sekali diadakan rapat yang membahas mengenai keamanan, kebersihan, dan kegiatan warga lainnya. Dalam pertemuan tersebut, *olot* dan sesepuh adat lainnya bertindak sebagai sesepuh yang memberi petunjuk atau nasihat serta memimpin rapat agar berjalan lancar. Keputusan akhir memang pada musyawarah juga, namun arahan dan petunjuk dari *olot* sebagai sesepuh adat sangat diperlukan.
- d. *Olot* juga bertugas dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan makam leluhur. Meskipun sudah dijaga oleh seorang kuncen yang bertugas memelihara dan merawat makam leluhur, namun secara khusus *olot* ikut bertanggung jawab mengenai kebersihan dan keamanan. Setiap hari Jum'at bersama warga melaksanakan kegiatan Jumsih (Jum'at bersih) dengan membersihkan makam dan lingkungan sekitar, sehingga Desa Guradog kelihatan tertata rapih, bersih, dan rindang.

Untuk menjaga keharmonisan ini manusia berusaha untuk menjembatani dengan melakukan upacara ritual agar mendapatkan keselamatan. Disinilah *olot* dan para sesepuh adat berperan sebagai orang yang dianggap mampu sebagai mediator yang menghubungkan antara dunia sana (alam gaib) dengan dunia sini. *Olot* dan para sesepuh adat lainnya senantiasa memimpin semua ritual upacara adat. Bagaimanapun juga, pemimpin adat merupakan mediator antara masyarakat Guradog dengan para *karuhunnya*. Adapun pelaksanaan upacara itu sendiri merupakan sarana transformasi nilai-nilai dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hampir setiap upacara melibatkan peserta mulai dari kalangan anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki, dan perempuan. Salah satu contoh peranan yang dilakukan oleh *olot* sebagai sesepuh adat dan para pinisepuh lainnya adalah pada pelaksanaan upacara tradisional atau upacara adat. Pada acara tersebut terlihat jelas bagaimana fungsi dan tugas yang diembannya dalam memimpin pelaksanaan upacara tersebut dari awal sampai akhir.

5. Peranan Pemimpin Informal dalam Aspek Pemerintahan

Peranan sesepuh adat dalam aspek pemerintahan dapat dilihat dari tugas-tugas yang diembannya, antara lain:

- a. Sesepuh adat dalam hal ini *olot*, ikut serta dalam menyebarluaskan informasi pembangunan pada masyarakat Guradog. Program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah, seperti keluarga berencana (KB), lingkungan hidup, kesehatan ibu dan anak, kebersihan dan ketertiban, dan keindahan (K3), dan pendidikan generasi muda, akan berhasil dengan melibatkan *olot* sebagai

pemimpin informal. Melalui peran sertanya, informasi pembangunan akan lebih efektif sampai pada masyarakat karena segala tutur katanya sebagai sesepuh masyarakat akan dijadikan panutan dan pedoman.

- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam tugasnya dibantu oleh sekretaris desa dan kepala dusun. Ketika melaksanakan tugasnya sehari-hari, kepala desa selain dibantu oleh perangkat desa lainnya, juga dibantu oleh *olot* dan sesepuh adat yang lain. Mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi pada masyarakat. Kenyataannya, hal ini sangat efektif karena suara atau anjuran pemimpin adat lebih didengar dan dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam aspek pemerintahan dapat dilihat dari tugas-tugas yang diembannya, antara lain: sesepuh adat dalam hal ini *olot* dan sekretaris adat ikut serta dalam menyebarkan informasi pembangunan pada masyarakat Guradog. Program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah, seperti keluarga berencana (KB), lingkungan hidup, kesehatan ibu dan anak, kebersihan dan ketertiban, dan keindahan (K3), dan pendidikan generasi muda, akan berhasil dengan melibatkan ketua adat. Melalui peran sertanya, informasi pembangunan akan lebih efektif sampai pada masyarakat karena segala tutur katanya akan dijadikan panutan dan pedoman. *Olot* dan sekretaris adat selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan dari pemerintah misalnya pada tahun 1995 ketika program kesehatan diadakan, dijadikan sebagai

motivator (memberikan dorongan) dan katalisator (penggerak) pada warga agar bersedia ikut mensukseskan terlaksananya program tersebut (Jumsih, GDN, dll).

6. Peranan Pemimpin Informal dalam Aspek Hukum

Dalam aspek hukum, di Desa Guradog tidak terdapat hukum adat tertulis secara formal, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih berpegang pada hukum adat yang berupa norma dan nilai yang berlaku. Aturan-aturan seperti hukum perdata dan hukum pidana, tetap berpedoman pada hukum pemerintah. Kaitannya dengan hukum perdata dan pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesepuh adat turut membantu pelaksanaan hukum pemerintah tersebut dengan tidak melepaskan norma dan kaidah hukum yang ada dalam ajaran agama Islam.

Pelaksanaan tugas sesepuh adat dalam menerapkan hukum tersebut terwujud aturan adat sebagai berikut:

a. Penyelesaian masalah pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat Guradog.

Apabila salah seorang anggota masyarakatnya melanggar adat atau tidak patuh pada adat, maka secara adat akan dimusyawarahkan pada tingkat warga yang dipimpin oleh sekretaris adat bersama ke-30 *baris kolot*. Dalam musyawarah tersebut dicari cara penyelesaian masalah yang dinilai terbaik, biasanya secara damai atau kekeluargaan. Walaupun diselesaikan secara damai atau kekeluargaan tidak berarti sesepuh adat tidak memberikan sanksi, dia tetap melakukan hukum adat dan memberikan sanksi yang berlaku. Selanjutnya diberikan nasihat agar kasus serupa tidak terulang lagi, misalnya pada kasus pencurian pelakunya akan ditindak dan dinasihati. Sanksi lebih keras dapat

dilakukan, yaitu berupa pengusiran dari Desa Guradog selama waktu tertentu dan dapat kembali lagi jika dinilai sudah bertabiat baik dan bertobat. Jika cara tersebut dapat menyelesaikan masalah, maka kasus itu diserahkan kepada Kades dan pihak kepolisian melalui RT dan RW guna diselesaikan secara hukum pemerintahan yang berlaku.

b. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum waris.

Sesepuh adat menggunakan hukum atau aturan yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Namun demikian, untuk pembagian harta waris mereka tidak sepenuhnya mengadopsi aturan agama Islam. Mereka memiliki adat istiadat sendiri yang berlangsung turun-temurun. Semua tergantung keputusan orang tua dan tidak ada aturan tertentu, tapi biasanya dibagi rata. Aturan adat menentukan anak laki-laki dan perempuan memiliki hak sama atas warisan orang tuanya yakni. antara laki-laki dan perempuan sama besarnya. Konsep yang mendasari pembagian waris ini adalah pandangan yang menilai laki-laki maupun perempuan adalah sama anaknya dan darah dagingnya. Bila sudah usia lanjut, orang tua cenderung ikut atau bergantung pada anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Harta warisan yang sering ditinggalkan oleh warga Guradog yang sudah meninggal biasanya berupa tanah, ternak, sawah, kebun, uang dan emas. Tanah dan rumah diwariskan, karena kedua benda tersebut merupakan kekayaan individual, sehingga kepemilikannya diatur berdasarkan keturunan yang meninggal. Di Guradog jarang sekali warganya memperjual-belikan tanah. Sedapat mungkin mereka tidak menjual tanah pada orang lain, walaupun terpaksa dijual, akan dijual kepada saudaranya. Tanah, rumah atau kebun adalah barang penting yang akan

diwariskan pada anak cucunya. Itu pula sebabnya warga Guradog satu sama lain masih terikat dalam hubungan kerabat.

Demikianlah peranan pemimpin informal pada masyarakat Guradog. Tampaknya peranan ini tidak kalah penting bila dibandingkan dengan pemimpin formal, minimal mereka bersama-sama mengakomodasi semua kepentingan masyarakat Guradog baik itu untuk kepentingan adat maupun pembangunan. Jadi sistem kepemimpinan pada masyarakat Guradog terbagi menjadi dua yakni kepemimpinan formal (Kades, Sekdes, RW, RT) dan informal (*olot*, sekretaris adat, 30 *baris kolot*, *pangiwa*, ulama/kyai/ustad). Selain itu kepemimpinan di Guradog juga dipengaruhi dengan adanya pertalian saudara (hubungan kerabat) antara pemimpin formal dan informal yang masih satu keturunan dari Engkong H. Sarmin dan H. Kadung yakni orang yang dianggap *karuhun* warga Guradog.

Dalam kenyataannya, sesepuh adat Desa Guradog mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting yakni bukan saja sebagai pemimpin adat yang berperan sebagai pemimpin masyarakat secara adat dan pelindung tradisi warisan leluhur, melainkan juga sebagai tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator pemerintah dalam bidang pendidikan dan sosial.

C. Penutup

Ketergantungan masyarakat Guradog terhadap pemimpin adat sebagai orang yang dianggap memiliki kelebihan dari anggota masyarakat yang lainnya, berkaitan erat dengan tugasnya yang berat dan sakral, terutama dalam prinsip dan sikapnya yang selalu memegang teguh tradisi leluhur. Selain itu, dia juga sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dalam fungsinya sebagai pelindung adat, sesepuh adat juga berperan sebagai tetua hukum sekaligus sebagai pengambil atau pembuat keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat Guradog.

Secara umum, peranan pemimpin informal (adat) masyarakat Guradog dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Dalam aspek sosial adalah melayani tamu yang berziarah ke makam keramat dan berkunjung ke Desa Guradog, tempat bertanya tentang hari baik, memimpin dalam upacara-upacara adat, mempertahankan nilai-nilai adat setempat, memimpin rapat warga, dan memimpin warga dalam melaksanakan pembagunan.
- b. Dalam aspek pemerintahan adalah sebagai perantara dalam menyampaikan informasi pembangunan, sebagai mediator dalam menyampaikan aspirasi warga, dan membantu kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan seperti perbaikan jalan, pemilihan Kades, program KB, pendidikan 9 tahun, siskamling, dan kerja bakti.
- c. Dalam aspek hukum adalah penengah dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga, aturan adat dalam pola perkampungan, dan pembagian warisan.

Rekomendasi:

- a. Pemimpin informal dalam hal ini pemimpin adat dalam masyarakat pedesaan terbukti memiliki peranan penting, tidak saja sebagai pelestari adat atau tradisi yang masih kuat dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tapi juga bisa digunakan sebagai agen pemerintah dalam penyebarluasan informasi guna kemajuan masyarakat itu sendiri, baik di bidang sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Mereka dilibatkan dalam

pengambilan keputusan di tiap musyawarah dalam pembahasan prog-ram pemerintah.

- b. Perlu adanya pembinaan pada tokoh pemimpin adat, agar memiliki pengetahuan dan wawasan luas yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat itu sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan adat yang berlaku.
- c. Perlu diberi semacam penghargaan pada pemimpin adat baik berupa materi maupun non materi, agar menambah semangat serta motivasi mereka untuk lebih mempertahankan nilai-nilai tradisi dalam masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Drajat. 1994.
"Kampung Pulo", Akankah tetap lestari?". *Pikiran Rakyat*, 11 Desember.
- Hoebel, E.A. and Weaver T. 1979.
Anthropology and the Human Experience. Fifth Edition. New York: Mc Graw-Hill.
- Hofsteede. 1977.
Peranan Pemimpin Informal dari Sosiologis. Makalah pada ceramah mengenai "Peranan Sosial Pemimpin Informal dalam Kehidupan Bernegara. Bandung: Fakultas Sospol UNPAD.
- Indonesia. Depdikbud. 1990.
Eksistensi Lembaga Adat Kampung Pulo. Bandung: Proyek Penelitian Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat.
- Koentjaraningrat. 1977.
Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.
- Panitia Kamus Lembaga Basa dan Sastra Sunda. 1980.
Kamus Umum Basa Sunda. Bandung: Tarate.

